

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen Perubahan RPJMD ini guna lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir (2018). Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota). Luas wilayah Kabupaten Rembang 3,1% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa bagian timur Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Letak tersebut merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten Rembang dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya dan aksesibilitas semakin meningkat dengan akandilakukannya reaktifasi jalur rel kereta api lintas bagian utara Pulau Jawa (Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang).

Secara kewilayahan, Kabupaten Rembang memiliki kecenderungan berkembang ke arah Barat dan Timur. Hal ini menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier Kabupaten Rembang juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kabupaten Rembang dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kabupaten Rembang dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora
Sebelah Barat	: Kabupaten Pati
Sebelah Timur	: Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	16	8.020	7,91
4.	Sale	15	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedan	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulang	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	27	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
Kabupaten Rembang		294	101.408	100

Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2018

Peta batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111o 00'-111o 30' Bujur Timur dan 6o 30'-7o 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.

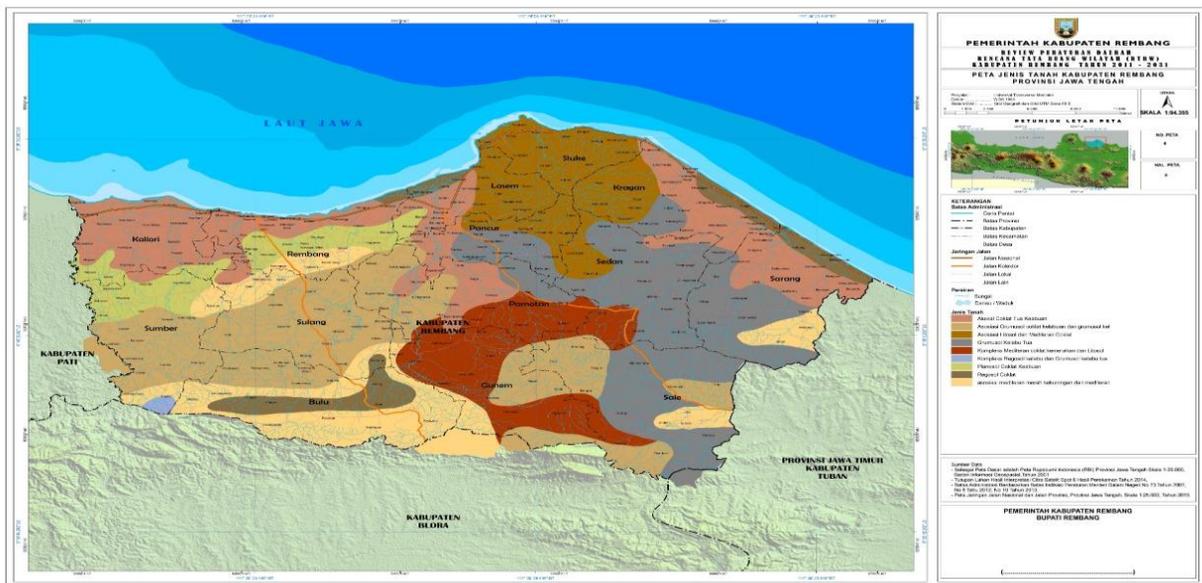
Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wilayah PKL Banglor meliputi kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah "Pengembangan wilayah Banglor berbasis perindustrian dan agroforestry yang

didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan”.

a. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0–7 meter dpl, ketinggian 8 -100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian 501–1.000 m dpl sebesar 3,07%.



Gambar 2.2
Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 46.367 ha (45,72%) mempunyai kelerengan sebesar 0-2%. Sedangkan 36.374 ha lainnya (35,84%) mempunyai kelerengan sebesar 3-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 16-40% dan > 40% masing-masing seluas 13,78% dan 4,66% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

b. Geologi

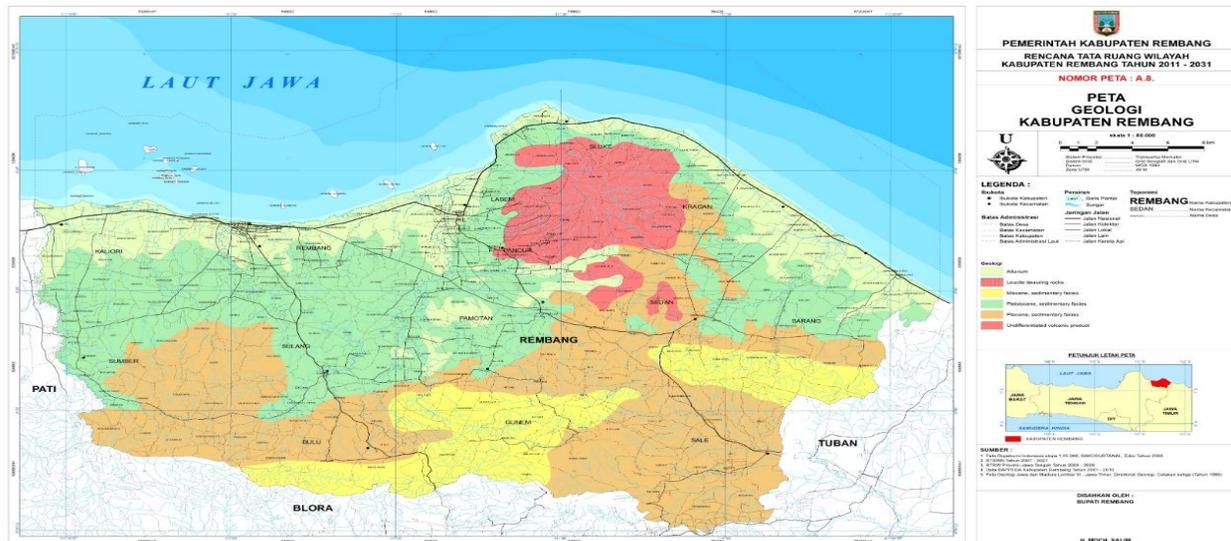
Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi:

- 1) Tanah Alluvial
 Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman.
- 2) Tanah Regosol
 Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan.
- 3) Tanah Grumosol
 Yaitu tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua atau sebesar 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang,

terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.

4) Tanah Mediteran Merah Kuning

Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput.



Gambar 2.3

Peta Geologi Kabupaten Rembang

Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Potensi yang cukup besar tersebut maka pabrik semen Indonesia telah membuka usaha di Kabupaten Rembang.

c. Hidrologi

Keadaan hidrologi pada Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari permukaan (*surface water*) dan air tanah. Kondisi hidrologi di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1) Air Permukaan

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rembang sangat bergantung pada curah hujan. Untuk mengurangi run off air dari hulu ke hilir selain mengandalkan sungai, di Kabupaten Rembang juga banyak dibangun embung dan waduk. Embung yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Jatimudo dan Embung Grawan. Di samping itu ada embung yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu Embung Panohan. Disamping kelima embung besar tersebut banyak dibangun embung-embung di desa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi petani.

Sementara itu, Kabupaten Rembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan Solo dan Jratun Seluna. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah di Kabupaten Rembang di sekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah sungai Jratun Seluna. Terdapat beberapa sungai besar di WS Jratun Seluna, meliputi : sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan.

Berdasarkan data dari Balai PSDA Seluna, seluruhnya terdapat 26 sungai yang termasuk dalam WS Jratun Seluna selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini. Kondisi debit sungai di Kabupaten Rembang hampir semuanya mengering di saat musim kemarau dan terjadi banjir apabila musim penghujan. Hal tersebut disebabkan pendayagunaan sumber daya air permukaan belum dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sungai terbentur pada belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Tabel 2.2.
Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang

No	Nama DAS	Luas DAS (km ²)	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Nama Wilayah Sungai	Lokasi Muara	Lokasi Hulu
1	DAS Wangon	52,10	S.Wangon	18,64	Jratunseluna	Ds.Bajingjowo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Sarang) Rembang
2	DAS Belitung/Ngepang	100,30	S.Ngepang	25,83	Jratunseluna	Ds.Sendangmulyo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Sedan,Sarang) Rembang
3	DAS Kesambi	60,94	S.Ceper	24,53	Jratunseluna	Ds.Sendangmulyo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	G.Lasem
4	DAS Kidul	29,30	S.Kidul	11,66	Jratunseluna	Ds.Tegalmulyo, Kec.Kragan, Kab.Rembang	G.Lasem
5	DAS Kresak	11,65	S.Kresak	8,13	Jratunseluna	Ds.Woro, Kec.Kragan, Kab.Rembang	G.Lasem
6	DAS Kepel	8,39	S.Kepel	7,54	Jratunseluna	Ds.Labuhan Kidul, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
7	DAS Randualas	3,18	S.Randualas	3,10	Jratunseluna	Ds.Sendangmulyo, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
8	DAS Grasak	2,92	S.Grasak	3,38	Jratunseluna	Ds.Blimbing, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
9	DAS Sanduk	2,75	S.Sanduk	4,58	Jratunseluna	Ds.Mangar, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
10	DAS Dalananyar	1,95	S.Dalananyar	5,28	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	Rakitan Sluke Rembang
11	DAS Jatisari	1,14	S.Jatisari	2,85	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
12	DAS Banu	1,60	S.Banu	3,38	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
13	DAS Kladen	14,19	S.Klaten	6,71	Jratunseluna	Ds.Sluke, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
14	DAS Bonang / Nyamplung	5,85	S.Malang	5,43	Jratunseluna	Ds.Trahan, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
15	DAS Dukoh	6,16	S.Leran	5,90	Jratunseluna	Ds.Leran, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
16	DAS Bonang	6,17	S.Bonang	7,22	Jratunseluna	Ds.Bonang, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem
17	DAS Keris	23,80	S.Tasiksono	16,47	Jratunseluna	Ds.Tasiksono, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem
18	DAS Lasem	229,85	S.Lasem	39,09	Jratunseluna	Ds.Gedungmulyo, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem & Peg.Kapur Utara (Bulu,Gunem.Sale) Rembang
19	DAS Kiringan	15,94	S.Kiringan	7,76	Jratunseluna	Ds.Kasreman, Kec.Lasem,	Ketangi, Pamotan,

No	Nama DAS	Luas	Nama Sungai	Panjang	Nama Wilayah	Lokasi Muara	Lokasi Hulu
						Kab.Rembang	Rembang
20	DAS Jambangan	17,30	S.Jambangan	7,49	Jratunseluna	Ds.Tritunggal, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Kerep, Sulang, Rembang
21	DAS Panggang	12,49	S.Panggang	7,90	Jratunseluna	Ds.Tireman, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Kerep, Sulang, Rembang
22	DAS Sambung	10,61	S.Sambung	5,42	Jratunseluna	Ds.Kabongan Lor, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Turusgede, Rembang
23	DAS Karanggeng	134,14	S.Karanggeng	48,17	Jratunseluna	Ds.Tanjungsari, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Bulu) Kab.Rembang
24	DAS Babadan	57,04	S.Pujon	17,87	Jratunseluna	Ds.Bogoharjo, Kec.Kaliori, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Bulu)
25	DAS Anyar	37,20	S.Pang	11,50	Jratunseluna	Ds.Tasikharjo, Kec.Kaliori, Kab.Rembang	Bogorejo, Sumber, Rembang
26	DAS Randugunting	136,67	S.Randugunting	47,37	Jratunseluna	Ds.Tunggulsari, Kec.Kaliori, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Japah) Kab.Blora

Sumber : Balai PSDA Seluna, 2018

2) Air Bawah Tanah

Air bawah tanah di Kabupaten Rembang berada di lokasi Akuifer, dimana akuifer adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisi alaminya. Akuifer yang ada di Kabupaten Rembang meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka.

Tabel 2.3
Hidrogeologi Kabupaten Rembang

No	Jenis Akuifer	Lokasi
1	Akuifer dangkal dengan produktivitas sedang	Sebagian besar di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Sedan
2	Akuifer dg produktivitas tinggi	Sebagian kecil di Kecamatan Sale
3	Akuifer dg produktivitas sedang	Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Pamotan
5	Akuifer produktif terdapat setempat	Sebagian besar di Kecamatan Sluke, Kragan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem
6	Akuifer dg produktivitas kecil	Sebagian besar di Kecamatan Sumber, Sulang, Rembang. Sebagian kecil di Kaliori, Pamotan, Gunem, Bulu, Sale, Pamotan, Pancur, Sedan, Kragan, Sarang
7	Daerah air tanah langka	Sebagian kecil di Kecamatan Sarang

Sumber : Kabupaten Rembang yang diolah, Tahun 2018

Kedalaman air tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar berada pada lebih dari 90 cm. Sedangkan untuk kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan cukup bervariasi yaitu berada pada 30 – 60 cm dan 60 – 90 cm. Potensi sumber air tanah di Kabupaten Rembang bila diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan. Di Kabupaten Rembang, terdapat banyak sumber-sumber mata air. Beberapa sumber air tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang
Tahun 2018

No.	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Debit (lt/detik)	Penggunaan	Keterangan
		Desa	Kecamatan			
1.	Brubul	Pamotan	Pamotan	5	Irigasi	Berfungsi
2.	Mudal	Pamotan	Pamotan	80	Air minum dan irigasi	50 lt/dtk PDAM & 20 lt/dtk irigasi
3.	Klongko	Bangunrejo	Pamotan	8	Irigasi	Berfungsi
4.	Pragen	Pragen	Pamotan	12	Irigasi	Kering saat kemarau
5.	Dowan	Dowan	Gunem	12	Irigasi	Kering saat kemarau
6.	Nglondro	Suntri	Gunem	11	Irigasi	Berfungsi
7.	Kajar	Kajar	Gunem	6	Air minum	Berfungsi
8.	Suruhan	Trembers	Gunem	8	Irigasi	Berfungsi
9.	Taban	Sidomulyo	Gunem	6	Irigasi	Kering saat kemarau
10.	Pasucen	Pasucen	Gunem	7	Irigasi	Kering saat kemarau
11.	Soco	SendangMulyo	Gunem	7	Air minum	Berfungsi
12.	Pacing	Pacing	Sedan	6	Irigasi	Berfungsi
13.	Kedunglingi	Lemah Putih	Sedan	10	Air minum	Berfungsi
14.	Bendo	Bendo	Sluke	15	Air minum	Kering saat kemarau
15.	Bulan	Sanetan	Sluke	7	Irigasi	Kering saat kemarau
16.	Gebang	Labuhan	Sluke	25	Irigasi	Kering saat kemarau
17.	Mrican	Bendo	Sluke	6	Irigasi	Kering saat kemarau
18.	Macan	Bendo	Sluke	6	Irigasi	Kering saat kemarau
19.	Dur Sumber	Bendo	Sluke	7	Air minum	Kering saat kemarau
20.	Semen	Gading	Sale	557	Air minum & irigasi	80 lt/dtk PDAM & 477 lt/dtk irigasi
21.	Brubulan	Tahunan	Sale	150	Irigasi	Berfungsi
22.	Kemloko Kerep	Tengger	Sale	20	Irigasi	Berfungsi
23.	Watu Lawang	Woro	Kragan	5	Irigasi	Kering saat kemarau
24.	Rambut Bntung	Tawangrejo	Sarang	5	Irigasi	Berfungsi
25.	Kajar	Kajar	Salem	9	Irigasi	Berfungsi
26.	Kajar	Pasedan	Bulu	30	Air minum	Berfungsi
27.	Dong Bulu	Pasedan	Bulu	10	Air minum	Berfungsi
28.	Kalisodo	Pasedan	Bulu	9	Irigasi	Kering saat kemarau
29.	Gondang	Pasedan	Bulu	15	Irigasi	Kering saat kemarau
30.	Taban	Bulu	Bulu	8	Irigasi	Kering saat kemarau
31.	Gayam	Bulu	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
32.	Mudal	Bulu	Bulu	20	Irigasi	Kering saat kemarau
33.	Ngluncan	Bulu	Bulu	5	Irigasi	Kering saat kemarau
34.	Kebon	Mantingan	Bulu	10	Air minum	Berfungsi
35.	Dawe	Mantingan	Bulu	6	Irigasi	Kering saat kemarau
36.	Dokoh	Mantingan	Bulu	5	Irigasi	Kering saat kemarau
37.	Milikerep	Kadiwono	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
38.	Tlogo	Karangasem	Bulu	15	Irigasi	Berfungsi
39.	Gupit	Cabean	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
40.	Senok	Mlatirejo	Bulu	12	Irigasi	Kering saat kemarau
41.	Candra	Pinggan	Bulu	8	Irigasi	Kering saat kemarau
42.	Cadang	Pinggan	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
43.	Pinggan	Pinggan	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
44.	Belik Kembar	Sidowayah	Pancur	5	Air minum	Berfungsi
45.	Ngroto	Ngroto	Pancur	7	Air minum	Berfungsi
46.	Druju	Joho Gunung	Pancur	15	Irigasi	Berfungsi
47.	Soco	Kalitengah	Pancur	10	Irigasi	Kering saat kemarau
48.	Kedung Ruah	Warugunung	Pancur	7	Irigasi	Kering saat kemarau
49.	Sumber Agung	Sumberagung	Pancur	5	-	Belum dimanfaatkan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018

d. Klimatologi

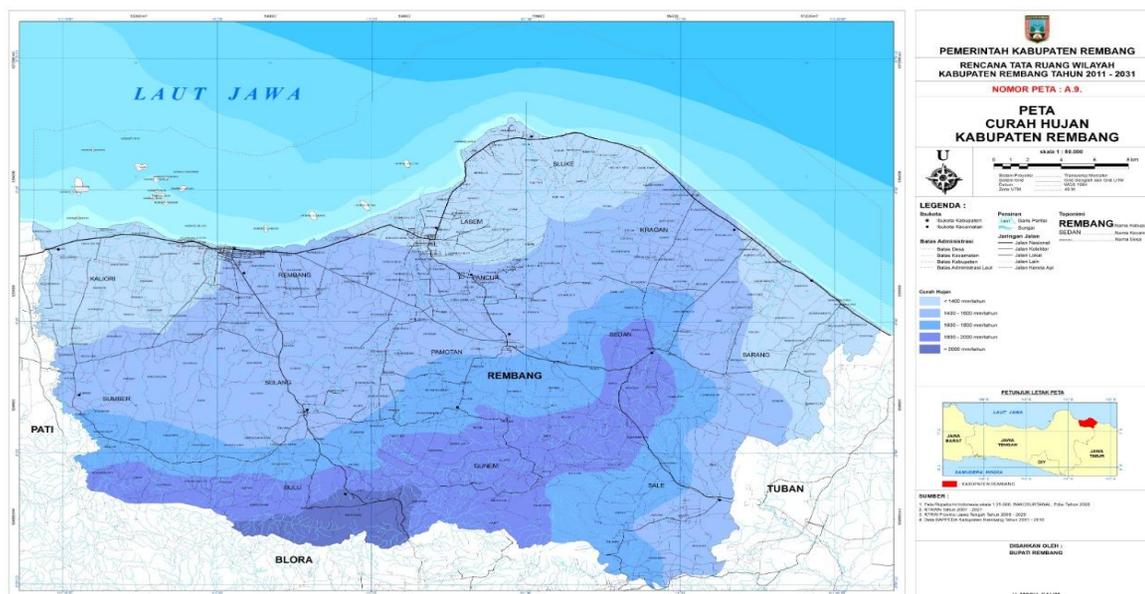
Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 34°C, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27-34°C. di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 550,57 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi

terjadi bulan Februari Tahun 2018 yaitu sebanyak 115,6 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus 0.19 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut.

Tabel 2.5
Curah Hujan Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Data Curah Hujan (mm/hr)											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sumber	5.55	10.86	7.03	2.37	2.77	0	0	0	0	0	1.9	3.32
2	Bulu	5.65	8.32	9.65	3.43	1.52	0.13	0.13	0.19	0.6	0.13	5.17	11.84
3	Gunem	5.81	9.61	7.52	2.47	1.65	0.13	0	0	0.1	0.39	3.4	8.61
4	Sale	4.48	11.68	8.45	3.33	2.42	0.6	0	0	0.63	0.29	6.53	7.94
5	Sarang	3.06	7	4.68	1	0.81	0.97	0	0	0	0	2.53	10.94
6	Sedan	6.87	6.5	4.58	2.4	0.81	0.97	0	0	0.47	0	5.03	8.39
7	Pamotan	9.16	11.46	5.97	2.57	1.26	1.57	0	0	0.53	0.48	4.83	8.84
8	Sulang	7.1	10.14	8.1	4.63	3.65	0.3	0	0	0.27	0.06	6.5	6.71
9	Kaliori	9.1	5.32	2.77	5.07	2.26	0	0	0	2.77	0	3.3	3.61
10	Rembang	6.74	8.07	6.1	1.6	0.77	0.4	0	0	0	0	6.97	4.71
11	Pancur	5.81	5.64	4.45	3.03	0.84	1.07	0	0	0	0.97	4.03	8.71
12	Kragan	4.16	5.39	4.74	2.13	1.13	0.37	0.32	0	1.17	0.52	4.47	5.61
13	Sluke	2.71	7.18	11.94	1.77	1.32	0.4	0	0	0	0	5.4	10.61
14	Lasem	7.74	8.43	5.77	4.47	2	1.07	0	0	0.27	1.45	7.53	8.65
Jumlah		83.94	115.60	91.75	40.27	23.21	7.98	0.45	0.19	6.81	4.29	67.59	108.49

Sumber : BPS tahun 2018



Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

e. Penggunaan Lahan

Berdasarkan tata guna lahan, Kabupaten Rembang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.020 hektar (28,62%), lahan bukan sawah sebesar 53.156 hektar (52,42%) dan lahan bukan pertanian sebesar 19.232 hektar (18,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %.

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.5
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diutamakan dapat memberdayakan masyarakat lokal, berbasis potensi lokal serta difokuskan pada industri serta usaha yang berbasis desa. Selain itu peningkatan minat dan iklim investasi di Kabupaten Rembang juga diperlukan untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang pada Tahun 2011-2031 ditujukan untuk mewujudkan kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Perumusan tujuan tersebut tidak lepas dari karakteristik wilayah Kabupaten Rembang yang mempunyai panjang pantai sekitar 63 km. Di samping itu Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur juga merupakan pintu gerbang yang diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian Jawa Tengah bagian timur.

Untuk mewujudkan visi RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Rembang tidak lepas dari alokasi rencana pola ruang dalam RTRW. Rencana pola ruang dijabarkan dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang itu merupakan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

a. Struktur Ruang Wilayah

Perwujudan struktur ruang wilayah meliputi pusat-pusat pelayanan serta jaringan pendukung wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Rembang ditetapkan di kawasan perkotaan Rembang. Selain PKL, Kabupaten Rembang juga mempunyai tiga Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang kedepan diharapkan dapat melayani kegiatan setara dengan Pusat Kegiatan Lokal. Tiga kawasan perkotaan

yang ditetapkan menjadi PKLp adalah kawasan perkotaan Lasem, Kawasan perkotaan Kragan dan Kawasan perkotaan Pamotan. Keberadaan PKLp tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Rembang sehingga pemerataan pembangunan dapat diwujudkan.

Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Kawasan Budidaya mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan kawasan budidaya tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 19.656 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berlokasi di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. Sementara itu kawasan hutan produksi tetap berlokasi di Kecamatan Kaliiori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Pengelolaan kawasan hutan produksi ini terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo.

2) Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Rembang terdapat kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 8.837 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.

3) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha dan lahan kering seluas kurang lebih 39.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Untuk menjamin kedaulatan pangan maka seluas kurang lebih 37.339 Ha ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Untuk meningkatkan kemandirian sektor pertanian ditetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan agropolitan.

4) Kawasan peruntukan perikanan

Kondisi Rembang yang berada di pesisir pantai menyebabkan sektor perikanan dan kelautan begitu berkembang pesat. Kawasan peruntukan perikanan sendiri terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap,

kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Sejak tahun 2014 kewenangan kawasan perikanan tangkap tersebut ada pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha berada di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang. Untuk menjamin pemasaran dan pengolahan ikan dibangun 13 buah tempat pelelangan ikan yang tersebar di 6 kecamatan pesisir selain itu dibangun juga unit pembenihan rakyat dan balai benih ikan di Kecamatan Pamotan.

5) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertambangan minerba dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628 Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pospat, ball clay, dolomite, gypsum, kalsit, batu gamping, tras, tanah liat, andesit, batubara dan lignit yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang.

6) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dan Kecamatan Gunem.

Peruntukan industri menengah berada di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha, industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten, kawasan peruntukan agroindustri, kawasan peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang dengan potensi industri mebel, industri batik, industri kuningan, industri bordir, industri gula tumbu, industri genteng dan batu bata, industri garam, olahan perikanan, peternakan, industri mangga, industri galangan kapal dan industri kecil kawis.

7) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terbagi menjadi pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya dan pengembangan wisata buatan manusia. Potensi wisata alam ada di Pantai Pasir Putih Tasikharjo, Pulau Gede dan Pulau Marongan, Pantai Soka, Wisata Alam Kajar, Watu Layar, Pantai Caruban Gedongmulyo, Wanawisata Mantingan, Embung Lodan, Embung Banyu Kuwung dan Embung Kaliombo, Gua Pasucen dan Embung Panohan, Embung Trenggulun dan Taman Wisata Alam Sumber Semen. Potensi wisata budaya meliputi bangunan pusaka tersebar di Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sluke, kecamatan Bulu dan Kecamatan Kragan. Potensi wisata buatan ada di Kecamatan Remabng, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sulang.

8) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan

kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang.

9) Kawasan peruntukan budidaya lainnya

Kawasan peruntukan budidaya lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan bumi perkemahan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer di Kecamatan Rembang, Polisi Resort di Kecamatan Rembang, Pos Angkatan Laut Rembang, Koramil dan Polsek yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Kawasan bumi perkemahan seluas kurang lebih 20 Ha adalah Bumi Perkemahan Karangsari Park di Kecamatan Sulang.

c. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Rembang terbagi dalam kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Pengembangan kawasan lindung tersebut diarahkan untuk mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir dan mengembangkan ekowisata.

1) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan seluas kurang lebih 2.451 Ha berada di Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Sluke.

2) Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air seluas kurang lebih 11.314 Ha berada di Kecamatan Lasem, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan dan Kecamatan Pancur.

3) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar waduk/embung/bendung, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar sempadan jalan dan kawasan RTH. Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 649 Ha berada di kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi seluas kurang lebih 9.888 Ha terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung berada di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Pamotan. Kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan jalan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Kawasan RTH direncanakan seluas kurang lebih 2.720 Ha yang luasnya 32% dari luas perkotaan. Kawasan RTH berupa RTH publik dan RTH Privat. RTH Publik berupa hutan kota, taman kota, jalur hijau jalan dan sungai, tempat pemakaman umum. RTH privat berupa kebun atau pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas kurang lebih 392 Ha berupa cagar alam Gunung Butak Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale seluas sebesar kurang lebih 45 Ha, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan suaka alam laut dan

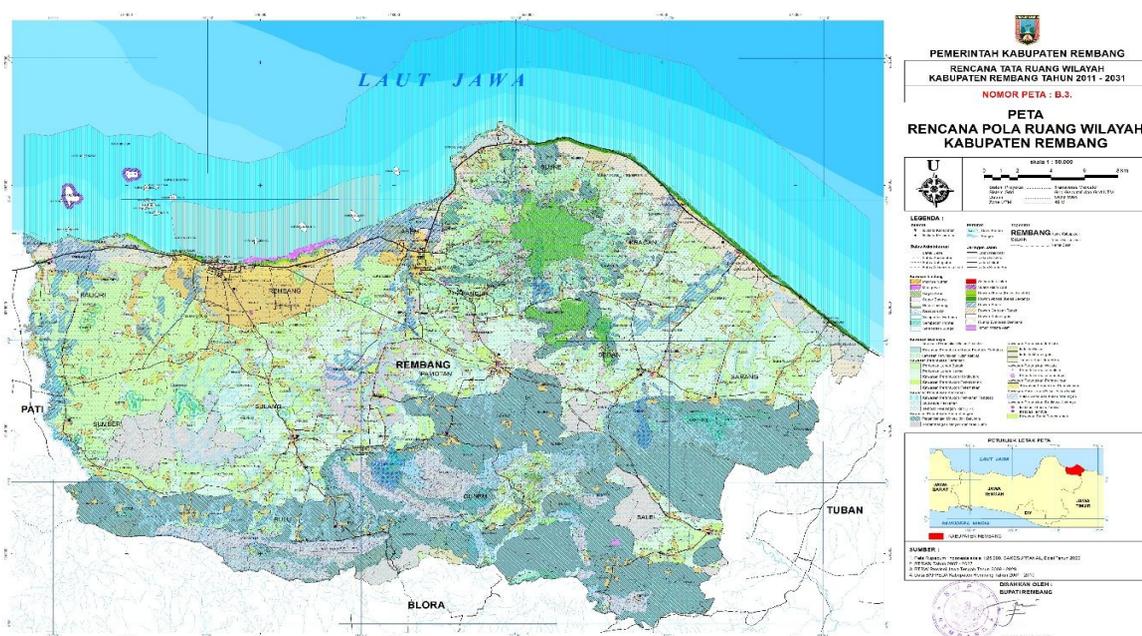
perairan lainnya dan kawasan hutan bakau. Taman wisata alam seluas kurang lebih 17 Ha berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan puasak ayang tersebar di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kragan. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya berupa kawasan perairan Pulau Gede dan kawasan perairan Pulau Marongan. Kawasan hutan bakau berada di Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha, Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha dan Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha.

5) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi berupa kawasan imbunan air berada di Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem dan Cekungan Pati – Rembang.

6) Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa perlindungan plasma-nutfah berupa terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha.



Gambar 2.6
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

7) Kawasan Strategis Kabupaten

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
 - a) Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
 - b) Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan

Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.

- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.
- 3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

d. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala lingkungan yang diwujudkan dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat pelayanan lingkungan tersebut meliputi PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang, PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang, PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang, PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber, PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber, PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber, PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu, PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem, PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur, PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan, PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan, PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale, PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, PPL Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan, PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan, PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang dan PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.

Dalam upaya pembangunan pedesaan, sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Rembang dipandang telah berhasil dalam memfasilitasi program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki 3 pengembangan kawasan pedesaanyaitu Kawasan Pedesaan Alas Samudro Welo, Kawasan Simoturun, dan Kawasan Kanung Argosoko. Pengembangan kawasan tersebut membutuhkan keterpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dalam bentuk menggali potensi sumberdaya baik manusia maupun alam sehingga muncul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Alas Samudro Welo merupakan implementasi dari pengembangan kawasan pesisir, yang terdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan Lasem, mengembangkan kawasan pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi mangrove dan potensi lainnya.

Kawasan Simoturun merupakan implementasi dari pengembangan kawasan wisata spiritual, yang terletak di kecamatan Bulu. Kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa desa yaitu Desa Lambangan Wetan, Desa Sumber Mulyo, Desa Karangasem, Desa Pasedan. Desa-desa tersebut telah bersepakat mengelola secara bersama dengan membentuk Bumdes bersama “kapalas”.

Kawasan Kanung Argosoko merupakan implementasi dari pengembangan kawasan wisata alam pegunungan Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur. Diantaranya adalah Desa Gowak, Desa Kajar, Desa Sendangcoyo, Desa Warugunung, Desa Criwik, Desa Banyuurip, dan Desa Johoagung. Potensi yang dimiliki kawasan tersebut adalah keindahan pemandangan alam di pegunungan Lasem dan aneka ragam kebun buah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi : kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor / gerakan tanah, kawasan rawan gelombang tinggi / abrasi dan kawasan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

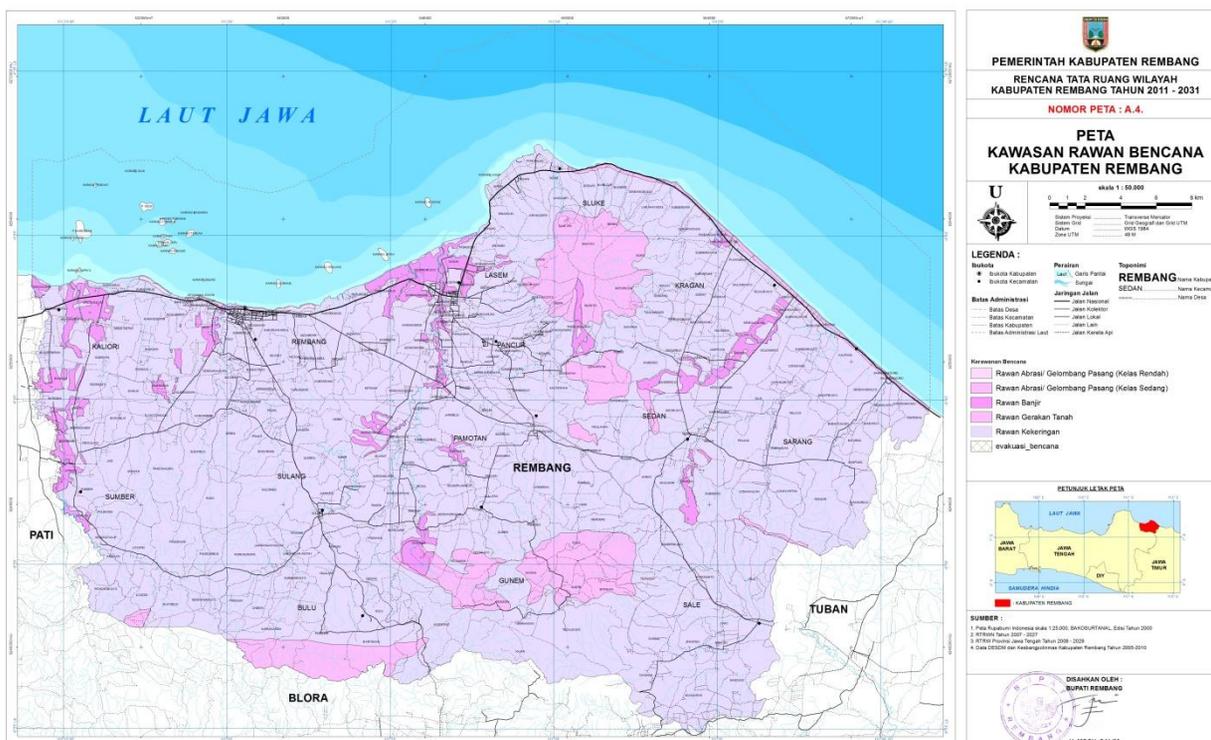
Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter yaitu : (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4) kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan. Berdasarkan gabungan parameter diatas, Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliori, Rembang dan Lasem.

b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Kabupaten Rembang mempunyai morfologi dataran rendah di sepanjang pantai utara dengan kelerengan berkisar 00–40. Selain itu morfologi bergelombang lemah sampai kuat yang ada di daerah Kabupaten Rembang bagian selatan sampai perbatasan dengan Kabupaten Blora, kelerengan berkisar 100–600. Bagian timur laut daerah Rembang terdapat pola topografi melingkar sudut lereng berkisar antara 150–600 yang termasuk dalam wilayah Gunung Lasem. Dari morfologi tersebut, lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan.

c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Ketiga kecamatan tersebut mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Wilayah terdampak abrasi terparah ada di seluruh pesisir Kecamatan Sarang dan pesisir Kecamatan Kragan mulai dari Desa Tegalmulyo hingga Desa Karangharjo. Abrasi ini termasuk abrasi berat, yang berarti : dapat menghilangkan daratan hingga beberapa meter per tahun. Abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah barat yaitu Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir barat Kabupaten Rembang tergolong dalam abrasi ringan. Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru beberapa titik yang mendapatkan penanganan yaitu di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Kragan.



Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

2.1.4. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Rembang menurut data Dindikcapil Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2016	2017	2018	2010-2018	
No.	1	2	3	4	5	6
1	Sumber	33 695	34 917	35 014	36338	7,8
2	Bulu	25 731	26 650	26 723	27848	8,2
3	Gunem	22 833	23 948	24 041	23876	4,6
4	Sale	35 902	37 695	37 844	39127	9,0
5	Sarang	60 370	64 407	64 765	60658	0,5
6	Sedan	51 362	54 122	54 359	53556	4,3
7	Pamotan	44 105	45 775	45 908	48788	10,6
8	Sulang	36 914	38 800	38 958	38 737	4,9
9	Kaliori	38 776	40 797	40 969	41726	7,6
10	Rembang	84 381	90 274	90 800	89159	5,7
11	Pancur	27 471	29 098	29 240	30134	9,7
12	Kragan	58 523	62 380	62 721	63880	9,2
13	Sluke	26 721	27 953	28 057	29558	10,6
14	Lasem	47 123	49 320	49 502	50044	6,2
	Rembang	593 907	626 136	628 901	633429	6,6

Sumber : Dindikcapil Kab.Rembang, Tahun 2018

Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kelamin beserta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut:

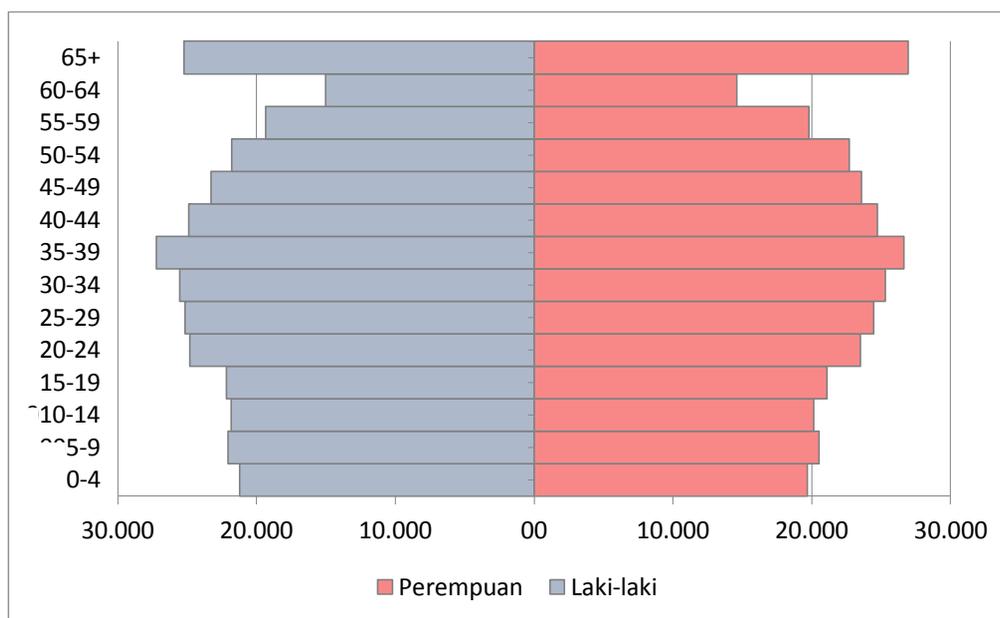
Tabel 2.8
Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1.	Sumber	18.116	49,85	18.222	50,15	36.338	99,42
2.	Bulu	14.086	50,58	13.762	49,42	27.848	102,35
3.	Gunem	12.125	50,78	11.751	49,22	23.876	103,18
4.	Sale	19.762	50,51	19.365	49,49	39.127	102,05
5.	Sarang	30.987	51,08	29.671	48,92	60.658	104,44
6.	Sedan	27.401	51,16	26.155	48,84	53.556	104,76
7.	Pamotan	24.783	50,80	24.005	49,20	48.788	103,24
8.	Sulang	19.472	50,27	19.265	49,73	38.737	101,07
9.	Kaliori	20.812	49,88	20.914	50,12	41.726	99,51
10.	Rembang	44.347	49,74	44.812	50,26	89.159	98,96
11.	Pancur	15.258	50,63	14.876	49,37	30.134	102,57
12.	Kragan	32.346	50,64	31.534	49,36	63.880	102,57
13.	Sluke	14.953	50,59	14.605	49,41	29.558	102,38
14.	Lasem	25.212	50,38	24.832	49,62	50.044	101,53
Jumlah		319.660	50,47	313.769	49,53	633.429	101,88
2017		313.375	49,83	315.526	50,17	628.901	99,32
2016		312.057	49,84	314.079	50,16	626.136	99,36
2015		309.564	49,84	311.570	50,16	621.134	99,36
2014		307.004	49,77	309.897	50,23	616.901	99,07
2013		304.768	49,84	306.727	50,16	611.495	99,36

Sumber : Dindukcapil Kab.Rembang, tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018 sebanyak 633.429 jiwa terdiri atas 319.660 jiwa (50,47%) penduduk laki-laki dan 313.769 jiwa (49,53%) penduduk perempuan. Perbedaan jumlah penduduk di tiap kecamatan dipengaruhi lingkungan sosial dan fasilitas yang tersedia. Adanya perbedaan fasilitas di tiap kecamatan menyebabkan persebaran penduduk yang berbeda, dimana banyaknya fasilitas yang tersedia akan menarik lebih banyak penduduk. Kebanyakan orang lebih menyukai tempat yang ramai dekat dengan pusat keramaian, dimana tempat tersebut memiliki peluang usaha yang lebih besar. Sehingga orang-orang lebih memilih tinggal di pusat-pusat keramaian dengan fasilitas yang lebih banyak daripada di area pedesaan.

Sementara itu besarnya sex rasio tahun 2018 adalah 101,88%, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama untuk menyelesaikan pembangunan. Partisipasi aktif keduanya dalam proses pembangunan sangatlah penting demi tercapainya program pembangunan. Kurang berperannya salah satu pihak akan menghambat salah satu pihak, bahkan lebih dari itu akan menjadi beban pembangunan. Namun, dalam kenyataannya perempuan belum banyak mengambil peran dalam proses pembangunan dibandingkan dengan laki-laki.



Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2018

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2018 terbanyak pada umur 35-39 sebesar 53.872 jiwa yaitu 27.239 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.633 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 455.733 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 52.207 jiwa yaitu usia 0-14 sebesar 125.489 jiwa. Apabila di dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 38,99 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 39 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2-3 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi lebih dari dua kali lipat disebut dengan bonus demografi. Adanya bonus demografi ini dapat memberikan manfaat bagi daerah, karena dengan lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Akan tetapi hal ini dapat terpenuhi dengan salah satu syarat, yaitu masyarakat yang berkualitas. Apabila kualitas masyarakat rendah, maka hal ini malah bisa membalik keadaan dan menghambat proses pembangunan daerah.

Sementara itu, pada piramida penduduk dapat dilihat bahwa populasi lanjut usia semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Pemerintah harus merumuskan pelayanan kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan mutu kehidupan demi mencapai masa tua yang bahagia dan berdayaguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan kelompok usia lanjut pemerintah mencanangkan pelayanan dalam wujud posyandu lansia.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2017 mencapai 620 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.544 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bulu sebesar 261 jiwa/ km². Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang
Tahun 2017

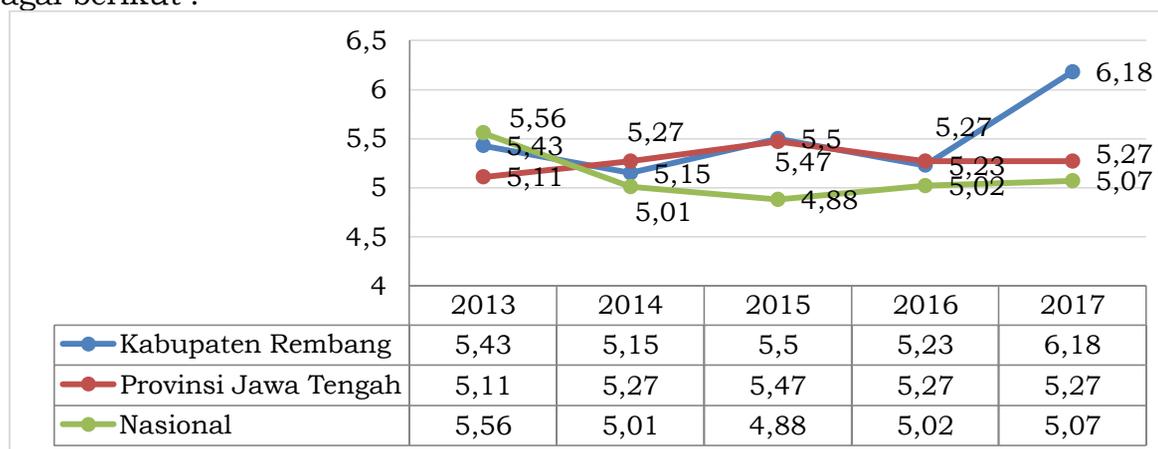
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sumber	7.673	35.014	456
2.	Bulu	10.240	26.723	261
3.	Gunem	8.020	24.041	300
4.	Sale	10.714	37.844	353
5.	Sarang	9.133	64.765	709
6.	Sedan	7.964	54.359	683
7.	Pamotan	8.156	45.908	563
8.	Sulang	8.454	38.958	461
9.	Kaliori	6.150	40.969	666
10.	Rembang	5.881	90.800	1.544
11.	Pancur	4.594	29.240	636
12.	Kragan	6.166	62.721	1.017
13.	Sluke	3.759	28.057	746
14.	Lasem	4.504	49.502	1.099
JUMLAH		101.408	628.901	620
2016		101.408	626.136	617
2015		101.408	621.134	613
2014		101.408	616.901	608
2013		101.408	611.495	603

Sumber: RembRembang Dalam Angka, Tahun 2018

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2 sebagai berikut :



Grafik 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

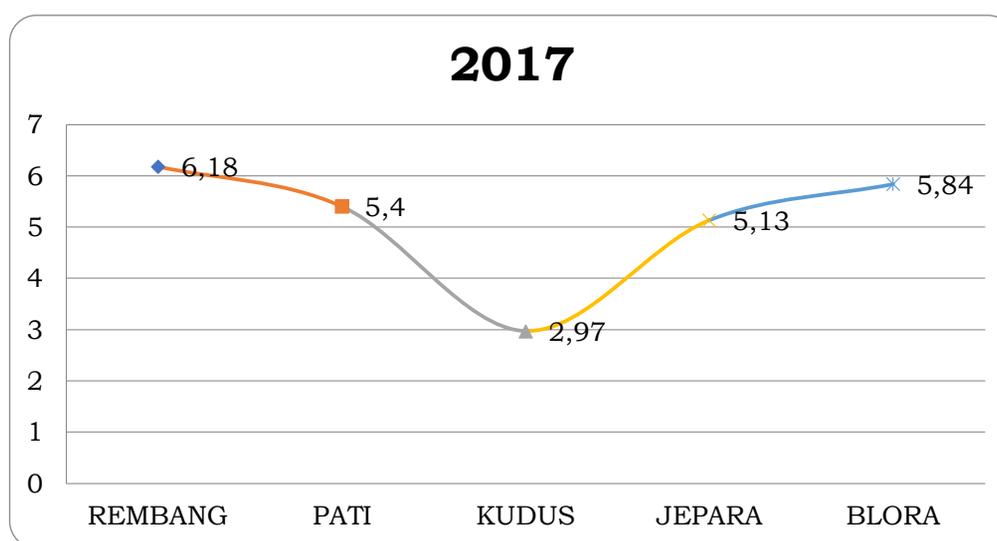
Sumber: BPS, 2018

Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah eks karisidenan Pati tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut:

Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar
Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2017 (%)

NO.	KABUPATEN	PERTUMBUHAN EKONOMI (TAHUN)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	REMBANG	5,43	5,15	5,5	5,22	6,18
2.	PATI	5,97	4,64	6,01	5,46	5,4
3.	KUDUS	4,36	4,43	3,88	2,52	2,97
4.	JEPARA	5,39	4,81	5,1	5,02	5,13
5.	BLORA	5,36	4,39	5,36	5,74	5,84

Sumber : BPS, 2018



Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar
Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%)

Sumber: BPS 2018

Berdasarkan grafik 2. 3 dilihat bahwa persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih tinggi daripada angka Provinsi Jawa Tengah bahkan Nasional pada tahun 2017. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang berada pada angka 5,43%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,11%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,56%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 6,18% masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,27% dan dan Nasional sebesar 5,07%. Sepanjang tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi terbaik Kabupaten Rembang terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,18%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2017 menunjukkan trend yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,18% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,15 %. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih baik atau tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di wilayah Eks Karesidenan Pati. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama tahun 2013 - 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (%)

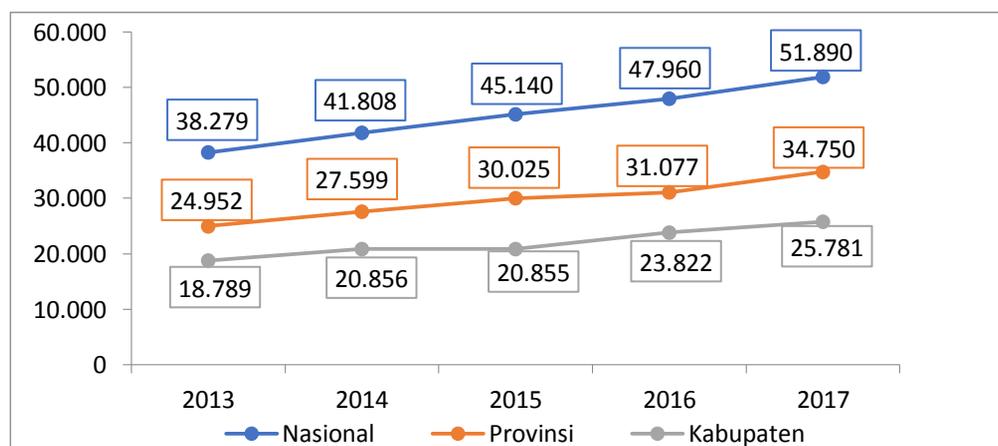
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,22	(5,62)	4,16	1,63	3,87
B.	Pertambangan dan penggalian	5,58	6,51	4,03	6,30	20,84
C.	Industri pengolahan	9,88	15,20	7,66	7,86	6,34
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,20	5,30	2,59	6,77	7,07
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	(0,19)	1,98	1,71	2,98	3,71
F.	Konstruksi	(4,40)	14,65	6,18	7,46	7,52
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor	3,14	4,05	4,11	5,28	6,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,54	10,55	6,78	5,44	6,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	11,18	6,13	5,63	6,10
J.	Informasi dan Komunikasi	10,09	17,16	7,27	7,81	8,64
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	5,63	6,22	4,46	6,77	4,21
L.	Real Estate	4,70	6,38	6,18	5,78	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	16,68	7,15	8,84	9,92	8,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	0,67	4,87	2,78	3,81
P.	Jasa Pendidikan	15,97	14,86	6,81	7,51	7,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	14,97	9,75	9,83	8,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,86	9,38	4,07	8,30	8,36
	PDRB	5,43	5,15	5,50	5,23	6,18

Sumber: BPS, 2018

Salah satu kontribusi lapangan usaha yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara signifikan adalah berdasarkan PDRB ADHK, dimana penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian karena telah dilakukan penertiban dan pemberlakuan regulasi yang ada. Berdasarkan data di atas, pertumbuhan lapangan usaha yang paling lambat adalah pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 3,71. Sehingga perlu dilakukan penegakan regulasi yang lebih jelas dan ketat pada sektor tersebut.

2.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah. Gambaran PDRB tahun 2013-2017 dapat dilihat pada data-data di bawah ini:



Grafik 2.4
Perkembangan PDRB Per-Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (000 Rupiah)

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018, diolah.

Pada tinjauan makro sektoral perekonomian suatu daerah dapat berstruktur agraris industri atau jasa. Hal ini tergantung pada sektor apa yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui makro sektoral yang mendukung di Kabupaten rembang, dapat dilihat dalam bentuk PDRB ADHK dan ADHB berikut :

Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, & Perikanan	3.819.980,24	33,39	3.875.370,82	30,23	4.168.479,14	29,99	4.295.225,24	28,89	4.517.460,32	27,86
B.	Pertambangan & Penggalian	328.421,39	2,87	392.183,09	3,06	433.924,07	3,12	466.388,29	3,14	653.111,67	4,03
C.	Industri Pengolahan	2.154.137,65	18,83	2.669.575,63	20,82	2.939.112,10	21,15	3.226.027,16	21,70	3.486.156,08	21,50
D.	Pengadaan Listrik & Gas	8.238,59	0,07	8.767,36	0,07	9.110,24	0,07	10.351,25	0,07	11.938,14	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	5.623,45	0,05	5.899,50	0,05	6.188,70	0,04	6.412,17	0,04	6.684,05	0,04
F.	Konstruksi	773.793,17	6,76	954.913,45	7,45	1.029.561,92	7,41	1.115.264,32	7,50	1.224.790,03	7,55
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.537.605,99	13,44	1.668.565,36	13,01	1.775.107,00	12,77	1.912.222,96	12,86	2.091.451,69	12,90
H.	Transportasi & Pergudangan	381.769,32	3,34	449.554,14	3,51	499.050,45	3,59	526.759,92	3,54	601.088,05	3,71
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	330.003,77	2,88	389.323,28	3,04	427.554,85	3,08	454.579,75	3,06	491.263,48	3,03
J.	Informasi & Komunikasi	118.564,21	1,04	133.435,07	1,04	142.416,45	1,02	153.980,59	1,04	174.873,40	1,08
K.	Jasa Keuangan & Asuransi	480.379,60	4,20	544.091,27	4,24	586.425,16	4,22	640.708,20	4,31	695.637,09	4,29
L.	Real Estate	101.595,04	0,89	113.966,71	0,89	124.658,42	0,90	133.347,74	0,90	143.554,75	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	30.029,04	0,26	33.201,88	0,26	36.898,79	0,27	41.042,09	0,28	45.012,36	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	461.345,11	4,03	498.372,62	3,89	534.912,82	3,85	567.661,05	3,82	602.561,66	3,72
P.	Jasa Pendidikan	581.266,26	5,08	697.294,29	5,44	760.055,63	5,47	842.605,81	5,67	945.363,37	5,83
Q.	Jasa Kesehatan & Kegtan Sosial	124.397,59	1,09	149.195,02	1,16	169.145,79	1,22	186.707,03	1,26	206.924,67	1,28
R,S, T,U	Jasa Lainnya	203.952,64	1,78	238.006,15	1,86	255.215,06	1,84	287.792,16	1,94	316.154,80	1,95
PDRB ADHB		11.441.103,05	100	12.821.715,64	100	13.897.816,58	100	14.867.075,7	100	16.214.025,61	100

Sumber: BPS, 2018

Tabel 2.13
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang
Tahun 2013 - 2017

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3.171.162,16	32,42	2.992.910,68	29,10	3.117.527,80	28,73	3.168.229,36	27,75	3.290.989,85	27,15
B.	Pertambangan dan Penggalian	291.765,56	2,98	310.767,69	3,02	323.291,63	2,98	343.653,90	3,01	415.258,93	3,43
C.	Industri Pengolahan	1.860.445,88	19,02	2.143.284,16	20,84	2.307.391,43	21,27	2.488.767,34	21,80	2.646.597,21	21,83
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8.733,72	0,09	9.196,67	0,09	9.434,85	0,09	10.073,49	0,09	10.785,29	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.438,49	0,06	5.546,09	0,05	5.640,84	0,05	5.809,15	0,05	6.024,43	0,05
F.	Konstruksi	677.377,74	6,93	776.630,15	7,55	824.642,21	7,60	886.134,34	7,76	952.802,86	7,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.351.957,53	13,82	1.406.724,91	13,68	1.464.601,23	13,50	1.541.934,41	13,50	1.643.010,86	13,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	375.320,78	3,84	414.922,27	4,03	443.036,47	4,08	467.117,18	4,09	495.336,15	4,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	302.419,11	3,09	336.231,73	3,27	356.833,89	3,29	376.930,99	3,30	399.907,68	3,30
J.	Informasi dan Komunikasi	124.069,69	1,27	145.366,04	1,41	155.940,86	1,44	168.123,59	1,47	182.655,76	1,51
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	383.294,92	3,92	407.151,89	3,96	425.297,66	3,92	454.103,43	3,98	473.217,02	3,90
L.	Real Estate	99.192,48	1,01	105.520,70	1,03	112.044,16	1,03	118.520,31	1,04	124.500,64	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	26.308,16	0,27	28.188,71	0,27	30.679,79	0,28	33.723,93	0,30	36.484,32	0,30
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388.453,41	3,97	391.050,95	3,80	410.088,03	3,78	421.480,84	3,69	437.549,12	3,61
P.	Jasa Pendidikan	423.906,11	4,33	486.880,24	4,73	520.048,58	4,79	559.128,80	4,90	603.075,53	4,97
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.304,22	1,05	117.619,36	1,14	129.087,85	1,19	141.779,71	1,24	153.344,22	1,26
R,S,T, U	Jasa Lainnya	188.600,44	1,93	206.282,10	2,01	214.681,91	1,98	232.497,97	2,04	251.928,97	2,08
PDRB ADHK		9.780.750,39	100	10.284.274,36	100	10.850.269,20	100	11.418.008,73	100	12.123.468,84	100

Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang
Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure	7 976 937,08	69,72	8 782 543,17	68,50	9 731 003,28	70,02	10 422 089,98	70,10	11 400 996,63	70,32
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food and Beverages other than restaurants</i>	3 694 149,53	32,29	4 011 903,70	31,29	4 474 558,63	32,20	4 849 448,23	32,62	5 321 099,80	32,82
	b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and Footwear</i>	349 806,24	3,06	374 738,09	2,92	404 467,18	2,91	430 756,48	2,90	470 119,34	2,90
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment</i>	746 408,59	6,52	838 256,77	6,54	912 053,53	6,56	970 047,53	6,52	1 045 398,44	6,45
	d. Kesehatan dan Pendidikan/ <i>Health and Education</i>	464 430,26	4,06	510 279,06	3,98	555 647,95	4,00	597 851,27	4,02	642 851,04	3,96
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation, and Culture</i>	2 044 562,01	17,87	2 268 679,23	17,69	2 527 915,88	18,19	2 646 148,19	17,80	2 902 315,49	17,90
	f. Hotel dan Restoran/ <i>Restaurants and Hotels</i>	558 542,22	4,88	647 438,57	5,05	710 179,72	5,11	770 045,21	5,18	843 533,18	5,20
	g. Lainnya/ <i>Others</i>	119 038,23	1,04	131 247,75	1,02	146 180,37	1,05	157 793,07	1,06	175 679,34	1,08
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure	167 669,62	1,47	195 427,68	1,52	204 854,77	1,47	218 941,23	1,47	236 350,55	1,46

NO	JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		Rp	(%)								
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	1 106 461,25	9,67	1 230 266,31	9,60	1 323 420,73	9,52	1 432 360,72	9,63	1 536 667,59	9,48
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2 479 460,15	21,67	2 748 776,99	21,44	2 984 350,28	21,47	3 223 010,30	21,68	3 640 946,62	22,46
	a. Bangunan/ Building	2 067 005,16	18,07	2 298 364,91	17,93	2 517 412,29	18,11	2 729 620,71	18,36	3 111 940,65	19,19
	b. Non-Bangunan/ non - Building	412 454,99	3,61	450 412,08	3,51	466 937,98	3,36	493 389,58	3,32	529 005,97	3,26
5.	Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	548 460,78	4,79	401 740,39	3,13	258 955,60	1,86	205 541,38	1,38	448 179,68	2,76
6.	Ekspor/ Exports	3 829 463,49	33,47	3 805 798,57	29,68	3 695 773,39	26,59	3 953 277,64	26,59	4 468 618,27	27,56
7.	Impor/ Import	4 667 349,32	40,79	4 342 837,47	33,87	4 300 541,46	30,94	4 588 145,50	30,86	5 517 733,72	34,03
8.	Ekspor/ Exports	- 837 885,83	- 7,32	- 537 038,90	- 4,19	- 604 768,07	- 4,35	- 634 867,86	- 4,27	-1 049 115,45	- 6,47
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS	11.441.103,05	100,00	12.821.715,64	100,00	13.897.816,58	100,00	14.867.075,74	100,00	16 214 025,61	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, 2018

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten
Rembang Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013	2014	2015	2016*	2017**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure	6.642.628,16	6.902.847,24	7.312.754,27	7.676.837,48	8.144.561,06
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants	2.896.089,91	2.938.669,49	3.062.039,47	3.209.514,97	3.401.023,87
b. Pakaian & Alas Kaki/ Clothing and Footwear	335.495,20	351.015,63	374.756,49	393.847,64	416.048,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RumahTangga/Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment	639.668,41	676.291,70	725.175,01	758.865,65	786.493,23
d. Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education	423.655,55	440.504,46	468.381,86	490.507,18	510.488,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ Transport, Communication, Recreation, and Culture	1.760.664,40	1.867.955,37	2.005.869,55	2.108.131,08	2.257.913,94
f. Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels	480.884,45	514.184,65	552.377,44	585.497,97	631.946,94
g. Lainnya/ Others	106.170,24	114.225,93	124.154,46	130.473,00	140.646,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure	138.975,00	151.264,74	148.876,62	156.950,90	164.194,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	889.423,57	919.516,45	939.212,99	976.867,15	1.003.549,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2.125.245,17	2.214.727,19	2.345.804,58	2.492.673,90	2.713.089,96
a. Bangunan/ Building	1.753.847,91	1.851.411,46	1.977.562,72	2.118.666,85	2.329.871,63
b. Non-Bangunan/ non – Building	371.397,27	363.315,73	368.241,86	374.007,05	383.218,34
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	271.450,61	236.710,77	142.979,18	153.746,02	265.160,84
6. Ekspor/ Exports	3.520.023,81	3.369.200,05	3.523.138,39	3.640.589,73	3.861.435,11
7. Impor/ Import	3.806.995,92	3.509.992,07	3.562.496,83	3.679.656,44	4.028.522,49
8. Ekspor/ Exports	- 286.972,11	- 140.792,02	- 39.358,44	- 39.066,71	- 167.087,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS	9.780.750,39	10.284.274,36	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84
* Angka sementara					
** Angka sangat sementara					

Sumber : BPS, 2018

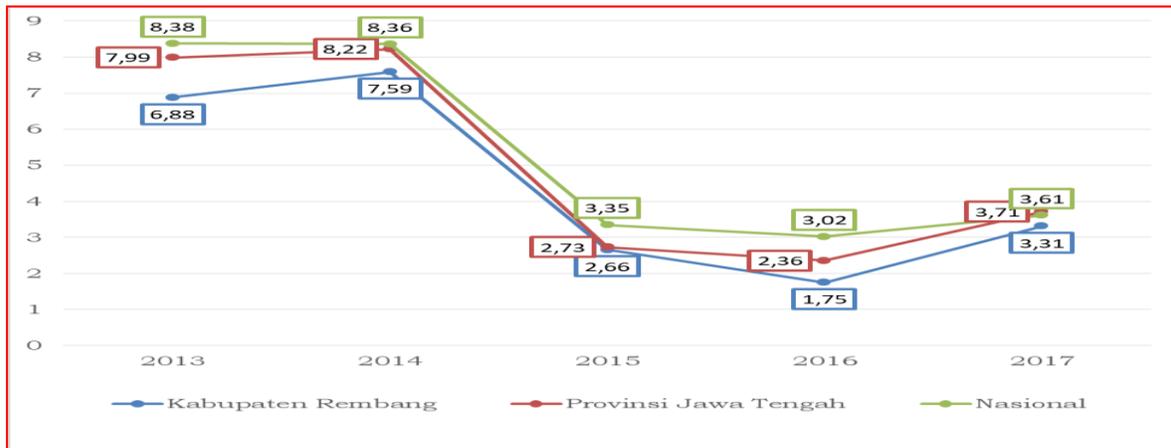
Berdasarkan tabel di atas, didapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai kontribusi PDRB ADHK Tahun 2010 pada Tahun 2013 sebesar Rp. 3,78 Trilyun, kemudian pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10,28 Trilyun, terus mengalami kenaikan dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp. 12,12 Trilyun. Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2017 yang tertinggi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu berasal dari lapangan usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,15% sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa makro sektoral perekonomian Kabupaten Rembang berstruktur agraris. Sehingga perlu untuk mempertahankan usaha pertanian kehutanan dan perikanan serta mendorong sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang agar meningkatkan PDRB per-kapita.
2. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2013 - 2017 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%, dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 22,46%. Agar didapatkan hasil yang stabil, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidupnya agar tidak konsumtif, khususnya untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok.

2.2.3 Inflasi

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Inflasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 2,53%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3,31%, dan merupakan inflasi paling tinggi sepanjang selang tahun 2015- 2017. Namun masih dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,61% dan inflasi Jawa Tengah sebesar 3,71%. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas ekonomi di Kabupaten Rembang. Puncak kenaikan harga komoditas dalam siklus inflasi bulanan di Kota Rembang selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juli. Hal tersebut dipicu oleh kegiatan konsumsi masyarakat selama bulan ramadhan yang mendorong inflasi sebesar 0,77%. Sementara penurunan harga paling besar terjadi pada bulan April (-0,47%). Sepanjang tahun 2017, penyumbang kenaikan harga terbesar berasal dari inflasi kelompok komoditas bahan makanan dan terkecil berasal dari inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 -2017 sebagaimana gambar berikut :



Grafik 2.5
Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

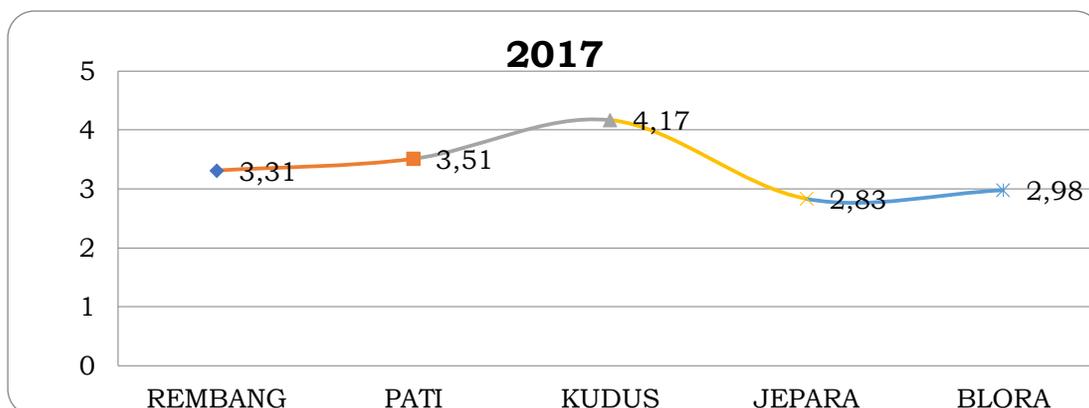
Sumber: BPS, 2018

Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2013–2018 masih terkendali cukup baik, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 di angka tertinggi sebesar 6,88% dan 7,59%, namun pada kurun waktu 3 tahun berikutnya pada tahun 2015 s.d. 2018 mengalami tingkat inflasi yang stabil yaitu di kisaran angka sebesar 1% s.d. 3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Rembang lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar se-Eks Karesidenan Pati. Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun juga kondisi daerah memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Rembang. Adapun tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2017 (%)

NO.	KABUPATEN	INFLASI (TAHUN)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	REMBANG	6,88	7,59	2,66	1,75	3,31	2,53
2.	PATI	7,57	8,01	3,23	2,31	3,51	NA
3.	KUDUS	8,31	8,59	3,28	2,32	4,17	NA
4.	JEPARA	7,95	9,87	4,57	3,45	2,83	NA
5.	BLORA	7,94	7,13	2,85	2,14	2,98	NA

Sumber: BPS, 2019



Grafik 2.6
Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%)

Sumber: BPS 2018

2.2.4 Indeks Gini

Fksjfk

Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang berada dalam kategori ketimpangan sedang atau menengah. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,33 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2015 sebesar 0,3. Adapun perkembangan indeks gini Kabupaen Rembang selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

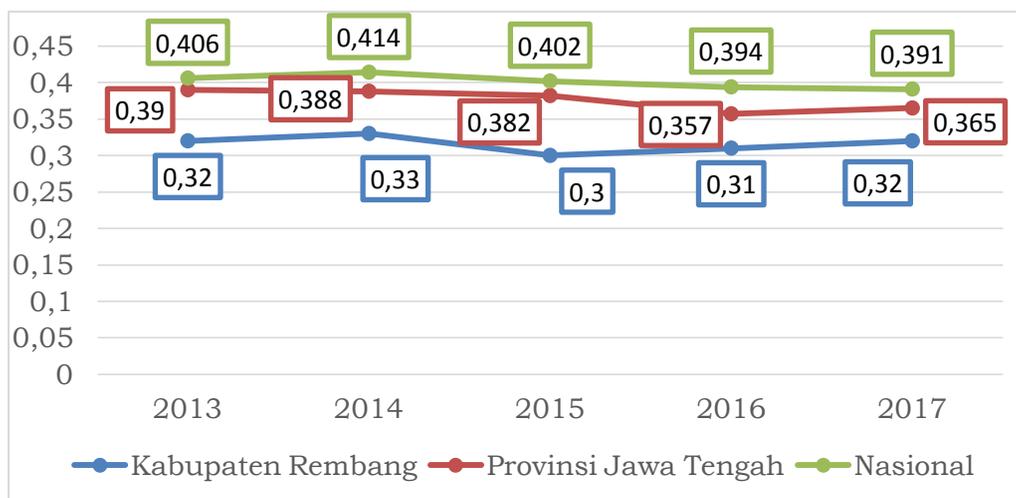
Tabel 2.17
Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017

KABUPATENREMBANG	INDEKS GINI (TAHUN)				
	2013	2014	2015	2016	2017
	0,32	0,33	0,3	0,31	0,32

Sumber : BPS, 2018

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi angka ketimpangan Kabupaten Rembang mulai Tahun 2013 sampai Tahun 2017 lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang lebih baik karena ketimpangannya lebih sedikit dibandingkan Provinsi dan Nasional.

Adapun perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 tersaji pada grafik berikut.



Grafik 2.7

Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018, diolah.

2.2.5 Kemiskinan

Data kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 jenis data, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro berupa persentase dan perhitungan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang di-rilis oleh BPS. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai referensi intervensikegiatan yang tersedia secara *by name by address*. Data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
Dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Indikator Kemiskinan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	128	120	119,11	115,49	115,19	97,44
Persentase Penduduk Miskin (persen)	20,97	19,5	19,28	18,54	18,35	15,41
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	284.160	299.503	314.596	338.986	354.440	365.443

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2018

Adapun perbandingan data kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan kabupaten eks Karesidenan Pati tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten
Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2018

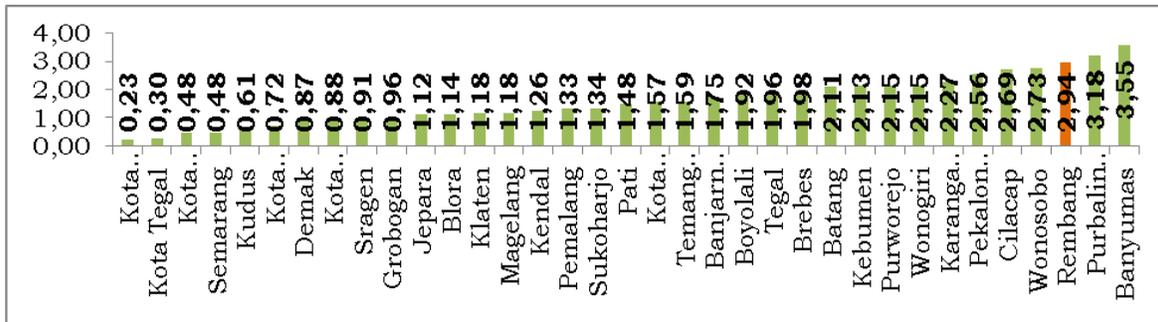
Indikator Kemiskinan	Kabupaten				
	Rembang	Pati	Kudus	Blora	Jejara
Jmlpnddk Miskin (ribu jw)	97,44	123,94	59,99	102,50	86,54
Persentase pddk Miskin (%)	15,41	9,90	6,98	11,90	7,00
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	365.443	414.316	393.078	308.520	371.296
Indeks Kedalaman Kemsikinan	2,86	1,37	0,88	1,62	0,71
Indeks Keparahan kemiskinan	0,78	0,29	0,19	0,37	0,13

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang sebesar 5,56% dari tahun 2013 - 2018. Penurunan paling banyak terdapat pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,94%. Penurunan yang banyak ini selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,95%. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya, hal ini terjadi karena tren kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati pada tabel di atas, bisa diartikan pada konsumsi/kapita/bln penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160 rupiah/kapita/bln, berubah pada tahun 2018 menjadi sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln. Jenis pengeluaran yang berkontribusi besar menyumbang tingginya garis kemiskinan adalah dari makanan, minuman, dan rokok sebesar 42% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga (lihat Tabel 2.14). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Rembang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga khususnya konsumsi rokok.

Garis kemiskinan tertinggi di Wilayah Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Pati sebesar 414.316 rupiah/kapita/bln, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 393.078 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Jepara sebesar 371.296 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Rembang sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln, menempati posisi diatas Kabupaten Blora.

Secara umum, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 cukup baik. Kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



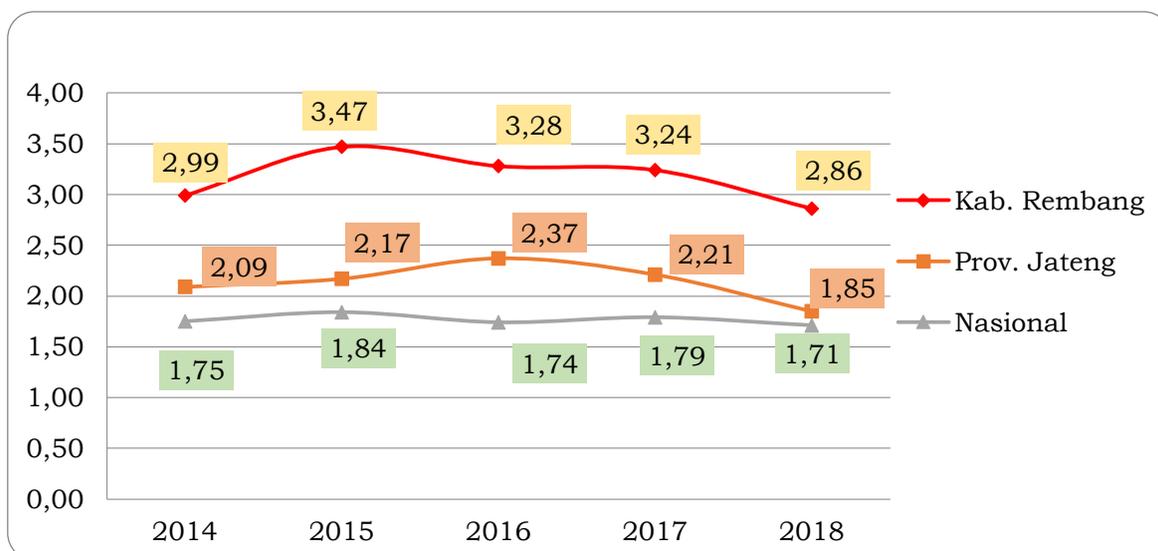
Grafik 2.8

Posisi Relatif Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%)

Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-02018 dapat dilihat pada grafik berikut:



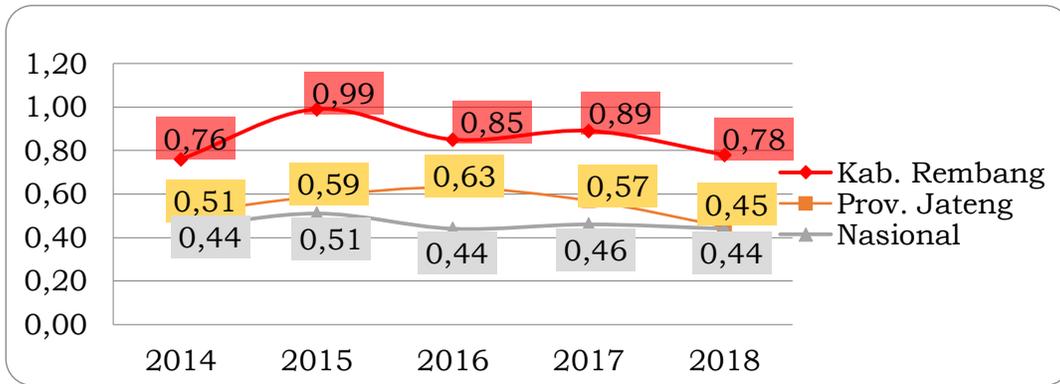
Grafik 2.9

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018

Dalam rentan waktu tahun 2015-2018, P1 mengalami penurunan dari 3,47 menjadi 2,86. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015-2018 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama empat tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang. Namun demikian penurunan P1 Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masih tertinggal.

Perbandingan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.10

Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2018

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018

Selama kurun waktu 2014-2018, P2 Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 0,76 pada tahun 2014 menjadi 0,78 pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,99. Pada tahun 2018 P2 mengalami penurunan menjadi 0,78. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan melihat trend penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian karena kondisi P1 dan P2 mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang. Hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. Agar program tersebut tepat sasaran dan strategi penanganan maka dilakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat mengukur peringkat/level pembangunan suatu daerah. IPM dapat diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Kabupaten Sekitar Wilayah Eks-Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	67,40	68,18	68,60	68,95	69,46
Blora	65,84	66,22	66,61	67,52	67,95
Pati	66,99	68,51	69,03	70,12	70,71
Jepara	69,61	70,02	70,25	70,79	71,38
Kudus	72,00	72,72	72,94	73,84	74,58
JAWA TENGAH	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12
NASIONAL	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2019

Secara umum pada tahun 2018, IPM Kabupaten Rembang cenderung lebih rendah dibanding Kabupaten eks Karesidenan Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018)

kenaikan IPM di Kabupaten Rembang mencapai 2,06%. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,51%. Kenaikan IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH).

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 6,90 menjadi 6,95 pada tahun 2018 atau tumbuh 0,72%. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di kabupaten Rembang yang lebih baik, karena pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Rembang telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I) atau seperti ilustrasi dibawah ini.



Gambar 2.8
Ilustrasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang

Sumber : data diolah

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	6,90	6,92	6,93	6,94	6,95
Blora	6,02	6,04	6,18	6,45	6,46
Pati	6,35	6,71	6,83	7,08	7,18
Kudus	7,83	7,84	7,85	8,31	8,62
Jepara	7,29	7,31	7,32	7,33	7,43
Jawa Tengah	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35

Sumber : Dindikpora

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah yang paling tinggi di Kabupaten Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Kudus yaitu selama 8,62 tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Blora yaitu selama 6,46 tahun. Kabupaten Rembang memiliki Angka Rata-rata Lama Sekolah yang cenderung rendah yaitu pada posisi ke-4 dari total 5 Kabupaten Eks Karesidenan Pati, yaitu sebesar 6,95 tahun. Angka ini juga masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,35 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selama periode 2014 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang tumbuh sebesar 1,29% per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Rembang yang bersekolah. Di tahun 2018, HLS telah mencapai 12,05 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan

pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. HLS dipengaruhi oleh perbedaan tingkat sosial, keadaan geografis, dan sebaran sekolah.

HLS Kabupaten Rembang pada tahun 2018 berada di bawah HLS Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati. Perbandingan HLS Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

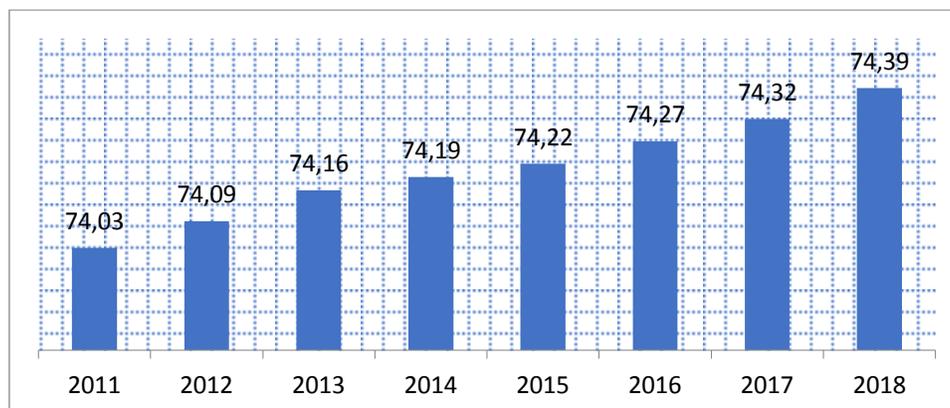
Tabel 2.22
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	11,46	12,02	12,03	12,04	12,05
Blora	11,75	11,91	11,92	12,13	12,14
Pati	11,24	11,79	11,92	12,29	12,30
Kudus	12,54	13,14	13,19	13,20	13,21
Jepara	12,58	12,27	12,28	12,70	12,71
Jawa Tengah	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018

c. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2018, Kabupaten Rembang telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,36 tahun (sekitar 4-5 bulan). Selama periode tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2011, UHH saat lahir sebesar 74,03 tahun, dan tujuh tahun kemudian mencapai 74,39 tahun.



Grafik 2.11
UHH Kabupaten Rembang Tahun 2011-2018

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2018, diolah.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati, UHH Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Rembang dalam perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Semakin maju suatu daerah, semakin banyak penduduknya yang mencapai lanjut usia. Kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang kesehatan dan ekonomi dipercaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya usia harapan hidup pada lansia.

Perbandingan UHH Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

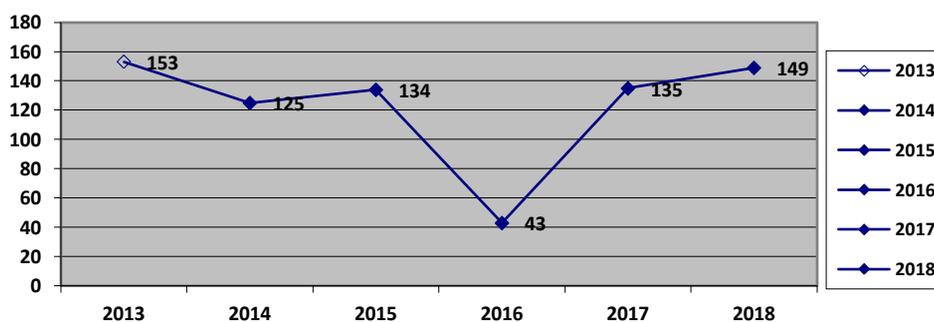
Tabel 2.23
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	74,19	74,22	74,27	74,32	74,39
Blora	73,84	73,84	73,88	73,99	74,12
Pati	75,43	75,63	75,69	75,80	75,93
Kudus	76,40	76,40	76,43	76,44	76,47
Jepara	75,64	75,64	75,67	75,68	75,71
Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14 kasus kematian bayi, atau AKB dari 135 kasus di Tahun 2017 menjadi 149 kasus di Tahun 2018. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Grafik Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.12
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang

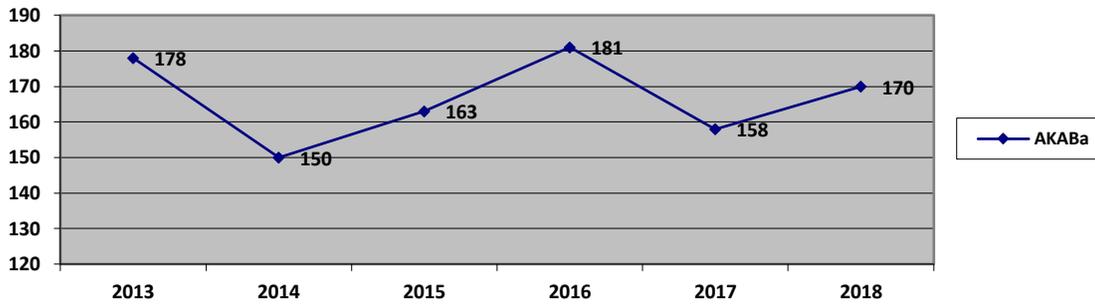
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tahun 2018, posisi kasus kematian bayi Kabupaten Rembang menempati peringkat tertinggi di Jawa Tengah dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (10,08). Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar posisi relatif capaian kasus kematian bayi Kabupaten Rembang masih diatas Kabupaten Jepara, Pati dan Blora namun dibawah Kabupaten Kudus.

2) Angka Kematian Balita (AKBa)

AKABa di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari Tahun 2013 sebesar 178 kematian/1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 170 kematian bayi/1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan angka kematian balita sudah cukup berhasil. Untuk itu upaya-upaya preventif perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan jumlah kasus kematian balita tinggi seperti di Kecamatan Sumber,

Kragan, dan Lasem. Grafik Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



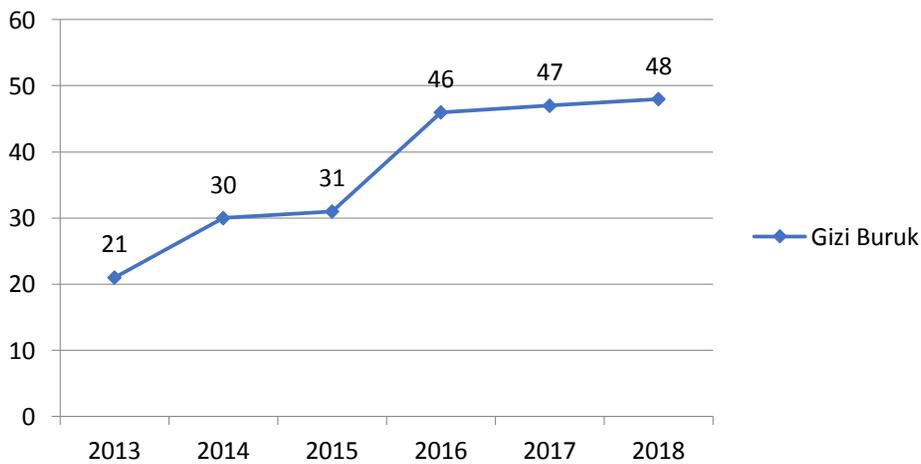
Grafik 2.13
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang tahun 2013–2018

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

3) Presentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2013 cenderung fluktuatif, jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita gizi buruk tinggi yaitu diKecamatan Kaliori, Rembang dan Sedan. Selengkapnya Grafik Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gizi Buruk



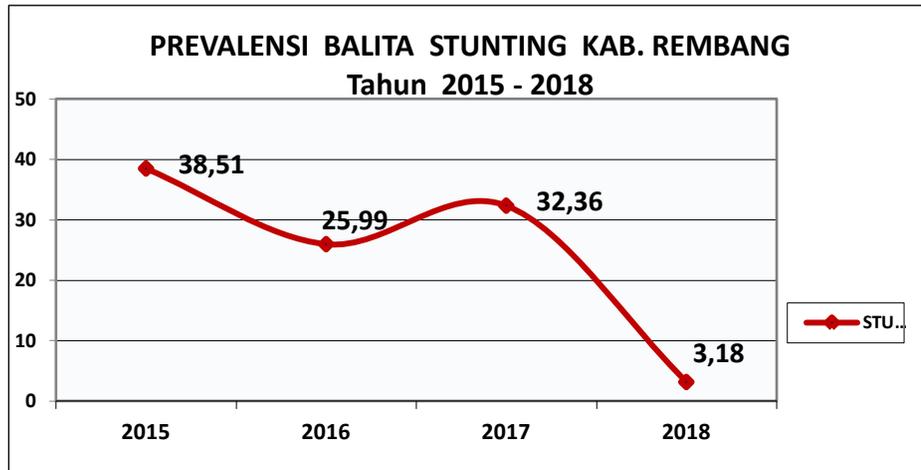
Grafik 2.14
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

4) Persentase Stunting

Perkembangan persentase Stunting di Kabupaten Rembang dari tahun 2015 cenderung fluktuatif, dengan persentase 38,51 di tahun 2015 turun menjadi 25,99 pada tahun 2016 dan naik menjadi 32,36 pada tahun 2017. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode Pemantauan Status Gizi (PSG). Adapun tahun 2018, balita stunting sebesar 3,18 %. Angka ini

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perbedaan metode yang dipakai.



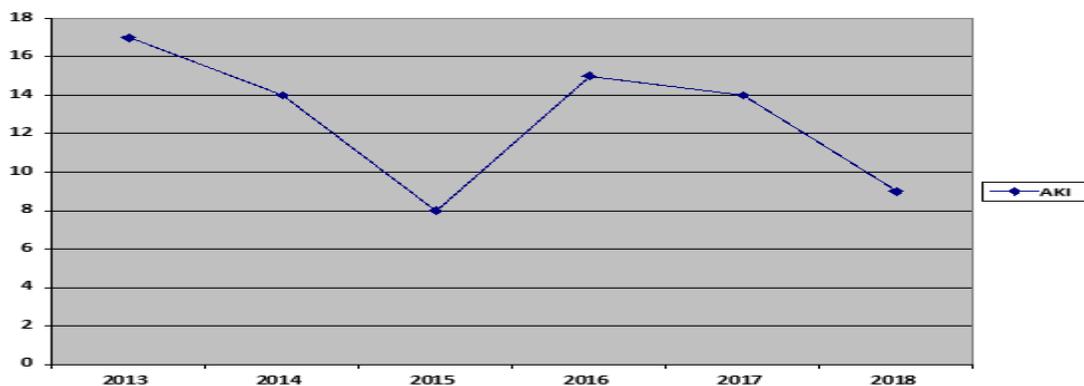
Grafik 2.15
Perkembangan Persentase Stunting di Kabupaten Rembang Tahun 2015-2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

5) Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Jumlah kematian ibu menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tertentu. Angka Kematian ibu dihitung dari Jumlah kasus/100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup.

Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2018. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil. Grafik Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.16
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu di antaranya adalah:

- Tindak lanjut penjangkaran Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan.
- Pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di tiap-tiap puskesmas.
- Pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.
- Pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pengembangan sumber daya manusia agar bisa bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Pemerintah telah menginstruksikan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar dan pemberantasan buta aksara. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, mulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan pendidikan hingga meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK-PAUD). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018 untuk kelompok umur 3-6 tahun mencapai 104,48persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2017 sebesar 108,48 persen.

Penurunan APK PAUD saat ini terkendala masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Rembang dan tugas kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan tahun.

Untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah Sekolah mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah TK sebanyak 372 sekolah dengan jumlah murid dan guru sebanyak masing masing 16.006 dan 790. Rasio murid dan guru sebesar 20 pada tahun 2018.



Gambar 2.9
Ilustrasi APK PAUD Tahun 2018

Sumber : data diolah

2) Pendidikan Dasar

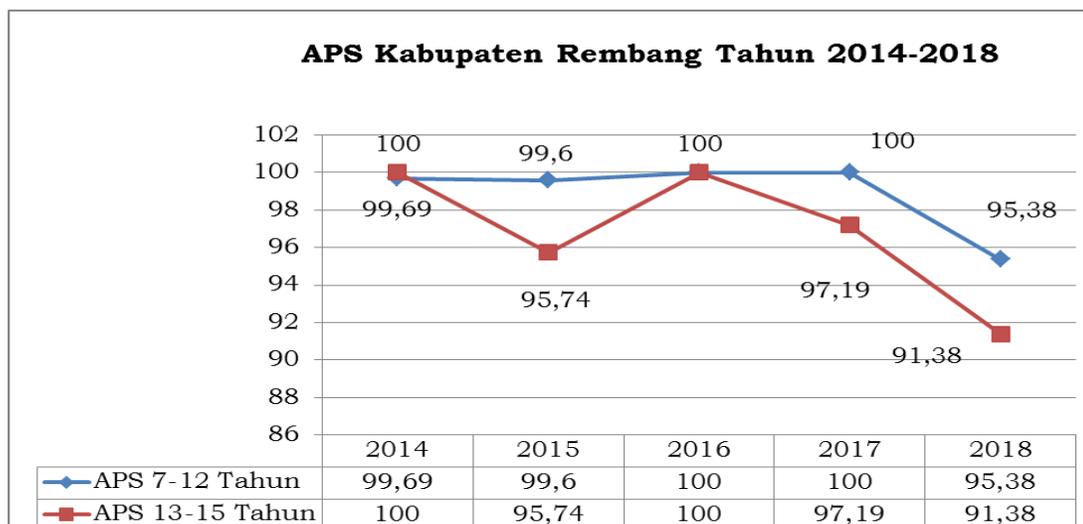
Peran pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Keberhasilan peran pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas.

Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun (2014-2018) mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018, jumlah Sekolah Dasar mengalami kenaikan menjadi 420 dari 418 unit pada tahun 2017. Jumlah tersebut meliputi SD Diknas sebanyak 374 unit dan SD Non Diknas sebanyak 46 unit. Jumlah murid SD juga mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 56.938 orang pada tahun 2017 menjadi 57.089 orang pada tahun 2018 terdiri dari murid SD Diknas sebanyak 50.274 dan Non Diknas sebanyak 6.815. Sedangkan jumlah SMP/MTs (Diknas dan Non Diknas) pada tahun 2018 sebanyak 101 unit mengalami peningkatan dari 96 unit pada tahun 2017. Jumlah murid SMP/MTs mengalami penurunan yaitu dari 28.589 pada tahun 2017 menjadi 28.345 pada tahun 2018.

3) Angka Partisipasi

Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah, yang dapat diamati melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah. Adapun APS Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.17
APS Pendidikan Dasar Tahun 2018

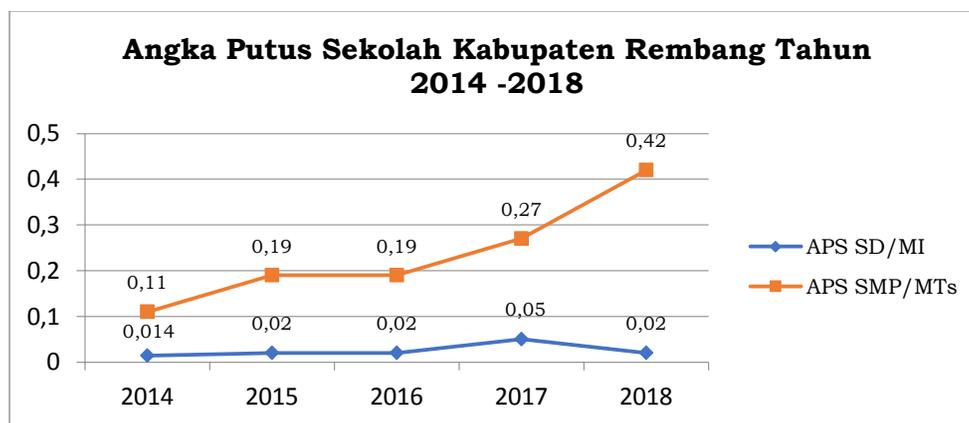
Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa APS tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan yang cukup banyak dari 99,69% pada tahun 2014, turun menjadi 95,38% pada tahun 2018. Begitu pula dengan APS tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup banyak hingga mencapai angka 91,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Rembang mengalami penurunan.

Adanya penurunan APS ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Beberapa anak yang telah lulus pendidikan dasar tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama, namun hanya memasuki pondok pesantren.
2. Beberapa anak usia sekolah melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di luar daerah, sehingga tidak terdata sebagai anak yang bersekolah Kabupaten Rembang.
3. Adanya beberapa anak usia sekolah yang putus sekolah bisa disebabkan karena membantu orang tua bekerja, permasalahan kesehatan, meninggal, dan kejadian pernikahan dini.
4. Data yang digunakan sebagai penyebut adalah data penduduk dari Badan Pusat Statistik.

Adapun grafik Angka putus sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Grafik 2.18

Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Sumber : Dindikpora Kabupaten Rembang 2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa angka putus sekolah anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0,42%, jumlah ini meningkat cukup banyak dari Tahun 2014 yang berjumlah 0,11%. Peningkatan anak yang putus sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan sosial budaya masyarakat.

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk menilai kualitas tenaga pendidik/guru, indikator yang dipergunakan adalah tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data mengenai indikator tersebut mulai Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018

No.	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,68%	86,05%	88,61%	90,89%	91,26%
2.	Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	62,19%	67,17%	68,93%	65,14%	69,69%
3.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	20,86%	50,71%	54,83%	51,11%	59,12%

No.	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
4.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	30,90%	36,65%	48,48%	52,61%	56,15%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat pendidik meningkat, meskipun demikian jumlah ini masih perlu ditingkatkan lagi agar kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Rembang semakin baik.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perlindungan dan pemeratan pelayanan kesehatan. Dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupi serta berkualitas. Jumlah dokter umum di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 71 orang, dokter spesialis sebanyak 43 orang dan dokter gigi sebanyak 13 orang.

1) Penyakit Menular

Adapun Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018

No.	Kecamatan	2017						2018					
		HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sumber	4	-	2	623	15	-	2	-	7	623	32	0
2	Bulu	9	-	-	253	4	3	1	-	0	253	11	0
3	Gunem	1	-	1	401	15	1	5	-	0	401	5	0
4	Sale	2	-	1	566	11	2	3	-	4	566	8	2
5	Sarang	9	-	1	134	21	-	2	-	1	134	40	0
6	Sedan	6	-	1	660	18	1	4	-	4	660	19	16
7	Pamotan	7	-	1	408	11	1	9	-	14	408	34	4
8	Sulang	9	-	2	203	17	1	6	-	2	203	26	3
9	Kaliori	8	-	2	351	35	2	11	-	9	351	19	0
10	Rembang	18	-	2	1584	24	1	13	-	23	1584	148	0
11	Pancur	10	-	-	334	10	1	7	-	1	334	5	0
12	Kragan	9	-	-	894	38	1	16	-	2	894	38	1
13	Sluke	7	-	-	91	10	1	9	-	1	91	16	1
14	Lasem	13	-	2	89	19	-	32	-	6	89	36	0
	Rembang	112	-	15	6591	296	15	120	-	74	6591	437	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.

2) Penyakit Tidak Menular

Kasus penyakit tidak menular kini sedang menjadi perhatian baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran tren penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, yang mayoritas merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidup sehari-hari yang buruk. Adapun Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Kasus penyakit tidak menular
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Angina Pectoris	67
2	IMA	44
3	Decompensatio Cordis	428
4	Hipertensi Essential	13054
5	Hipertensi lainnya	1629
6	Stroke Haemorrhagie	45
7	Stroke Non Haemorrhagie	232
8	DM Tergantung Insulin	85
9	DM tidak Tergantung Insulin	11095
10	Ca Hati	8
11	Ca Bronchus	11
12	Ca Mamae	88
13	Ca Seriks	30
14	PPOK	102
15	Asma Bronkiale	2402
16	Kecelakaan Lalin	943
17	Psikosis	412
18	Osteoporosis	2581
19	Ginjal Kronik	301
20	Obesitas	297
21	Katarak	451

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 3 besar peringkat kasus penyakit tidak menular terbanyak di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah penyakit Hipertensi Essential, DM tidak tergantung insulin, dan Osteoporosis.

c. Pekerjaan Umum

1) Prasarana Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan aksesibilitas berbagai sektor pembangunan terutama dalam pengembangan ekonomi daerah. Fasilitasi prasarana jalan terus diupayakan baik jalan poros nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2018 mempunyai panjang jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 67,9%. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2018 yang dalam kondisi baik sejumlah 92 unit atau 89%. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 31,64 Km dan jalan nasional sepanjang 88,04 km. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang jalan kabupaten (Km)	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75
	% kondisi jalan baik	55,59	48,98	44,96	48,98	60,6	67,9
	% kondisi sedang (%)	22,50	26,27	30,30	35,43	29,21	26,88
	% kondisi jalan rusak ringan	10,25	13,11	13,11	5,06	7,81	4,62
	% Kondisi jalan rusak berat	11,75	11,64	11,64	11,64	2,4	0,6
	Panjang jalan provinsi (Km)	57,45	58,40	58,40	31,63	31,64	31,64
	Panjang jalan Nasional (Km)	60,81	61,27	61,27	88,04	88,04	88,04
2	Jumlah Jembatan Kewenangan	126	126	126	126	126	126

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kabupaten						
	% Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	74,6	73,02	73,02	79	88	89

Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang Tahun 2018

Perkembangan pembangunan prasarana jalan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dapat dilihat dari persentase kondisi jalan baik pada tahun 2016 mencapai 48 % meningkat menjadi 67,9 % atau sepanjang 424,2km pada tahun 2018. Peningkatan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh:

- a) Penanganan jalan sejak tahun 2017 mulai difokuskan pada jalan-jalan yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/893/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Poros Desa.
- b) Optimalisasi sumber pendanaan penanganan jalan diluar APBD salah satunya melalui dana CSR perusahaan.

Kondisi ini masih memerlukan peningkatan terutama untuk mempertahankan kemantapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan yang menjadi jalur angkutan pertambangan. Perlu pengawasan tonase jalan pada ruas-ruas jalan tersebut sehingga dampak kerusakan jalan akibat kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) dapat dicegah. Kabupaten Rembang juga belum mempunyai alat dan personil untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas jalan sehingga sering mendapatkan aduan masyarakat tentang kerusakan jalan. Di samping itu sepertiga wilayah Kabupaten Rembang merupakan kawasan hutan sehingga banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa maupun kecamatan ada pada lahan aset Kementerian Kehutanan.

2) Prasarana Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 329 DI kewenangan kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2018 sebesar 18.438 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 87.00%. Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (Luas Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik dari total 21,193.45 hektar)	19,338	19,561	19,561	16,742	17,166	18,438
2	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (embung-m3-dlm ribuan)	8,101,319	8,101,319	8,101,319	7,844,440	9,228,753	10,613,066

Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang, 2018

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan

ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang.

Neraca ketersediaan air pada studi tentang Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Neraca Air Kabupaten Rembang

UPT	KECAMATAN	KEB.IRIGASI	KEB.AIR BERSIH	KEB.TOTAL	Q TERSEDIA	HASIL (ltr/dtk)	(m3/dtk)
BARAT	Sumber	6009,5	1,16	6010,66	1464,07	-4546,59	-4,54659
	Kaliiori	5361,74	3,07	5364,81	6765,07	1400,26	1,40026
	Bulu	3219,84	1,49	3221,33	10268,15	7046,82	7,04682
	Rembang	2626,61	8,59	2635,2	65,5	-2569,7	-2,5697
	Sulang	650,52	5,1	655,62	165,78	-489,84	-0,48984
TENGAH	Pancur	3030,3	3,16	3033,46	349,45	-2684,01	-2,68401
	Lasem	1659,06	8,54	1667,6	148,19	-1519,41	-1,51941
	Pamotan	1935,23	7,63	1942,86	983,2	-959,66	-0,95966
	Gunem	2207,56	1,46	2209,02	1643,12	-565,9	-0,5659
TIMUR	Sale	3195,66	1,27	3196,93	767,43	-2429,5	-2,4295
	Sedan	3260,73	2,69	3263,42	381,5	-2881,92	-2,88192
	Kragan	5928,6	0,92	5929,52	525,45	-5404,07	-5,40407
	Sarang	3511,37	5,19	3516,56	3018,35	-498,21	-0,49821
	Sluke	1747,25	1,12	1748,37	275,92	-1472,45	-1,47245

Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Baku

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan semakin menurunnya jumlah ketersediaan air, diperlukan suatu cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih tersebut adalah dengan adanya rencana pembangunan embung-embung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air sehingga nantinya diharapkan dengan adanya rencana pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai neraca air minus, arahan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan optimalisasi fungsi embung pada masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, Rencana pembangunan dan pengelolaan embung di Kabupaten Rembang meliputi sebagai berikut:

- Embung Lodan dengan kapasitas kurang lebih 5.390.000 m³ di Kecamatan Sarang.
- Embung Banyukuwung dengan kapasitas kurang lebih 2.416.000 m³ di Kecamatan Sulang.
- Embung Grawan dengan kapasitas kurang lebih 42.000 m³ di Kecamatan Sumber.
- Embung Panohan dengan kapasitas kurang lebih 1.165.000 m³ di Kecamatan Gunem.
- Embung Tlogo dengan kapasitas kurang lebih 3.700.000 m³ di Kecamatan Bulu.
- Embung Gedari dengan kapasitas kurang lebih 166.000 m³ di Kecamatan Sluke.
- Embung Trenggulan dengan kapasitas kurang lebih 4.000.000 m³ di Kecamatan Pancur.
- Embung Pasedan dengan kapasitas kurang lebih 64.420.000 m³ di Kecamatan Bulu.

- i) Embung Gambiran dengan kapasitas kurang lebih 3.090.000 m³ di Kecamatan Pamotan.
- j) Embung Palemsari dengan kapasitas dengan kapasitas kurang lebih 340.000 m³ di Kecamatan Sumber.
- k) Embung Sendangmulyo dengan kapasitas kurang lebih 3.270.000 m³ di Kecamatan Bulu.
- l) Embung Kaliombo dengan kapasitas kurang lebih 2.150.000 m³ di Kecamatan Sulang.
- m) Embung Sambiroto dengan kapasitas kurang lebih 7.070.000 m³ di Kecamatan Sedan.
- n) Embung Mojosari dengan kapasitas kurang lebih 2.630.000 m³ di Kecamatan Sedan.

Rencana embung tersebut telah terealisasi sebanyak 4 unit yaitu Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Grawan dan Embung Panohan. Embung Lodan mempunyai volume tampungan mencapai 4,6 juta m³ yang dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku. Embung Banyukuwung berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan air baku dengan kapasitas volume mencapai 2,426 juta m³. Embung Grawan mempunyai volume sebesar 0,47 juta m³ dan Embung Panohan mempunyai volume sebesar 0,82 juta m³. Embung / Waduk panohan belum dapat digunakan secara optimal karena masih ada permasalahan terkait proses tukar menukar lahan dengan Perhutani.

Selain empat embung besar yang pengelolaannya dilakukan oleh BBWS Pemali Juawana, terdapat 7 embung mini yang pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pusdataru Propinsi Jawa Tengah yaitu Embung Wiroto, Embung Sridadi, Embung Jurangjero, Embung Ronggomulyo, Embung Warugunung, Embung Maguan dan Embung Sekarsari. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan embung berupa embung pertanian yang realisasinya sejak tahun 2013-2018 mencapai 69 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Mengingat kondisi Kabupaten Rembang yang relatif kering maka perlu penambahan bangunan tampungan air dengan kapasitas yang cukup besar untuk keberlanjutan air baku di Kabupaten Rembang.

Pembangunan tampungan air di Kabupaten Rembang sebagian besar terkendala pengadaan lahan dan relokasi permukiman yang terjadi pada rencana pembangunan Embung Kaliombo dan Embung Tlogo. Sehingga perencanaan anggaran ke depan harus diprioritaskan untuk pengadaan lahan sebagai tampungan-tampungan air agar air permukaan *run off* air menuju hilir dapat diperlambat. Selain itu untuk rencana bangunan penampung air lainnya harus segera dibuat perencanaan yang matang sehingga skenario penyediaan air baku di Kabupaten Rembang dapat berjalan secara optimal.

3) Saluran Drainase

Saluran drainase di Kabupaten Rembang sepanjang 24,95 km. Pada tahun 2018 saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 20,17 km, sedangkan kondisi rusak sepanjang 4,78 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 1,04%. Hal ini mengindikasikan masih perlu penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang bersentuhan langsung dengan penduduk. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan dengan mengikuti kontur tanah dan sungai sebagai muara akhir agar jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna untuk sarana pembuangan. Disisi lain

drainasejuga juga perlu pembangunan dalam rangka pencegahan terjadinya banjir. Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang
Tahun 2013–2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Drainase (km)	25,95	25,95	25,95	23.74	24.06	24.95
2	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (km)	16,00	16,35	16,60	17.74	18.38	20.17
3	Panjang Drainase dalam Kondisi Rusak (km)	9,95	9,60	9,35	6.00	5.68	4.78

Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang, 2018

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan belum diikuti dengan penyediaan rumah oleh pemerintah daerah. Pada saat ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Pada masa mendatang peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar harga rumah relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain adanya kekurangan rumah (backlog), rumah yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan cukup besar di Kabupaten Rembang menurut data PBDT Tahun 2015 yaitu mencapai 59.453 unit atau sebesar 33,1 % dari jumlah rumah di Kabupaten Rembang. Hingga tahun 2018, RTLH tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 4.604 unit. Selengkapnya data Rumah Tidak Layak Huni serta realisasi penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Data RTLH (PBDT 2015)	Realisasi Rehabilitasi RTLH			Data RTLH 2018
			2016	2017	2018	
1	Sumber	5,115	31	133	54	4,897
2	Bulu	3,735	60	38	83	3,554
3	Gunem	3,054	0	41	68	2,945
4	Sale	3,242	11	197	56	2,978
5	Sarang	5,480	89	138	87	5,166
6	Sedan	6,414	283	221	191	5,719
7	Pamotan	5,840	83	106	494	5,157
8	Sulang	4,603	44	62	95	4,402
9	Kaliori	4,165	0	199	134	3,832
10	Rembang	4,064	105	240	197	3,522
11	Pancur	3,406	231	26	99	3,050
12	Kragan	4,884	66	108	127	4,583
13	Sluke	2,490	20	33	50	2,387
14	Lasem	2,961	51	74	179	2,657
Jumlah		59,453	1,074	1,616	1,914	54,849

Sumber: DPKP Kabupaten Rembang, 2018

Pembangunan perumahan harus memperhatikan peraturan-peraturan serta mengacu pada RTRW untuk menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aturan akan

memunculkan masalah-masalah lingkungan permukiman. Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut banyak ditemukan pada permukiman pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor. 050/0960/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan kawasan kumuh perkotaan berada pada 14 desa dengan luas mencapai 114,407 Ha. Luasan kumuh tersebut menjadi target RPJMN kota tanpa kumuh pada tahun 2019.

Mengingat lokasi kawasan kumuh yang dinilai masih sangat terbatas, pada tahun 2016 dilakukan pemutakhiran ulang terhadap SK Kumuh pada tahun 2014. Pemutakhiran data tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2017 ditetapkan kembali SK Bupati Nomor. 050/787/2017 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan 19 kawasan permukiman kumuh dengan luas kawasan kumuh mencapai 290,45 Ha. Progres pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sangat lambat. Pada Tahun 2018, luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang baru mencapai 6,16 Ha. Selengkapnya luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Rembang
Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	2017	2018	+/-
1	Rembang	Tanjungsari	20.2 ha	20.2 ha	0 ha
		Pasarbanggi	6.86 ha	4.71 ha	-2.15 ha
		Padaran	36.94 ha	36.94 ha	0 ha
		Gegunungwetan	4.77 ha	4.77 ha	0 ha
		Gegunungkulon	5.02 ha	5.02 ha	0 ha
		Kabongan Lor	3.82 ha	3.82 ha	0 ha
		Sukoharjo	5.83 ha	5.83 ha	0 ha
2	Lasem	Dorokandang	1.98 ha	0.90 ha	-1.08 ha
		Ngemplak	2.93 ha	0 ha	-2.93 ha
		Babagan	15.9 ha	15.9 ha	0 ha
		Soditan	8.38 ha	8.38 ha	0 ha
		Gedongmulyo	33.63 ha	33.63 ha	0 ha
		Sumbergirang	7.25 ha	7.25 ha	0 ha
3	Pamotan	Sidorejo	20.34 ha	20.34 ha	0 ha
		Pamotan	23.61 ha	23.61 ha	0 ha
		Bangunrejo	19.99 ha	19.99 ha	0 ha
4	Kragan	Tegalmulyo	46.32 ha	46.32 ha	0 ha
		Kragan	12.05 ha	12.05 ha	0 ha
		Karangharjo	14.63 ha	14.63 ha	0 ha
TOTAL			290.45 ha	284.29 ha	-6.16 ha

Sumber: DPKP Kabupaten Rembang Tahun 2018

Selain penataan kawasan permukiman kumuh, mengingat sejarah Kabupaten Rembang yang sangat panjang maka banyak terdapat kawasan permukiman tradisional yang perlu ditata dan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pada tahun 2017 telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan perkotaan Lasem yang merupakan perpaduan

dari budaya Jawa dan Tionghoa. Penyusunan ini selain untuk meningkatkan kualitas permukiman juga bertujuan untuk melindungi bangunan-bangunan pusaka yang ada di wilayah tersebut. Ke depan akan disusun juga masterplan kawasan-kawasan permukiman tradisional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas perkotaan sebagaimana amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menyediakan minimal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan. RTH publik perkotaan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat diwujudkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan rel KA, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Selengkapnya RTH di Kabupaten Rembang pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang

NO	NAMA RTH	LOKASI	TIPOLOGI RTH	JENIS RTH	LUAS (M2)
1	Alun-alun Kota Rembang	Jalan KH. Mas Mansyur Kel Kutoharjo Kec Rembang.	Publik	Taman Kota	12.722
2	Taman Borotugel	Jl Pahlawan (belakang RSUD) ds Kabongan Kidul kec Rembang.	Publik	Taman Kota	10.400
3	RTH Desa Mondoteko	Jalan Mondoteko Desa Mondoteko Kecamatan Rembang.	Publik	Taman Kota	29.000
4.	RTH KBT Tasikagung	Jl Pelabuhan Periknan Pantai Tasikagung ds Tasikagung Kec Rembang.	Publik	Taman Kota	5.200
5.	Taman Tugu Batas Kota Barat	Jalan Gajahmada ds Banyudono Kecamatan Kaliori	Publik	Taman Kota	420,84
6.	Taman Tugu Bataskota Timur	Jalan Sudirman Desa Tireman Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	420,84
7.	Taman Tugu PKK	Jalan Gajah Mada Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	130,38
8.	Taman Tugu Adipura	Jalan Gajah Mada – Diponegoro Kel Kutoharjo kec Rembang	Publik	Taman Kota	147,33
9.	Taman Balai Kartini	Jalan Diponegoro Desa Pandean Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	437,8
10.	Taman Tugu Lilin	Jalan Veteran Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	411
11.	Taman Depan Terminal	Jalan Sudirman Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	269
12.	Pemukaman Krapyak	Jalan Majapahit Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang.	Publik	Pemukaman	74.135
13.	Pemukaman Turusgede	Jalan Rembang – Blora Desa Turusgede Kecamatan Rembang	Publik	Pemukaman	54.253
14.	Jalur Hijau Jalan Kartini	Jl Kartini Kel Kutoharjo, Kel Leteh, ds Sawahan Kecamatan Rembang.	Publik	Jalur pejalan kaki	677,51
15.	Jalur Hijau Jl Dr. Sutomo	Jl dr. Sutomo Kel Kutoharjo, Kel Leteh Kecamatan Rembang	Publik	Jalur Pejalan Kaki	868,62
16.	Jalur Hijau Jl HOS. Cokroaminoto	Jl HOS. Cokroaminoto Kel Kutoharjo, kel Leteh, kel Sidowayah, ds Sukoarjo, ds Kabngankidul kec Rembang.	Publik	Jalur Pejalan Kaki	1.328,44
17.	Jalur Hijau Jalan Pemuda	Jl Pemuda ds Sumberjo, Kel Leteh, ds Kabongankidul, ds Ngotet, ds Mondoteko Kec Rembang.	Publik	Jalur Pejalan Kaki	4.050,04
18.	Hutan Kota Besi	Jl Rembang–Blora ds Turusgede Kec Rembang	Publik	Hutan Kota	200.000
19.	Hutan Kota Rowosetro	Jl Clangapan ds PasarBanggi Kec Rembang	Publik	Hutan Kota	22.434
20.	Hutan mangrove Desa Tireman	Jalan - Desa Tireman Kecamatan Rembang.	Publik	RTH Sempadan Pantai	280.000
21.	Hutan mangrove ds Pasar Banggi	Jalan-ds Pasar Banggi Kec Rembang	Publik	RTH Sempadan Pantai	485.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, 2018

Sebagian besar RTH sebagaimana tercantum di atas berlokasi di Kecamatan Rembang. Luas Ruang Terbuka Hijau di atas mencapai 118,23 Ha yang terdiri dari taman aktif maupun pasif. Dilihat dari luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Rembang yang mencapai 3.214 Ha, maka prosentase RTH Publik di Kabupaten Rembang baru mencapai 3,68 %. Untuk memenuhi amanat Perda Tata Ruang sebesar 20 % dari luas perkotaan atau sekitar 642,8 hektar maka masih terdapat kekurangan luas RTH publik sebesar 524,57 hektar. Sejak Tahun 2018, Pemkab Rembang mulai melakukan penataan RTH di luar Perkotaan Rembang untuk mewujudkan target luasan sebagaimana amanat Perda Tata Ruang. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan luasan RTH publik tersebut antara lain kurangnya lahan di perkotaan. Sehingga upaya perwujudan RTH Publik harus diiringi dengan kesiapan lahan di kawasan perkotaan.

d. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Pada tahun 2014 Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun sebanyak 121 kasus, menurun menjadi 67 kasus pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 82 kasus pada Tahun 2018. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

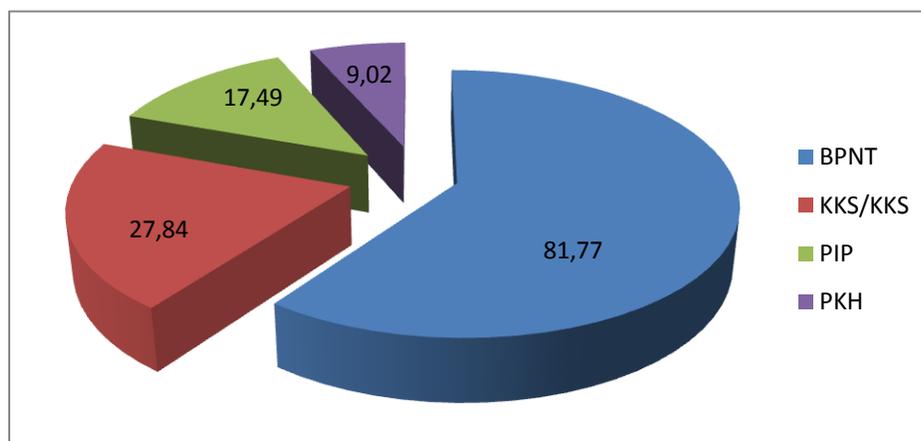
Tabel 2.34
Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Remban
Tahun 2014-2018

No.	Jenis Kasus Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Narkoba	4	6	19	15	16
2	Pembunuhan	1	0	2	0	1
3	Seksual	18	8	5	3	10
4	Penganiayaan	24	34	16	9	14
5	Pencurian	44	57	36	21	32
6	Penipuan	29	18	12	18	9
7	Pemalsuan Uang	1	0	0	1	0
Jumlah		121	123	90	67	82

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

e. Sosial

Bantuan dan perlindungan sosial ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Pada tahun 2017 instrumen yang paling banyak diterima rumah tangga Kabupaten Rembang adalah BPNT (dulunya paket raskin/rastra), yaitu sebanyak 81,77 persen. Berturut-turut adalah instrumen Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 27,84 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 17,49 persen dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 9,02 persen.



Grafik 2.19

Bantuan dan Pelindungan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang adalah pada kelompok lansia terlantar dan disabilitas berat karena kelompok tersebut termasuk kelompok miskin absolut individu. Adapun data pada tahun 2018 untuk lansia terlantar sebanyak 600 orang dan disabilitas berat 300 orang. Sedangkan permasalahan PMKS yang lain sudah ditangani oleh perangkat daerah terkait. Agar supaya bisa menangani permasalahan PMKS kategori tersebut maka dilakukan pemberian bantuan jaminan biaya hidup sebesar garis kemiskinan, sehingga diharapkan biaya hidup tiap bulan bisa tercukupi sesuai ketentaun penanganan kemiskinan, dan masalah tersebut dapat tertangani dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha melalui forum CSR, Baznas maupun personal responsibility.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. Adapun masalah ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia atau antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Disamping itu juga adanya produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang, serta pendapatan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,23	68,13	66,97	56,4	70,78	67,46
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,98	5,23	4,51	4,3	3,19	2,87

Sumber: BPS, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2013, sampai dengan Tahun 2016 menurun menjadi 56,4%. Kemudian pada tahun 2017 angka TPAK meningkat yakni sebesar 70,78% dan turun lagi 67,46% pada tahun 2018. Penurunan TPAK tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rembang semakin berkurang.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami penurunan, dari 5,928% menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018 menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan pengangguran.

Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018
1.	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Orang	496
2.	Presentase pelatihan yang bersertifikat	%	80
3.	Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,1
4.	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,81
5.	Rasio ketergantungan	%	41,28
6.	% lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional	%	80
7.	% perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan	%	100
8.	Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	75

Sumber: DPMPTSPNaker, 2018

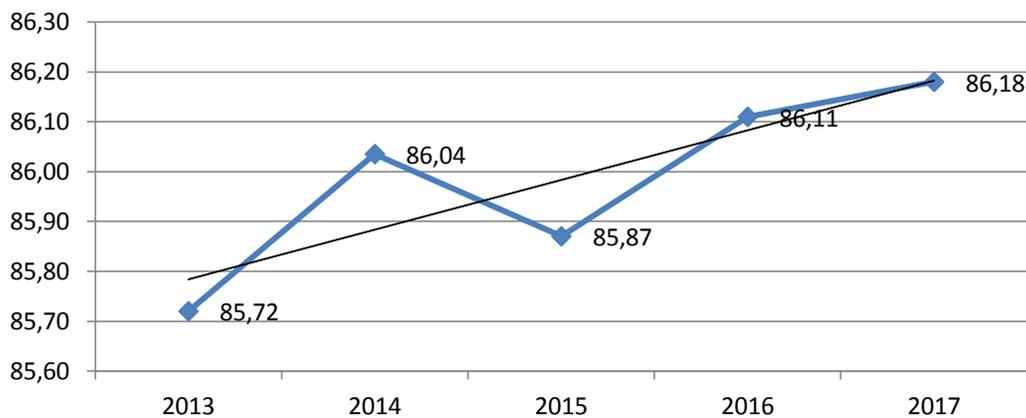
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Perempuan memiliki potensi tinggi untuk berperan pada upaya-upaya pembangunan daerah. Meskipun demikian, pemberdayaan dan pengembangan perempuan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, terkait dengan kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan penganggaran.

Gambaran pembangunan manusia berbasis gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan indeks tersebut, dapat dilihat seberapa besar perkembangan pembangunan gender berdasarkan pencapaian perempuan dalam mengakses pembangunan gender dan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan Gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan persentase IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.20
Perkembangan IPG Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2017

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun dalam 5 tahun (2013-2017) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2017 nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang, Tahun 2013-2017

Komponen	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	na	17,78	20,00	na	22,22
Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	na	36,82	45,52	na	55,66
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	na	31,27	31,68	na	31,69
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	na	66,43	70,35	na	72,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2017

Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus meningkat dari tahun 2013, hingga mencapai 22,22% pada tahun 2017. Hal ini selaras dengan nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai angka 72,45%.

2) Perlindungan Anak

Suatu kabupaten dikatakan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi 5 klaster 31 indikator penilaian Kabupaten Layak Anak yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Th. 2011. Capaian Kabupaten Layak Anak dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pratama dengan nilai 500-599, Madya dengan nilai 600-699, Nindya dengan nilai 700-799, Utama dengan nilai 800-999, dan Idola dengan nilai 1000. Pada tahun 2015-2017, Kabupaten Rembang menerima penghargaan sebagai

Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Kabupaten Rembang mengembangkan penilaian secara mandiri sampai ke tingkat Desa, yang diwujudkan dalam “Desa Ramah Anak”. Beberapa indikator terkait penilaian Desa Ramah Anak tersebut seperti pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hingga kini pemerintah masih melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Pppt Semai “Rwc3” Rembang

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS			
			FISIK	SEKSUAL	PSIKOLOG	PENELANTARAN
1	2011	18	16	0	0	2
2	2012	15	10	1	0	4
3	2013	11	9	1	0	1
4	2014	14	11	1	0	1
5	2015	12	10	2	0	0
6	2016	18	12	43	2	4
7	2017	6	3	0	0	4
8	2018	5	3	2	0	0

Sumber : DinsosPPKB Kabupaten Rembang, Tahun 2018

c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu: (1) Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan; (2) keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan (3) pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Ketersediaan energi dan protein Per Kapita menunjukkan seberapa besar ketersediaan energi dan protein pada tingkat rumah tangga. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein perkapita menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terhadap bahan pangan semakin baik. Ketersediaan energi di Kabupaten Rembang tergolong baik, dengan ketersediaan energi perkapita menunjukkan capaian yang cukup baik yakni 5.044 kkal/kap/hari pada tahun 2016. Capaian ketersediaan energi perkapita telah sesuai dengan standar ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal.

Jumlah ketersediaan yang melebihi standar ini menunjukkan tidak terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Rembang karena kebutuhan bahan pangan terpenuhi dan masyarakat memiliki daya beli masyarakat

terhadap pangan. Ketersediaan energi dan protein ini didorong dengan produksi bahan pangan utama yaitu padi yang surplus. Penguatan cadangan pangan juga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari dari capaian diatas 100 ton/hari, telah melebihi standar yang ditetapkan pemerintah untuk kabupaten/kota.

Berkaitan dengan konsumsi pangan dan keamanan pangan, dapat diketahui dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Rembang belum mencapai angka ideal, dengan skor tahun 2013 sebesar 86,7% dan Tahun 2014 naik sebesar 86,8%, namun terjadi penurunan di Tahun 2015, dan 2016. Pada tahun 2017 skor PPH Kabupaten Rembang kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,58% dan pada tahun 2018 sebesar 86,8%. Nilai PPH yang masih di bawah standar mengindikasikan kurang seimbang nya konsumsi kelompok pangan. Untuk menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan takaran energi diperlukan perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti beras sebaiknya diubah menjadi bahan lain dengan kandungan karbohidrat/energi yang lebih rendah seperti ubi atau pangan substitusi lain. Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sebagai sumber protein dan vitamin. Sayur dan buah terutama sangat penting sebagai sumber vitamin sehingga penyakit kekurangan vitamin dan mineral dapat ditekan.

Tingkat konsumsi energi Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 mencapai 1.983,3 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi mendekati standar konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi rata-rata penduduk sudah cukup baik, namun upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras tentunya perlu ditempuh melalui upaya untuk menaikkan pemanfaatan sumber karbohidrat dari bahan lokal seperti jagung, ketela dan ubi sebagai alternatif konsumsi. Guna penganekaragaman bahan pangan, perlu dipilih bahan-bahan lokal yang dapat diolah sebagai pangan alternatif selain beras.

Secara rinci Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,7	86,8	85,9	85,4	87,58	86,8
2.	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari)	5.000	5.000	5.280	5.044	6.515	5.044
3.	Ketersediaan informasi pasokan harga & akses pangandaerah (%)	100	100	100	100	100	100
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100	100	100	100	100
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	74	92	80	100	100	100
6.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	88	21	66,6	100	100	100
7.	% peningkatan kelas penyuluh/tahun (%)	8,12%	8,12%	10%	10%	10%	15,78
8.	Jml diklat formal/non formalyg diikuti penyuluh/th	18	18	20	15	15	16
9.	Jml Pos Penyuluhan desa/th (Posluhdes)	2	2	2	42	55	55
10.	% peningkatan kelas kelompok tani (%)	34,92	34,92	17	17	9,09	10

Sumber: Dintanpan Kabupaten Rembang Tahun 2018

d. Pertanian

Kebijakan pada urusan pertanian diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanian dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanian. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanian adalah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,

penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan tanah ulayat, serta mempunyai kewenangan dalam Perencanaan penggunaan tanah.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terdapat 124 pengaduan kasus pertanahan dan seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan di tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di 14 kecamatan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan. Salah satunya dalam upaya reaktifasi kereta api komuter di Kabupaten Rembang. Perlu dilakukan identifikasi terkait lahan-lahan yang merupakan asset PT. KAI sekaligus fasilitasi untuk pengadaan lahan baru untuk mewujudkan program reaktifasi kereta api di Kabupaten Rembang.

e. Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan membawa konsekuensi logis meningkatnya jumlah sampah serta menurunnya kemampuan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara itu penanganan masalah sampah di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ada belum memenuhi syarat kelayakan yaitu sistem operasional TPA masih dengan sistem control landfill, fasilitas TPA untuk zona penimbunan belum dilengkapi dengan bangunan kedap air, pengendalian gas tidak ada, serta instalasi pengolahan lindi yang kondisinya rusak.

Timbulan sampah di Kabupaten Rembang setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 4 %. Faktor umum yang menyebabkan meningkatnya produksi sampah perkotaan diantaranya yaitu pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat sehingga telah menyebabkan timbulan sampah di daerah perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut baik jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3R). Selengkapny data timbulan sampah di Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2014-2018 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.40
Data Timbulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Timbulan Sampah (kg/hari)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Sumber	18	10,389	10,426	10,475	12,221	12,650
2	Bulu	16	7,931	7,958	7,995	9,381	9,653
3	Gunem	16	7,092	7,134	7,184	8,087	8,706
4	Sale	15	11,159	11,227	11,309	13,152	13,706
5	Sarang	23	18,950	19,124	19,322	20,580	23,529
6	Sedan	21	16,001	16,109	16,237	18,492	19,701
7	Pamotan	23	13,611	13,664	13,733	16,926	16,591
8	Sulang	21	11,482	11,554	11,640	13,407	14,112
9	Kaliori	23	12,068	12,146	12,239	14,410	14,844
10	Rembang	34	26,536	26,791	27,082	31,236	33,003
11	Pancur	23	8,585	8,652	8,729	10,485	10,608
12	Kragan	27	18,362	18,526	18,714	22,440	22,782
13	Sluke	14	8,287	8,332	8,386	10,452	10,155
14	Lasem	20	14,618	14,699	14,796	17,828	17,918
JUMLAH		294	185,070	186,340	187,841	219,097	227,956

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018

Data timbulan di atas merupakan perhitungan dari timbulan sampah per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terbagi menjadi empat yaitu pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, pengelolaan melalui bank sampah, pengelolaan melalui TPS 3R dan sampah yang diangkut menuju TPA. Besaran sampah yang dikelola dengan 3R di Kabupaten Rembang hanya sebesar 0,5 m³/hari atau sekitar 0,03% dari total timbulan sampah Kabupaten Rembang dan sampah yang terkelola dengan 3R hanya di Kecamatan Rembang. Sedangkan besaran sampah yang masuk ke TPA setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.41

Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah Kabupaten Rembang

No	Nama Kecamatan	3R		Volume sampah yg terangkut ke TPA		Total volume sampah yang terangkut		Total Timbulan Sampah Se Kabupaten
		%	m ³ /hari	%	m ³ /hari	%	m ³ /hari	
1	Sumber	-	-	-	-	-	-	70,35
2	Bulu	-	-	-	-	-	-	81,59
3	Gunem	-	-	-	-	-	-	97,61
4	Sale	-	-	-	-	-	-	136,61
5	Sarang	-	-	0,02%	0,25	0,02%	0,25	162,83
6	Sedan	-	-	-	-	-	-	94,45
7	Pamotan	-	-	1,02%	16	1,02%	16	229,71
8	Sulang	-	-	0,19%	3	0,19%	3	73,59
9	Kaliori	-	-	-	-	-	-	112,28
10	Rembang	0,03%	0,5	9,38%	147,45	9,41%	147,95	124,12
11	Pancur	-	-	-	-	-	-	157,52
12	Kragan	-	-	0,38%	6	0,38%	6	105,13
13	Sluke	-	-	0,58%	9,2	0,58%	9,2	60,29
14	Lasem	-	-	3,18%	50	3,18%	50	66,63
Jumlah		0,03%	0,5	14,75%	231,9	14,78%	232,4	1.572,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018

Volume sampah yang diangkut ke TPA berasal dari sampah permukiman maupun sampah non permukiman. Pada tahun 2018, volume sampah yang terangkut sebesar 231,90 m³/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang yaitu 147,45 m³/hari (9,41% dari jumlah total volume sampah se-Kabupaten Rembang). Hal ini dikarenakan Kecamatan Rembang merupakan ibukota Kabupaten Rembang. Selain di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem juga mempunyai volume sampah terangkut yang besar, yaitu 50 m³/hari (3,81%). Volume sampah yang terangkut ke TPA juga merepresentasikan tingkat pelayanan eksisting sekarang ini. Untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Kabupaten Rembang akan dilakukan pengembangan TPA di Kecamatan Sulang. Diharapkan pengembangan TPA tersebut dapat semakin meningkatkan umur teknis bangunan serta meningkatkan kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Rembang..

Sarana pengumpulan sampah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 yaitu meliputi truk sampah, truk container, container gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara, dan Tempat Pembuangan Akhir. Namun truk tinja, transfer depo, dan instalasi pengolah limbah tinja masih belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Secara lebih jelasnya, perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Jenis Sarana	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Truk Sampah (unit)	5	5	5	4	5	6
2.	Truk Kontainer (Unit)	7	7	7	5	6	8
3.	Kontainer (unit)	56	56	56	56	55	63
4.	Gerobak dan Becak Sampah (unit)	95	98	98	114	114	114
5.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	36	36	36	46	52	59
6.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018

Untuk mengukur kondisi lingkungan hidup dilakukan pengukuran indeks kualitas udara dan indeks kualitas air serta tutupan lahan. Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun makna esensinya masih ada. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kualitas Lingkungan hidup sering digunakan sebagai acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi yang ideal.

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tak mudah dimengerti masyarakat. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi diambil sampel di perempatan jaeni, Industri di PLTU Sluke, Perumahan di desa Sidowayah, Komersial Perkantoran di jalan Pemuda km.2, dalam hal ini pengujian kualitas udara di lakukan oleh DLH Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi oleh KAN. Hasil pengujian udara tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.43
Pengukuran Kualitas Udara Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Lokasi pengukuran	Lama pengukuran	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	TSP	PM ₁₀	Hc
			µg/Nm ³						
1	Perempatan Jaeni	1 jam	65,63	3865,03	117,79	51,86	81,65	0,018	38,41
2	PLTU Sluke	1 jam	64,21	5248,8	135,72	118,72	163,39	0,03	42,89
3	Desa Sidowayah	1 jam	62,12	2879,45	106,53	41,76	52,63	0,012	35,11
4.	Jalan Pemuda Km.2	1 jam	63,37	3456,92	109,87	60,74	78,11	0,02	37,96

Sedangkan untuk pengukuran kualitas atau pencemaran air sungai menggunakan komposisi parameter fisik (bau, warna, jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasa) kimia (bahan an-organik : besi, seng, aluminium,

kesadahan, klorida, mangan, pH, sulfat, serta tembaga) dan bakteriologis (jumlah kuman dan total coli). Kabupaten Rembang menggunakan sampel pengujian kualitas di tiga sungai yaitu sungai Kalipang kecamatan Sarang, sungai Babagan kecamatan Lasem, sungai Karanggeneng Rembang. Analisis pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBTPI Semarang yang sudah terakreditasi oleh KAN. Dimana hasil pengujianya sebagai berikut :

Tabel 2.44
Pengukuran Kualitas Air Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	parameter	sat	Sungai pengambilan sampel						Baku mutu			
			kalipang		karanggeneng		babagan		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
			Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II				
1.	TSS	mg/l	25	28	34	26	27	44	50	50	400	400
2.	pH		6,7	7,8	7,7	6,5	6,9	7,8	6-9	6-9	6-9	6-9
3.	BOD	mg/l	7,02	7,82	5,75	6,09	4,56	8,67	2	3	6	12
4.	COD	mg/l	10,56	13,42	15,79	17,65	20,65	38,67	10	25	50	100
5.	DO	mg/l	4,01	4,33	3,95	3,56	2,89	4,91	6	4	3	0
6.	Total Coli	jumlah / 100ml	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400				
7.	e Coli	Jumlah /100ml	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400				

Indikator terakhir untuk mengetahui kualitas lingkungan adalah tutupan lahan. Tutupan lahan adalah kenampakan material fisik permukaan bumi. Tutupan lahan menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Informasi tutupan lahan yang akurat merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja dari model-model ekosistem, hidrologi, dan atmosfer sehingga kualitas lingkungan dapat diukur dengan lebih akurat. Tutupan lahan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari luas lahan dengan kenampakan hutan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.45
Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang

No.	Nama DAS	Kawasan	Kekritisn Lahan (Ha)					Total
			Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	sangat Kritis	
	Capluk	Areal Penggunaan Lain	17,979.86	97.34	82.41	31.20	16.09	18,206.90
		Hutan Produksi	2,374.85	986.86	259.25	2.82	-	3,623.78
	Panggung	Areal Penggunaan Lain	2,679.69	-	-	-	-	2,679.69
	Jambangan	Areal Penggunaan Lain	1,464.50	-	-	-	-	1,464.50
	Kiringan	Areal Penggunaan Lain	1,395.35	-	-	-	-	1,395.35
	Lasem	Areal Penggunaan Lain	14,804.18	1,501.04	906.61	400.83	201.59	17,814.25
		Hutan Konservasi	-	7.63	-	-	-	7.63
		Hutan Lindung	38.43	37.85	324.55	109.89	-	510.72
		Hutan Produksi	1,571.51	1,426.28	293.02	36.27	6.51	3,333.59
		Hutan Produksi Terbatas	121.24	1,066.04	191.65	13.30	4.27	1,396.50
	Tasiksono	Areal Penggunaan Lain	1,104.33	102.94	769.94	131.05	46.29	2,154.55
		Hutan Lindung	-	-	36.66	21.56	24.05	82.27
	Bonang	Areal Penggunaan Lain	377.93	121.40	104.49	6.36	1.37	611.55
		Hutan Lindung	2.02	4.64	68.54	31.97	-	107.17
		Hutan Produksi	0.55	-	-	-	-	0.55
	Leran	Areal Penggunaan Lain	196.36	62.08	104.78	33.18	-	396.40
		Hutan Produksi	32.63	30.45	36.35	32.95	-	132.38
	Malang	Areal Penggunaan Lain	464.27	78.71	140.07	48.83	-	731.88

No.	Nama DAS	Kawasan	Kekritisian Lahan (Ha)					Total
			Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	sangat Kritis	
		Hutan Produksi	1.44	1.08	49.72	7.52	-	59.76
	Klادن	Areal Penggunaan Lain	568.86	8.38	600.16	146.08	-	1,323.48
		Hutan Lindung	13.05	-	305.01	74.07	-	392.13
		Hutan Produksi	-	-	0.71	-	-	0.71
	Sranduk	Areal Penggunaan Lain	92.75	65.73	265.51	93.56	-	517.55
		Hutan Lindung	-	-	0.05	-	-	0.05
	Randualas	Areal Penggunaan Lain	149.07	-	117.00	52.44	-	318.51
	Kepel	Areal Penggunaan Lain	285.69	-	229.64	211.21	-	726.54
		Hutan Lindung	11.81	-	136.99	8.83	-	157.63
	Kresak	Areal Penggunaan Lain	613.53	98.30	246.85	5.31	12.26	976.25
		Hutan Lindung	4.89	-	195.03	2.66	-	202.58
	Anyar	Areal Penggunaan Lain	752.93	30.57	20.67	12.70	4.42	821.29
	Kesambi	Areal Penggunaan Lain	11,433.45	1,616.36	971.12	220.15	26.68	14,267.76
		Hutan Lindung	92.98	259.80	665.51	47.42	-	1,065.71
		Hutan Produksi	1,486.93	963.49	18.13	81.46	-	2,550.01
		Hutan Produksi Terbatas	19.76	107.48	42.56	8.28	-	178.08
	Randugunting	Areal Penggunaan Lain	7,487.40	3.93	3.08	0.52	-	7,494.93
		Hutan Produksi	497.30	326.97	42.72	16.66	-	883.65
	Serang	Areal Penggunaan Lain	373.48	153.55	9.02	-	0.71	536.76
		Hutan Produksi	1,213.13	358.62	3.03	-	-	1,574.78
		Hutan Produksi Terbatas	235.29	147.27	6.37	-	1.10	390.03
	Temperak	Areal Penggunaan Lain	4,447.96	21.21	-	-	-	4,469.17
		Hutan Produksi	509.30	581.04	11.66	-	-	1,102.00
		Blank	-	-	-	-	-	-
	Solo	Areal Penggunaan Lain	719.32	544.32	3,227.20	416.98	-	4,907.82
		Hutan Konservasi	4.07	-	11.80	-	-	15.87
		Hutan Produksi	80.54	1,557.20	3,502.72	68.46	-	5,208.92
		Hutan Produksi Terbatas	3.64	16.65	430.99	40.85	-	492.13
	Total		75,706.27	12,385.21	14,431.57	2,415.37	345.34	105,283.76

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Rembang, 2018

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Pelayanan pencatatan sipil;
- 3) Pengumpulan data kependudukan;
- 4) Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kabupaten/ Kota;
- 5) Penyusunan profilkependudukan Kabupaten/Kota.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan di masyarakat, meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya adalah persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang kinerjanya justru mengalami mengalami tren menurun dengan capaian tahunan yang fluktuatif. Indikator kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, yakni dari 59,52% pada 2011 menjadi 81% pada tahun 2015. Kedua indikator tersebut

perkembangannya masih dibawah target yang termuat dalam SPM. Sedangkan indikator SPM lainnya yang telah mampu mencapai target 100% adalah kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kematian.

Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Capaian Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	68,25	89,20	87,52	94,00	98,40	98,24
2.	Persentase bayi ber-akte kelahiran (%)	97,92	94,25	96,45	95,6	97,91	98,45
3.	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	67,02	59,58	81	45,27	48,14	105
4.	Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim) (%)	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase kepemilikan kartu keluarga (%)	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Kepemilikan Akte Kematian (%)	100	100	100	100	100	100
7.	Informasi Administrasi Kependudukan (%)	51,07	71,70	85,50	95,50	99,00	99,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun, 2018

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi, seperti kemampuan untuk berusaha, mencari informasi, dan mengelola kegiatan. Perilaku masyarakat harus didorong agar mampu bekerjasama atau bergotong royong dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangan ke depan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dan kewenangan lokal skala desa, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini sebagian kewenangan Kabupaten akan diserahkan dan dilaksanakan oleh desa.

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2013–2018 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Jumlah Posyandu aktif sejak tahun 2013 sd. 2017 sebanyak 1.225 buah, namun pada tahun 2018 bertambah 8 posyandu menjadi 1.233 posyandu. Data Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Kondisi Saat Ini					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PKK aktif (Unit)	309	309	309	309	309	309
2.	Posyandu aktif (unit)	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.233
3.	Persentase Posyandu Purnama Dan Mandiri (%)	46,85	46,85	47,75	47,75	46,6	59,7
4.	% Lembaga Kemasyarakatan,	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Saat Ini					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Lembaga Adat yang telah diberdayakan (%)						
5.	% Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif(%)	100	100	100	100	100	100
6.	% swadaya masy thd program pemberdayaan masy (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masy (%)	100	100	100	85	85	85
8.	%kadesyg telah mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)	100	100	100	100	100	100
9.	Pembangunan kawasan pedesaan	0	0	1	1	1	2
10.	Badan kerjasama antar desa	13	13	13	13	13	19

Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang 2018

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Keluarga Berencana

Kabupaten Rembang dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk turut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. *Total Fertility Rate* Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukkan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya.

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Rembang telah mencapai 100% dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) tahun 2011 sebesar 8,01%, tahun 2015 menurun menjadi 6,93%. Perkembangan *unmet need* dari tahun 2011–2015, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Fluktuasi *unmet need* KB ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB khususnya MKJP serta PUS yang tidak ingin memiliki/menunda punya anak namun tidak ber-KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *unmet need* KB antara lain melalui optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan SDM PLKB, peningkatan kepesertaan KB Pria, dan kerjasama antar berbagai institusi.

2) Keluarga Sejahtera

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Rembang pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 55,96 persen, pada tahun 2014 sebesar 54,96 persen dan pada tahun 2015 sebesar 54,64 persen. Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013–2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Total fertility Rate (TFR)	1,86	1,86	2,07	2,05	2,07	2,07
2.	Rasio akseptor KB / 1000 PUS	833,6	827,48	825,23	837,05	841,11	800,2
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	100	100	100	100	120,89	123,04
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 th	3,14	3,46	3,68	3,22	1,56	1,55
5.	Cakupan PUSyg ingin ber-KB tdk terpenuhi (Unmet Need)	7,26	7,83	6,93	6,73	6,94	9,81
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 th) per	35	35	35	34	32	32

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1000 perempuan usia 15-19 tahun						
7.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	83,36	82,75	83,57	83,61	84,11	80,02
8.	Angka Drop out KB	12,32	14,19	13,62	12,08	8,72	7,27
9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100
10.	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	55,96	54,96	54,64	51,94	50,46	51,13
11.	Ratio PLKB / penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	4,32	4,39	4,52	4,98	4,98	6,12
12.	Ratio PPKBD	100	100	100	100	100	100
13.	% kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	100	100	100	100	100	100
14.	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKSyg berKB	91,99	92,21	91,12	91,64	92,47	90
15.	Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	91,96	91,97	92,12	89,89	89,56	100
16.	Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	13,81	15,25	16,61	17,96	19,65	20,81
17.	Cakupan Peserta KB Aktif Pria	1,25	1,14	1,14	1,14	1,21	1,11
18.	Cakupan Tribina	89,86	91,42	83,80			

Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Rembang Tahun 2018

i. Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan wilayah mempunyai arus lalu lintas yang cukup padat, dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan pesisir. Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Terminal angkutan penumpang
- 2) Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia di Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati No.551-4/0984/2016 terdiri dari tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Dari tujuh terminal tersebut ada dua terminal yang potensial ditingkatkan statusnya menjadi terminal tipe B maupun terminal tipe A sesuai dengan lokasinya yang berada di jalur arteri sehingga fungsinya dapat melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal yang potensial untuk ditingkatkan statusnya sesuai dengan rencana tat ruang wilayah adalah Terminal Rembang menjadi tipe A dan Terminal Lasem menjadi tipe B. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi

sesuai dengan peruntukannya, meskipun masih memerlukan perbaikan. Sejak tahun 2014 belum ada perbaikan yang cukup signifikan untuk merevitalisasi terminal tipe C. Perbaikan hanya berupa pemeliharaan rutin terminal sehingga kinerja terminal dari tahun 2014 tetap dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumpersari Kragan, Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususnya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truk yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengemudi angkutan barang.

Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Uraian	Tahun					keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik (%)	71,42	71,42	71,42	71,42	71,42	terminal tipe c dlm kondisi baik jml 5, dr 7 terminal tipe C
2	Persediaan Terminal Angkutan penumpang pd setiap kab/kota yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek	70	70	70	70	70	
3	peningkatan fasilitas parkir mobil barang	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
4	%sarpras perhubungan dlm kondisi baik	85	85				
5	jumlah angka kecelakaan di kabupaten rembang (kali)	418	408	470	456	391	data dari Satlantas
6	cakupan ketersediaan halte bus pada jaringan trayek	2	2	2	3	5	2018 tambah 2 unit
7	ketersediaan rambu rambu lalu lintas (%)	67	67	67	67	67	2015-2018 tdk ada penambahan
8	persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan						
	rambu (%)	67	67	67	67	67	2015-2018 tidak ada penambahan
	Marka(%)	63	65	6.3	23	11	terpasang/kebutuhan 10.000 *100 (2016-2018)
	guardrill (%)	35	35	35	35	11,6	terpasang/kebutuhan 1232 *100 (2016-2018)
	LPJU (%)	5	5	5	1.056	5.25	terpasang/kebutuhan 13350 *100 (2016-2018)
	APPIL (%)	19	36	34,7	37,1	42,9	satuan unit Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (IPPL)

No	Uraian	Tahun					keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
9	kelas akreditasi dari tempat uji sesuai SPM	n.a	n.a	n.a	C	C	
10	tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jln untuk aringan jalan kab/kota (unit)	925	1014	1014	1102	1105	
11	ml orang mll terminal/th/org	2.156.071	2.308.680		897.944	875.143	
12	rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 1 th)	64	68	61	69	0	Pindah ke DPMPSTSP naker 2018
13	Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji (unit)	6436	6936	7705	8290	8903	
14	jumlah kendaraan yang telah melakukan uji (unit)	10616	11616	8196	9779	7864	
15	waktu pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	90	90	55	55	55	
16	biaya pengujian kelayakan angkutan umum	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.001	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.002	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.003	Perda No 6 2010, ganti tanda uji berkala Rp 5.000, ganti buku/ dokumen lain uji berkala Rp 8.500, ganti label pemeriksaan emisi gas buang/ uji asap Rp 4.000, stiker samping Rp 12.000
17	% kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) (%)	90	98	90	95	98	
18	% kendaraan umum yg berada dalam kondisi laik jalan (%)	94	94	99	98	99	

Sumber: Dishub Kabupaten Rembang Tahun 2018

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu tahun 2014-2018 mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.50
Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Indikator kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1	pelanggaran ijin trayek (kasus)	33	33	16	1	2
2	pelanggaran uji (kasus)	58	58	38	16	7
3	pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya (kss)	0	0	3	3	1
4	kendaraan bermotor wajib uji (unit)	6.436	6.936	7705	8290	8903
5	kendaraan bermotor yang di uji (unit)	10.616	11.616	8196	9779	7864
6	jumlah angkutan darat (unit)	925	1014	1014	1102	1105
7	Jml penumpang angkutan darat (orang)	2.156.071	2.156.071		897.944	875.143

Sumber: Dinhub Kabupaten Rembang, 2018

Kondisi pelayanan perhubungan terkendala dengan fasilitas alat uji yang masih menggunakan sistem analog. Mulai tahun 2018 sudah mulai dilakukan modifikasi alat uji dari sistem analog menjadi sistem digital sehingga mengurangi *human error* pada proses pengujian. Kedepan untuk meningkatkan akreditasi tempat uji perlu ditingkatkan penggunaan teknologi digital sesuai dengan standar yang diperlukan. Termasuk dalam upaya pemantauan lalu lintas mengingat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, ke depan akan dikembangkan *automated traffic control system*. Sementara itu, perkembangan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2018 diantaranya dapat diketahui dari proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 1.102 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 875.143 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2014-2018. Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang
Tahun 2014–2018

No	Fasilitas Perhubungan	2014	2015	2016	2017	2018	Keterangan
1	Rambu 60 x60 cm	40	40	40	40	40	
2	Rambu 90 x90 cm	90	90	90	90	90	
3	Rambu model F	14	14	14	14	14	
4	RPPJ kecil 1 muka	48	48	48	48	48	
5	RPPJ besar 1 muka	4	4	4	4	4	
6	RPPJ besar 2 muka	1	1	1	1	1	
7	Warning Light Pijar	13	19	0	0	0	Ganti LED
8	Warning Light LED	11	11	0	0	6	
9	Traffic Light Pijar	3	3	0	0	0	
10	Traffic Light LED	1	1	0	1	1	
11	Guardrail (m)	140	140	0	0	144	
12	LPJU LED	62	62	3497	141	702	2016 dari ESDM
13	LPJU Solar Cell	12	12	0	0	0	
14	Marka (m ²)	660	234	689	2300	1100	Zebra Cross & marka lkeg
15	Zebra Cross	2	2	0	0	0	
16	Shelter	2	2	2	1	2	
17	Paku Jalan	282	282	0	0	0	blm pernah pngadan

Sumber: Dinhub Kabupaten Rembang, 2018

Program rekatifikasi kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang telah tertampung dalam revisi Peraturan Menteri Nomor : 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, saat ini revisi tersebut masih dalam proses penetapan. Rencana pembangunan trase Kudus – Pati Rembang diperkirakan antara tahun 2021-2030 sedangkan untuk trase Cepu – Rembang diperkirakan antara tahun 2025-2030. Rencana reaktifasi kereta api yang merupakan program strategis pemerintah pusat akan memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk dalam tataran transportasi lokal (Tatralok). Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian trayek angkutan dengan stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten Rembang sehingga seluruh angkutan penumpang dan barang dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan baik.

Pelabuhan Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berada di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, yang secara keruangan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada Kawasan Sentra Perikanan Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Pelabuhan Pengumpul. Sedangkan Pelabuhan Tasik Agung Rembang walaupun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional hierarkinya sebagai pengumpan regional, namun kondisinya lebih layak sebagai pelabuhan perikanan pantai. Pelabuhan tersebut sudah tidak dapat dikembangkan menjadi pelabuhan umum sehingga diarahkan sebagai pelabuhan perikanan pantai. Sedangkan Pelabuhan Rembang, mengingat berada pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya), pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkan melalui pembangunan terminal Sluke sebagai pelabuhan pengumpan yang kedepan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan Republik Indonesia diarahkan sebagai Pelabuhan Pengumpul.

Pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan dapat menjadi pemicu bagipertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan hinterland Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antara lain:

- 1) Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan pengolahan produk pertanian.
- 2) Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor impor.
- 3) Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
- 4) Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang.

j. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah daerah dalam pelayanan urusan komunikasi dan informatika memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Rembang yakni *rembangkab.go.id* sebagai media untuk terjalannya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang. Selain website resmi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagian besar perangkat daerah bahkan sampai level Kecamatan telah memiliki website. Hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana SDM yang ada di Perangkat Daerah mampu mengelola dan memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan informasi pembangunan yang dilaksanakan dan juga mampu menyediakan data-data yang valid yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten/Kota. Adapun indikator dalam SPM tersebut adalah:

- 1) Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:
 - a) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
 - b) Media baru seperti website (media online);
 - c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau
 - e) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho.
- 2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Semua indikator SPM yang targetnya harus dicapai oleh Kabupaten Rembang sampai saat ini belum terdata dengan baik. Perkembangan Pelayann Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah jaringan komunikasi	29	29	58	62	62	165
2.	Jumlah penyiaran radio	13	13	13	14	14	14
3.	Cakupan layanan SST	5.450	5.500	5.500	6.500	5.000	5.000
4.	Jumlah aplikasi e-goverment di lingkup pemda kab/kota	14	15	20	20	20	22
5.	% PD telah memiliki website (%)	86,97	86,97	86,97	100	100	100
6.	Cakupan pengembangan & pemberdayaan klp informasi masy di tk kec	21	21	22	21	21	21
7.	Jml Pelaksanaan Diseminasi & Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
	Media massa(majalah,radio, teve);	2	2	2	2	2	2
	Media baru spt website (media online);	na	Na	11	1	1	1
	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	1	1	1	1	1	1
	Media interpersonal spt sarasehan, ceramah & lokakarya; Media luar ruang spt media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, & baliho.	1	1	1	-	-	-
		2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2018

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan

penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM.

Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan usaha dan kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Kreativitas menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak hanya pada lingkungan internal tetapi juga bersaing dengan skala lebih luas. Untuk maju, koperasi harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Bekerjasama dengan mitra baik lokal, regional maupun mitra berskala internasional harus dilakukan untuk membawa koperasi terus berkembang. Terdapat empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi, diantaranya (1) sumber daya koperasi baik SDM maupun permodalannya, (2) sarana dan prasarananya (3) peran terhadap lingkungan, dan dampak positifnya baik masyarakat maupun anggota sendiri (4) adanya program strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut :

Tabel 2.53
Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM
di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml UMKM (unit)	33.900	39.363	39.363	39.173	39.632	39.830
2.	Jml LKM koperasi dan UKM (uniT)	84	275	279	284	286	289
3.	jml UMKM yg tlh mengikuti pameran promosi produk (unit)	4	5	6	NA	NA	NA
4.	% koperasi aktif (%)	78,68	78,68	79,00	53,34	90,28	90,40
5.	% KSP/USP koperasi sehat (%)	31,80	32,00	35,00	22,60	67,57	69,59
6.	Cakupan bina kelompok UMKM	1.695	1.968	1.972	1.152	1.162	1.165
7.	Jml Wirausaha Baru (buah)	7.733	5.463	5.112	140	312	198

Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tabel diatas, capaian semua indikatorurusan koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 cenderung meningkat, hanya 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan, yakni Jumlah wirausaha baru pada Tahun 2017 sebesar 312 buah, di Tahun 2018 hanya 198 buah, capaian yang kecil tidak menunjukkan kinerja yang buruk, karena jika dihitung total jumlah wirausaha baru dari Tahun 2013 berjumlah 18.958 buah.

1. Penanaman Modal Daerah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem OSS (Online Single Submission). Sejak pertengahan April Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan inovasi dengan menindaklanjuti menerapkan sistem OSS untuk pelayanan perijinan. Sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi. Dengan OSS, Pemerintah memberi kemudahan bagi investor dalam mengurus usahanya, cukup memilih salah satu PTSP pusat atau daerah. Sebab, dalam sistem ini sudah ada kesatuan antara PTSP pusat dan daerah, ada standar perizinan yang sama untuk

semua daerah, serta tidak ada lagi duplikasi perizinan, dalam satu kegiatan usaha tidak perlu ada lebih izin bisa diurus di satu instansi, baik itu daerah maupun pusat.

Jumlah investasi proyek PMA/PMDN di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 investasi PMA/PMDN sebesar 7,173T, mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya 2017 sebesar 5,722 T. Dengan semakin meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten Rembang, memberikan *multiplier effect* kepada penyerapan jumlah tenaga kerja. Dimana jumlah tenaga yang terserap pada tahun 2017 sebesar 7.016 orang, mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.910 orang pada tahun 2018. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2018 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil invstasi	1 profil investasi
2	Terselenggaranya fasilitasi pemdadm rangka kerjasama kemitraan	3	3	3	1	2	0
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kab	3	3	3	3	4	2
4	Terselenggara sosialssi kebijakn penanman modal kpdmasy dunia usaha.	3	3	3	9	9	1
5	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10	10	20	28	41	78
6	Nilai investasi	673,7 M	646,8 M	3,478 T	5,172 T	5,28 T	7,71 T
7	Terslenggaranya yan perijinan & nonperijinan bid pennamn modal mllyan Terpadu Satu Pintudi bid Penanaman Modal.	100	100	100	100	100	100
8	Terselenggaranya bim pelksanan Keg Penanman Modal kpd masyarakat dunia usaha (%)	100	100	100	100	100	100
9	Sistem Pelayanan Informasi & Investasi scr Elektronik (SPIPISE) (%)	100	100	100	100	100	100
10	% kerjasama dibidang penanaman modal yg terlaksana (%)	18,51	18,51	37,03	50	90	90
11	% PMA/PMDN diKab Rembang yg taat aturan (%)	40	60	65	55	82,79	82,79
12	Tenaga kerja lokal yang terserap pada penanaman modal (orang)	1.763	2.672	7.742	7.784	7.016	10.910
13	% pengaduan yan perijinan & investasi yg ditindaklanjuti(%)	95	95	95	100	100	100

Sumber: DPMPSTSPNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2018

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan mampu berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan. Selama kurun tahun 2011-2015 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang relatif tetap yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan Pemuda Nusantara namun ada peningkatan pada Karang Taruna dan PPMI. Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	KNPI	1	1	1	1	1	1
2.	AMPI	1	1	1	1	1	1
3.	Pemuda Ansor	1	1	1	1	1	1
4.	Pemuda Muhammadiyah	1	1	1	1	1	1
5.	Pramuka	1	1	1	1	1	1
6.	KUPP/KWP (klp Wirausaha Pemuda)	22	22	22	22	22	22
7.	KOSGORO	1	1	1	1	1	1
8.	Rembang Bangkit Foundontion	1	1	1	1	1	1
9.	Gerakan Pemuda Nusantara	1	1	1	1	1	1
10.	Puma Prakarya Muda Indonesia	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	31	31	31	31	31	31

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang Tahun 2018

Di bidang keolahragaan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Rembang dalam even di tingkat karesidenan, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tahun 2018, medali di even tingkat Karesidenan mendapatkan 187 medali, sedangkan di even tingkat Provinsi mendapatkan 46 medali. Untuk tingkat nasional, kontingen dari Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan medali.

Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya untuk berbagai aktifitas olah raga; Sepak Bola, Basket, Volley, Bulu Tangkis dan Renang, sedangkan GOR dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serbaguna. Adapun perkembangan jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga
di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah (unit)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lapangan Sepak Bola	252	252	252	252	252	252
2	Lapangan Basket	46	46	46	46	47	47
3	Lapangan Volley	276	276	276	322	322	324
4	Lapangan Bulu Tangkis	38	38	38	38	38	38
5	Kolam Renang	2	2	2	2	2	2
6	Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna	19	19	19	19	19	19

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, 2018

Selanjutnya Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.57
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pemuda (orang)	149.408	138.863	150.955		
2	Jml anggta pasukan paskibraka (org)	76	76	76	76	76

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jumlah peserta TUB BB (orang)	20	20	20	20	20
4.	Jmlpst Jambre Pemda Indonesia (org)	14	14	14	14	14
5.	Jml peserta kemah bakti (kontingen)	14	14	14	14	24
6.	Jml pemuda pelopor yg berprestasi di Tingkat provinsi (org)	7	8	10		
7.	Jml Kewirausahaan pemuda yg mandiri (Usaha)	22	22	22	22	22
8.	Jml OKP (organisasi Kepemudaan)	31	31	31	31	31
9.	Jml kasus narkoba di kab Rembang (kss)	1	4	6	19	15
10.	Jml tenaga pelatih yg terlatih (orang)	30	30	30	30	30
	Jml atlet yg terlatih (orang)	30	30	30	30	30
	Jml pengurus cabor yg terlatih (org)	7	10	10	10	10
11	Jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda Kab (Atlet)	-	-	200	226	-
	jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tkt Karesidenan (Atlet)	70	59	64	-	-
	jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tingkat Provinsi (Atlet)	15	16	60	-	-
12	Jml club olahraga di tingkat pelajar	169	171	179	-	-
	Jml club olahraga di tk mahasiswa (club)	2	2	3		
	Jml club olahraga di masy (Club)	469	472	485		
13	Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk Karesidenan	0	130	130		
	Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk provinsi	27	32	35		
	Jml atlet yg menerima penghargaan di tk nasional	1	2	5		
14	Jml lapangang olahraga milik Pemerintah Kabupaten Rembang	4	4	4	4	4
15	Jml gelanggang olahraga milik pemerintah kabupaten Rembang	3	3	3	3	3

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, Tahun 2017

n. Statistik

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional, oleh sebab itu, ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Pasal 5 Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1)statistik dasar; (2)statistik sektoral dan; (3)statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan

statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Produk berupa buku statistik yang telah dihasilkan dan dipublikasikan selama kurun waktu 2013–2017 antara lain adalah Rembang Dalam Angka (setiap tahun); Buku PDRB (setiap tahun); Kecamatan Dalam Angka; NTP; Profil Kependudukan, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Profil Ketenagakerjaan

o. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten/daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah untuk Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini pemanfaatan persandian di Kabupaten Rembang baru sebatas pada pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

p. Kebudayaan

Kabupaten Rembang berada pada daerah pesisir dengan panjang pantai sekitar 65 km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Rembang banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah pesisir.

Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek - Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang.

Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebanyak 252 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH (KELOMPOK)
1.	Kelompok Sanggar Seni Tari	12
2.	Musik tradisional	104
3.	Sanggar Seni Lukis	5
4.	Teater Tradisional	19
5.	Tari Tradisional/tayub	5
6.	Musik Modern	92
7.	Barongan	5
8.	Wayang Kulit	10

Sumber : DINBUDPAR Kabupaten Rembang, 2018

Pada tahun 2018Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah musik tradisional sebanyak 104 kelompok. Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni tersebut

secara keseluruhan masih belum maksimal dan ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya masih terbatas.

Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2013-2018 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.59
Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml kegiatan penyelenggaraan seni tradisi & budaya (keg)	16	16	18	9	9	10
2	Jmlklp kesnian trdisional (klp)	285	311	311	134	137	137
3	Jml cagar budaya yg dilestarikan (cagar budaya)	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah Cagar budaya	47	47	47	47	47	107
5	Jumlah seniman (orang)	1.243	1.251	1.252	3.034	3.034	3.039
6	Jumlah jenis seni tradisi yang dilestarikan (kesenian)	18	18	18	20	20	11
7	Jumlah Museum	1	1	3	1	1	1
8	Jumlah Sanggar Budaya	2	2	2	1	1	1
9	Jml organisasi penghayat kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi)	13	13	13	11	11	10

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Rembang tahun 2018

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Kecamatan	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reog	Tayuban	Lain-lain
Sumber	3	3	1	1	1
Bulu	2	2	-	-	1
Gunem	-	1	3	-	-
Sale	1	1	1	-	-
Sarang	-	1	-	-	1
Sedan	-	-	-	-	-
Pamotan	1	1	-	-	-
Sulang	2	3	-	-	-
Kaliori	3	3	-	-	1
Rembang	2	5	-	-	1
Pancur	5	-	-	-	-
Kragan	1	2	-	-	-
Sluke	1	1	1	-	-
Lasem	5	3	1	-	1
2018	26	26	7	2	6
2017	23	23	5	2	-
2016	23	23	5	2	-
2015	23	23	5	2	-
2014	20	20	12	9	11

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Rembang Tahun 2018

q. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi

antara lain, (1) menyimpan koleksi (informasi), (2) menyediakan informasi bagi masyarakat, (3) sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non formal, (4) mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan (5) menjadi tempat untuk rekreasi.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir terutama dialami pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa sebesar 59 meningkat menjadi 65 pada tahun 2017. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan fluktuatif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 16.563 orang pengunjung menjadi 22.120 orang pengunjung di Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya minat baca pada masyarakat Kabupaten Rembang. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2013 sebesar 25.401 eksemplar meningkat menjadi sebesar 43.004 eksemplar pada tahun 2018.

Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan handphone maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet.

Perkembangan pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml perpustakaan						
	-Daerah (unit)	1	1	1	1	1	1
	-Kecamatan (unit)	1	1	2	2	3	14
	-Desa (unit)	59	61	61	61	65	94
	-Masyarakat (unit)	17	19	21	30	40	45
	-Keliling (unit)	1	1	1	1	1	1
2.	% gedung perpustakaan dlm kondisi baik (%)	76,92	76,83	82,35	82,53	82,85	82,85
3.	Angka kunjungan perpustakaan/th (org)	16.563	16.672	16.819	21.813	22.120	24,456
4.	Cakupan naskah kuno yg dilstarikan (naskah)	237	270	270	275	277	278
5.	Jml Koleksi buku yg tersedia di perpusda (buku)	25.401	26.582	30.182	34.697	41.045	43,004

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang tahun 2018

r. Kearsipan

Di Kabupaten Rembang, pelaksanaan urusan kearsipan masih sangat kurang. Arsip yang ada, harus dialihmediakan supaya mempermudah pengguna dan juga berfungsi sebagai *back up* data. Dalam pengelolaan dan

penanganan arsip mempunyai tenaga arsiparis yang memiliki kompetensi hanya memiliki 2 arsiparis. sarana dan prasarana kearsipan cukup baik. Dari keseluruhan peralatan kearsipan 80% dalam kondisi baik, begitu pula jumlah gedung dan jumlah ruangan sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya

Dalam hal pengelolaan, pengelolaan arsip secara baku baru dilakukan 53,4% pada tahun 2018. Pengelolaan arsip juga dilakukan secara menyeluruh sampai pada tingkat desa/kelurahan. Terkait dengan persentase, sampai pada tahun 2018, tercatat ada 82% desa/kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku.

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	% arsip yang dialih mediakan (%)	9 %	10 %	15 %	20%	25%	30%
2.	Persentase arsip yang dimusnahkan (%)	2,3	2,4	2,5	30%	40%	50%
3.	Jml arsiparis yang memiliki kompetensi	2	2	2	2	2	2
4.	Jumlah pengguna arsip (PD)	32	34	34			
5.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	29,7	29,7	31,9	38,29	46,3%	53,4%
6.	Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%)	13	14,5	15	16	17	18
7.	Persentase Desa/Kelur yg telah mengelola arsip secara baku (%)	32,7	43,5	52	54	70	82
8.	% sarpras kearsipan dlm kondisi baik						
	Gedung (%)	60	65	70	70	80	80
	Ruangan (%)	60	65	70	70	80	90
	Peralatan (%)	45	50	60	60	70	80

Keterangan: PD = Perangkat Daerah

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya belum dimanfaatkan secara optimal baik budidaya perikanan darat maupun budidaya perikanan laut, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk pengembangan perikanan budidaya tersebut. Perikananbudidaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun potensi perikanan budidaya darat meliputi budidaya air tawar dan air payau. Namun demikian budidaya perikanan air laut secara geografis kurang memungkinkan karena berada pada Laut Jawa dan bukan merupakan wilayah kepulauan dengan air tenang. Salah satu yang menjadi komoditas unggulan budidaya air payau adalah bandeng dan udang vaname, sedangkan komoditas air tawar adalah lele, nila, wader. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rembang mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya dari 2013-2018 dengan produksi pada tahun 2018 adalah 5.519.057 kg walaupun mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1.714.023 kg, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2017 yakni sebesar 6.318.110 kg.

b. Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang, mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 2013–2018, pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebesar 42.452.505 kg. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 65.523.652 kg, tetapi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 36.243.036 kg. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cuaca yang tidak mendukung, yakni sering adanya ombak yang tinggi, serta kebijakan pelarangan nelayan cantrang untuk melaut, hal tersebut berpengaruh besar pada hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang.

TPI yang terdapat di Kabupaten Rembang tersebar di berbagai desa yaitu Tunggulsari, Tanjungsari, Tasikagung I, Tasikagung II, Pasar Banggi, Pangkalan, Pandangan, Karanglincak, Karanganyar, dan Sarang.

c. Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kabupaten Rembang memiliki potensi hasil kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik dari hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Dapat ditunjukkan dengan produksi hasil olahan ikan beberapa tahun terakhir (2013-2018) yang sangat besar yaitu pada tahun 2013 sebanyak 210.180.200 kg walaupun mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebanyak 193.908.500 kg, kemudian mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2018 sebesar 193.908.600 kg.

Jumlah pedagang (bakul) ikan di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama beberapa tahun terakhir (2013-2018) mengalami peningkatan, pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.049 orang menjadi 1.570 orang pada tahun 2017 dan 2018. Peningkatan jumlah bakul ikan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Dimana konsumsi perkapita Kabupaten Rembang 29 kg/kapita/tahun, masih di bawah target nasional yaitu 35 kg per kapita per tahun. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan budidaya (kg)	1.714.023	4.017.500	7.477.000	7.190.232	6.318.110	5.519.057
2	Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan (Rupiah/bulan)	2.002.864	11.152.686	23.703.783	23.514.295	20.242.123	17.629.829
3	tk Cakupan binan klp pmbudidaya ikan(%)	32	32	32	33	33	34
	tk Cakupnbinaan klp pembedidaya ikan (klp)	127	134	141	142	142	146
4	tk Ckupan bantuan klp pembudidaya ikan(%)	37	38	41	42	43	44
	tk Ckupan bantuan klp pembudidaya ikan (Kelompok)	15	14	14	15	15	17
5	jml usaha pngolhn ikan (unit)	2.779	2.762	2.769	2.749	2.740	2.740
6	jml produksi hsl olahan ikan (kg)	210.180.200	210.024.000	212.035.000	203.957.400	193.908,500	193.908,600

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Produksi perikanan tangkap (kg)	57.369.913	60.772.646	60.904.207	65.523.652	36.243.036	42.452.505
8.	Rata-2 pendapatan nelayan (rp/bln)	1.618.892	1.593.728	1.657.150	1.627.373	1.375.931	1.357.307
9.	Cakupan klp nelayan yg dibina (%)	62	66	68	71	71	74
	Ckupan klp nelayn yg dibina (klp)	22	23	24	25	25	26
10.	tk cakupn bantuan klp tngkp ikan (%)	62	66	68	71	71	74
	tk ckupan bantuan klp tngkp ikan (klp)	22	23	24	25	25	26
11.	Cakupan TPI dlm kondisi baik (unit)	10	10	10	10	10	10

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae. Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan

d. Usaha Garam Rakyat

Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliore, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Adapun Perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:.

Tabel 2.64
Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Tahun	Luas lhn Produksi (Ha)	Jml Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
			Pemilik	Pekerja		
1.	2013	1.584,42	1.058	4.120	107.121,1	32.136.327,-
2.	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,1	57.480.253,-
3.	2015	1.568,66	1.088	4.212	219.477,5	65.843.250,-
4.	2016	1.564,66	1.239	1.850	1.464,40	1.225.330,-
5.	2017	1.579,89	1.144	3.160	93.490,56	161.592.370,-
6.	2018	1.573,90	1.144	3.160	165.467	285.999.162,-

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, tetapi perkembangan di tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan jumlah produksi di tahun 2018 dikarenakan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator), harga garam juga mengalami peningkatan, sehingga nilai produksi di Tahun 2018 mencapai Rp. 286 M. Pemerintah harus mencari solusi produksi garam rakyat agar tidak terpengaruh musim sehingga produksi garam tetap bisa dilaksanakan walaupun pada musim hujan.

e. Pariwisata

Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang beragam, diantaranya yaitu wisata religi, wisata budaya dan wisata alam. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Rembang tercatat sejumlah 8 buah obyek wisata unggulan, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Pantai Pasir Putih Wates, Pantai Karangjahe, Pantai Binangun, Pasujudan Sunan Bonang, dan Old Town Heritage.

Kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tren peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.270.268 orang dan menjadi 1.460.808 orang pada tahun 2017 lalu kembali meningkat menjadi 1.810.369 di Tahun 2018. Tujuan wisata bagi wisatawan adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini. Naiknya kunjungan wisata pada tahun terakhir dikarenakan semakin banyaknya obyek wisata baru yang dikelola desa dan semakin berkembang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.459.662.385,00 Dengan pendapatan sebesar itu memberikan kontribusi sebesar 2,12% terhadap PAD tahun 2018.

Terdapat sejumlah kewenangan urusan pariwisata yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota ; (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Pengembangan kepariwisataan semakin penting karena memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan pusat perekonomian. Secara rinci Perkembangan Urusan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Perkembangan Urusan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Total Kunjungan Wisman & Wisnus (orang)	2.345.107	993.363	727.453	1.270.268	1.460.808	1.810.369
2.	Persentase obyek wisata yg dipromosikan (%)	4	5	5	13,3	14,3	18,1
3.	Rata-rata lama menginap (hari)	1	1	1	1,28	1,21	1,3
4.	Dokumen RIPARDA kab Rembang (dokumen)	1	1	1	1	1	2
5.	Jumlah obyek wisata unggulan (obyek)	3	3	3	3	3	3
6.	jumlah restoran (unit)	25	25	29	29	29	29
7.	Jumlah hotel Berbintang & Non bintang (unit)	19	20	21	21	21	22
8.	Persentase pramuwisata bersertifikat						
	Muda (%)	4	4	4	na	na	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Perkembangan total kunjungan wisman dan wisnus pada tahun 2013 s/d 2018 mengalami kenaikan secara drastis karena mulai bermunculan obyek-obyek wisata desa sesuai potensi yang dimiliki dan seringnyadigelar

acara-acara hiburan di obyek wisata sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Destinasi pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat desa, belum dikenai retribusi kecuali biaya parkir dan pengelolaannya masih bersifat tradisional.

f. Pertanian

Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 28,63% atau seluas 29.021 hektar, lahan bukan sawah sebesar 51,85% atau seluas 52.561 hektar dan lahan bukan pertanian sebesar 19,52% atau seluas 19.826 hektar. Lahan sawah masih terbagi menjadi 28,12% atau seluas 8.160 Ha untuk lahan sawah irigasi dan 71,88% atau 20.861 Ha untuk sawah tadah hujan. Daya dukung pertanian di Kabupaten Rembang salah satunya adalah adanya aliran sungai. Sampai saat ini sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Wilayah yang masuk pada daerah irigasi pertanian terdapat 25 daerah irigasi.

Pada tahun 2018, luas lahan pertanian yang teraliri irigasi adalah 16.935 Ha dan telah memiliki embung sejumlah 194 embung meningkat dari Tahun 2016 sebesar 189 embung. Hal ini dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Rembang disebabkan wilayah Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan intensitas curah hujan rendah. Apabila dikaitkan dengan target LP2B Kabupaten Rembang seluas 37.339 Ha maka luasan sawah beririgasi tersebut baru mencapai 45,35 % dari target LP2B. Mengingat kondisi air di Kabupaten Rembang yang masih mengandalkan curah hujan maka target LP2B tersebut sangat sulit terwujud.

Hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rembang meliputi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, dan komoditas perkebunan utama. Tanaman pangan utama terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi tanaman utama jenis padi pada tahun 2018 sebesar 220.440 ton, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2017 sebesar 240.374ton. Produksi jagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2017sebesar 143.692ton menjadi sebesar 110.912 ton pada tahun 2018. Sementara dalam periode yang sama produksi kedelai juga mengalami fluktuasi, tatapi produksi kedelai di Tahun terakhir yakni tahun 2018 lebih tinggi sebesar 2.684 ton dari tahun 2017 sebesar 2.039 ton. Walaupun perkembangan terakhir meningkat, tetapi capaian produksi kedelai di tahun 2017 masih rendah dibawah capaian produksi tahun 2015 sebesar 3.544 ton, tahun 2014 sebesar 5.570 ton dan tahun 2013 sebesar 4.972.

Jenis tanaman hortikultura meliputi bawang merah, cabe besar, nanas, mangga dan durian. Produksi tanaman hortikultura didominasi oleh jenis buah mangga dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 512.710 kwintal dan cabe yang mencapai 79.693 kwintal. Produksi hasil perkebunan terdiri dari tebu, tembakau dan kelapa dalam. Dari hasil perkebunan, produksi paling tinggi dihasilkan dari tebu yang mencapai 31.388 ton pada tahun 2018. Data perkembangan produksi pertanian/perkebunan Tahun 2013-2018 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66

Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Tahun	Jenis Komoditas		
	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)
2018	220.444	110.912	2.684

Tahun	Jenis Komoditas		
	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)
2017	240.374	143.692	2.039
2016	152.822	119.348	1.620
2015	256.211	111.145	3.544
2014	183.002	128.389	5.570
2013	227.890	124.214	4.972

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018

Tabel 2.67
Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

Tahun	Jenis Komoditas		
	Bawang Merah (Kw)	Cabe (Kw)	Mangga (Kw)
2018	13.719	79.693	512.710
2017	20.654	156.061	874.177
2016	18.803	58.567	1.136.034
2015	25.378	265.172	661.802
2014	12.838	121.951	1.244.061
2013	7.658	28.138	1.036.686

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018

Tabel 2.68
Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten Rembang
Tahun 2013- 2018

Kecamatan	Jenis Komoditas		
	Tebu Gula Kristal (Ton)	Tembakau (Ton)	Kelapa (Ton)
2018	31.388	14.032	4.207,18
2017	28.778	6.763	3.659
2016	29.648	5.100	4.214
2015	28.816	2.804	4.039
2014	27.444	3.000	4.012
2013	29.400	2.365	4.012

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan hasil jual pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran produk pertanian di Kabupaten Rembang dilakukan melalui promosi produk. Tercatat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, promosi produk pertanian/perkebunan dilakukan 3 kali setiap tahunnya, tetapi di tahun 2016, 2017 dan 2018 pelaksanaan promosi hasil pertanian dan perkebunan dilaksanakan 4 empat event (di Kabupaten Rembang sendiri dan event di kabupaten sekitar maupun di tingkat Provinsi/ Nasional. Sedangkan untuk promosi produk peternakan dilaksanakan 2 kali setiap tahun pada tahun 2017 dan 2018. Perkembangan Upaya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.69
Perkembangan Proosi Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Promosi hasil produksi pertanian/ perkebunan	3	3	3	4	4	4
2	Promosi produk peternakan (event)	1	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Peningkatan produksi pertanian juga dilaksanakan melalui pembinaan kelompok tani dan penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian, Alat

mesin pertanian di tahun 2016 bertambah sangat banyak sejumlah 12.331 alat, karena ada pengadaan mesin perontok padi manual, dibandingkan dengan pengadaan alat pertanian di tahun 2015 hanya sejumlah 220 alat mesin. Sedangkan di tahun terakhir (2017) pengadaan alat mesin pertanian oleh dintanpan berjumlah 724 alat.

Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut:

Tabel 2.70
Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,06	4,61	6,10	4,02	4,47	5,51
2.	Bertambahnya plk usaha pertanian, perkebunan, peternakan (plk usaha)	113	115	158	560	632	648
3.	Peningkatan luas lahan pertanian yang teraliri Irigasi (Ha)	3.910	1.850	5.500	15.865	18.815	16.935
4.	Bertambahnya alat mesin pertanian tuk kelompok tani (Unit)		107	220	12.331	724	
5.	Bertambahnya jalan pertanian dalam kondisi baik (Km)	30	60	28	38,74	54,82	50,48

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2019

1) Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Rembang yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi sawah, jagung dan kedelai dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018) menunjukkan angka yang berfluktuasi. Sedangkan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama kurun waktu 2013-2018. Produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kacang tanah (ton)	5.783	3.234	2.303	1.672	1.442	530
2	Kacang hijau (ton)	3.619	2.977	2.238	1.393	924	1.005
3	Ubi kayu (ton)	89.558	129.330	106.296	116.272	97.152	43.383
4	Ubi jalar (ton)	5.836	6.569	2.219	1.480	3.138	1.051

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

2) Perkebunan

Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Rembang. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangan cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Rembang. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain Tebu, Kelapa, Wijen dan Mete. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tebu (ton)	40.624	40.897	41.039	44.055	43.778,4	45.420
2	Kelapa (ton)	4.012	4.021	4.039	4.213,98	3.658,96	4.207,18

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Wijen (ton)	45,90	48,98	49,23	35	45	37,66
4	Mete (ton)	108,26	109,75	112,28	398,79	190,36	190,34

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

3) Peternakan

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di masing-masing daerah. Peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Rembang masih terbuka lebar apabila dikaitkan dengan perkiraan (estimasi) peningkatan kebutuhan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan taraf hidup masyarakat.

Jenis ternak di Kabupaten Rembang terdiri dari Sapi potong, Kuda, Kambing, Domba, Babi dan Kelinci. Populasi Komoditas peternakan selama lima tahun terakhir (2013-2018) mengalami fluktuasi. Jenis ternak yang mengalami kenaikan dari tahun 2013-2018 yaitu sapi potong. Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, populasi sapi potong pada tahun 2018 mencapai 134.602 ekor dan menempati urutan keempat diJateng.

Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Populasi komoditas peternakan utama (ekor)						
	- Sapi potong	117.179	120.934	128.123	130.610	132.388	134.602
	- Kambing	144.290	150.062	158.990	162.091	161.794	163.894
	- Domba	120.386	123.999	156.725	157.771	157.680	160.368
2.	produksi daging (kg)						
	- Sapi	1.189.020	1.215.270	917.007	864.415	777.031	700.990
	- Kambing	133.035	135.585	146.433	171.310	169.805	169.573
	- Domba	57.015	58.560	76.832	83.946	110.512	92.554
3.	Jumlah produksi Telur						
	- Ayam (kg)	606.656	618.780	1.468.689	552.969	990.444	1.147.650
	- Itik (kg)	894.717	914.784	855.849	910.659	893.628	893.628

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

g. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebesar 13,5%, dan merupakan kontributor terbesar ke 3, setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013–2017, yaitu 13,85% (tahun 2013), dan 13,83% (tahun 2014 dan 2015), 13,5% (tahun 2016 dan 2017). Walaupun nilai ekspor yang semakin naik dari tahun ke tahun tapi belum mampu menaikkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Nilai ekspor Kabupaten Rembang selama kurun waktu lima tahun 2013–2017, yaitu sebesar \$12.205.493,30 (tahun 2013), meningkat menjadi \$48.785.451,29 (tahun 2017). Disamping itu ketersediaan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari beberapa indikator sektor perdagangan menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2013–2018.

Adapun perkembangan sektor perdagangan tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.74
Perkembangan Sektor Perdagangan Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml sidang tera ulang (kss)	39	44	44	72	77	80
2	Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi (unit)	47	52	52	60	65	68
3	%kssyg diselesaikan mllunit yan pngduan konsumen (%)	NA	2	2	4	4	5
4	Ketersediaan info pantauan hrg pokmas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Jml promosi dagang yang diikuti (kali)	1	1	1	1	1	1
6	Nilai Ekspor	\$12.205.493,30	\$18.983.364,60	\$18.983.364,60	\$37.190.000,00	\$48.785.451,29	\$62.142.857,14
7	Kntribusi sektor dagangthdp PDRB (%)	13,83%	13,68%	13,68%	13,5%	13,5%	NA
8	Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina (kelompok)	15	16	16	17	19	20
9	Jml pasar daerah (unit)	11	12	12	12	13	15
10	Jml pasar daerah yg memenuhi kriteria pasar sehat (uni)	11	12	12	12	13	15
11	Lokasi PKL yg tertata (lokasi)	2	3	3	3	3	3

Sumber: Dinindagkop dan UKM Tahun 2018

h. Perindustrian

Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, yaitu berturut-turut sebesar 19,05%, 20,84%, 20,84%, 21,27% dan 21,8%. Kondisi ini menunjukkan semakin berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang. Semakin berperannya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri, dimana indikator-indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Rembang belum memiliki kawasan industri terpadu yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.

Kabupaten Rembang memiliki industri besar yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, Industri kimia-bahan bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan umum. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi industri menengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain.

Secara rinci perkembangan sektor industri di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.75
Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan IKM yang dibina (%)	1,5	1,1	1,1	4	5	2,53
2	Cakupan klp IKM ygmendpt bantuan (%)	100	100	100	0,15	1	2,55
3	Kontribusi sektor Industri thdp PDRB (%)	19,05	20,84	20,84	21,27	21,8	NA
4	% industri kecil & menengah thd total jml industri (besar, menengah & kecil)	99	99	99	99	98	98,20
5	Jml IKM ygdpt fasilitasi Perijinan	40	25	25	15	15	9
6	Jml IKM yg tlh mengikuti pameran promosi produk	25	12	12	15	260	280
7	Pertumbuhan IKM (%)	2,08	2,76	1	1,17	0,66	2,14
8	Jml fasilitas peningkatan kemampuan teknologi industri	18	13	13	9	10	2,14
9	Jumlah klaster industri	8	8	9	9	9	9
10	Jumlah sentra industri	35	37	37	33	40	9

Sumber Data : Dinindagkop dan UMKM Tahun 2018

i. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*human rights*), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Banyaknya transmigran pada tahun 2011-2014 dari 10 KK (35 jiwa) menjadi 3 KK (11 jiwa). Rendahnya jumlah transmigran di Kabupaten Rembang, karena ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat) sedikit. Transmigran yang berangkat semua berprofesi sebagai petani, karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan di bidang pertanian atau perkebunan.

2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak lagi disebutkan urusan perencanaan pembangunan dan urusan otonomi daerah. Institusi atau lembaga yang saat ini melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kategori unsur penunjang pemerintahan. Unsur penunjang pemerintahan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a. Kepegawaian

Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan

tersebut merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemberian kesempatan studi lanjut (melalui pendidikan diploma, sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi), pendidikan non formal (melalui pelatihan teknik, kursus, semiloka dan lain-lain) serta diklat fungsional dan diklat teknis. Sedangkan responsibilitas dan akuntabilitas dengan mewujudkan budaya organisasi, peningkatan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 tercatat sebanyak 8.271 orang yang terdistribusi pada 39 unit badan/dinas/lembaga termasuk di dalamnya instansi vertikal. Perincian data aparatur pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki 5.034 orang (57,25%) dan perempuan sebanyak 3.759 orang (42,75%). Berdasarkan pengelompokan golongan diketahui sebagian besar Golongan III sebesar 38,54%, Golongan IV sebanyak 34,93% sa Golongan I sebesar 3,33% dan Golongan II sebesar 23,20%. Kualitas sumberdaya aparatur dapat dilihat dari rata-rata pendidikan yang ditamatkan dimana (72,8%) aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang berpendidikan perguruan tinggi, dengan perincian lulusan program diploma sebesar 25,68%; pendidikan sarjana sebesar 45,55% dan sebanyak 1,57% telah menyelesaikan pendidikan magister (S-2). Sementara itu, aparat pemerintah yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 27,2% saja. Dengan demikian maka diharapkan pendidikan aparatur akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat serta kalangan dunia usaha. Upaya peningkatan pelayanan publik secara akuntabel dan responsif merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selengkapnyanya Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang
Tahun 2013–2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Program Pendidikan Kedinasan						
1	Jml Apratur yg mengikuti Diklat Pim II	3	1	2	8	-	-
2	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim III	3	1	-	11	8	7
3	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim IV	40	40	40	1	4	2
4	Jml PNS mengikuti Diklat Teknis tiaph	100	82	192	264	129	93
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
1	% PNS yg kenaikan pangkatnya tepat waktu	99.38%	99.56%	94.70%	99%	99%	100%
2	jml PNS Pensiun setiap tahun	281	136	136	-	-	304
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	9.09	9.09	75	14	3	14

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018

Gambaran kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat dari pelaksanaan program-program peningkatan dan

pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, adalah sebagai berikut:

- 1) Program pendidikan kedinasan;
- 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur adalah dengan melalui berbagai diklat. Kegiatan Diklat Aparatur rata-rata mencapai 336 orang aparatur yang telah memenuhi kualifikasi dan prosedur pengajuan. Diklat aparatur terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan terbagi lagi menjadi diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. Naik turunnya jumlah peserta diklat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia dan penawaran diklat dari instansi yang lebih tinggi pusat maupun provinsi.

Selain menyelenggarakan diklat, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BKD bertugas untuk menyusun regulasi standar kompetensi pegawai dan manajemen talenta. Standar Kompetensi pegawai meliputi penyusunan regulasi standar kompetensi pegawai, standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi managerial. Manajemen talenta meliputi Assessment Pegawai, pemetaan assessment pejabat Eselon II dan III dan tindak lanjut asesment. Kedua hal tersebut akan diupayakan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, turut berimplikasi pada perubahan kaidah penyusunan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan batas-batas kewenangan pemerintah daerah yang diatur di dalamnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka tahunan. Dalam rangka tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu ditunjang dengan kelengkapan data yang obyektif, akurat dan komprehensif, didukung peningkatan sumberdaya aparatur perencana di setiap Perangkat Daerah yang semakin baik serta mekanisme perencanaan yang sesuai kaidah. Demikian pula penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus bersifat terpadu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten sekitar, kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta arahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang telah diupayakan terpadu dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai perwujudan komitmen daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar terdapat sinergitas perencanaan pembangunan secara nasional. Dokumen perencanaan di Kabupaten Rembang secara teknis disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka pemerintah Kabupaten Rembang wajib menyusun dokumen perencanaan, terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang wajib mengakomodasi

kebijakan-kebijakan strategis dalam rencana pembangunan daerah seperti: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); RAD Pengurangan Resiko Bencana serta berbagai kebijakan lain yang penting dan relevan dalam pembangunan daerah.

Terdapat empat indikator kunci yang berpengaruh pada keberhasilan perkembangan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, diantaranya meliputi: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Perencanaan RPJMD 2016-2021; 3) tersedianya dokumen RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada setiap tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja per tahun. Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut telah diupayakan dengan baik dan didukung oleh sistem informasi perencanaan yang akan terus disempurnakan implementasinya.

Secara lengkap Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013–2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dg Perda	1	1	1	1	1	1
b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dg Perda	1	1	1	1	1	1
c) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dg Perbup	1	1	1	1	1	1
d) %Penjabaran Program RPJMD dlm RKPD	75	78	80	78	88	87

Sumber: Bappeda Kabupaten Rembang, 2018

c. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (Litbang) memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, perlu adanya mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan (Litbang) yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Perencanaan Kelitbangan, Jurnal Penelitian, Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan, Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Rembang, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kabupaten Inovasi dan Daya Saing Daerah, serta Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil Litbang dan Inovasi dalam perencanaan, kebijakan, pembangunan maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

d. Pengawasan

Terbitnya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan birokrasi bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah. Oleh karena itu semakin strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dalam koridor reformasi birokrasi.

Profesionalisme aparatur pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan

akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas kepada masyarakat sangat tergantung pada hasil pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah. Disamping itu, Inspektorat secara sinergis menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semakin baik hasilnya.

Sebagai gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang telah melaksanakan dua (2) program yang terkait dengan sistem pengawasan internal dan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan, yaitu:

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml Laporan hsl Pemeriksaan (LHP) Reguler	240	240	100	144	240	136
2.	Jumlah LHP Khusus/Kasus	37	93	63	141	101	97
3.	Jml laphsl tindak lanjut temuan hsl pengawasan yg telah disusun	240	240	160	160	180	192
4.	% Rekomendasi Hsl Pemeriksaan ygsdh selesai ditindaklanjuti	82	81,3	80	92	83,9	52,9
5.	Lap hsl Monitoring Penyelenggaraan Urusan pemdes	96	96	84	13	-	-
6.	Laporan Hasil Reviu LKPD	1	1	1	1	1	1
7.	Laporan Reviu LKJIP Kabupaten	1	1	1	1	1	1
8.	Laporan Evaluasi LKJIP PD	12	12	24	-	16	16
9.	Koordinasi Pengawasan Secara komprehensif di Kabupaten Rembang	1	1	1	1	1	1
10.	Jml tenaga pemeriksa yg menguasai teknik was&penilaian akuntabilitas kinerja (sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) & Pengawas Penyeleng Urusan Pem di Daerah (P2UPD)):						
	a. JFA	4	-	8	7	7	8
	b. P2UPD	6	-	6	6	5	5
11.	Level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Rembang	1	1	1	1	2	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2018

e. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map.Reformasi Birokrasi 2015-2019 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih

baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Rembang, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabelberikut ini.

Tabel 2.79
Nilai AKIP Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2018

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018
1	Perencanaan Kinerja	30	18,92	19,59	19,91
2	Pengukuran Kinerja	25	10,02	11,47	14,11
3	Pelaporan Kinerja	15	10,26	10,15	10,20
4	Evaluasi Kinerja	10	4,78	5,09	5,29
5	Capaian Kinerja	20	8,50	8,75	9,12
	Nilai AKIP	100	52,49	55,04	58,64
			CC	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018

f. Sekretariat DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 partai politik, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut: Fraksi PPP sebanyak 10 anggota; Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 anggota; Fraksi PDIP dan Nasdem sebanyak 8 anggota; Fraksi PKB sebanyak 6 anggota; Fraksi Gerindra sebanyak 5 anggota; Fraksi Karya Sejahtera sebanyak 4 anggota dan Fraksi Harapan sebanyak 4 anggota.

Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Rembang maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD, terutama fasilitasi penyelenggaraan rapat dewan, kunjungan kerja, reses dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dewan. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2010–2015, adalah sebagai berikut:

- a. Program penyusunan peraturan perundangan;
- b. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD;
- c. Program fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD;
- d. Program konsultasi publik.

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.80
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Program / Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perda yang ditetapkan	9	9	8	9	16	9
2	Perda yang disetujui DPRD	9	9	8	9	16	9
3	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	4	3	16	11	16	9
4	% Capaian Prolegda (%)	100	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya fungsi Pengawasan DPRD (kali)	30	30	30	57	120	110
6	Tersedianya Tenaga Ahli untuk DPRD	7	7	7	7	8	9
7	Terselenggaranya rapat-rapat DPRD diluar pembahasan perda (kali)	86	64	100	153	123	105
8	Terselenggaranya pendalaman tugas, orientasi dan pengembangan SDM (kali)	9	9	8	7	8	6

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019

2.4. Aspek daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu ukuran untuk menilai daya beli relatif suatu wilayah dengan wilayah lainnya dengan asumsi barang-barang dan jasa-jasa di kedua wilayah tersebut berbiaya sama. Dalam penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan digunakan teknik penyesuaian terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

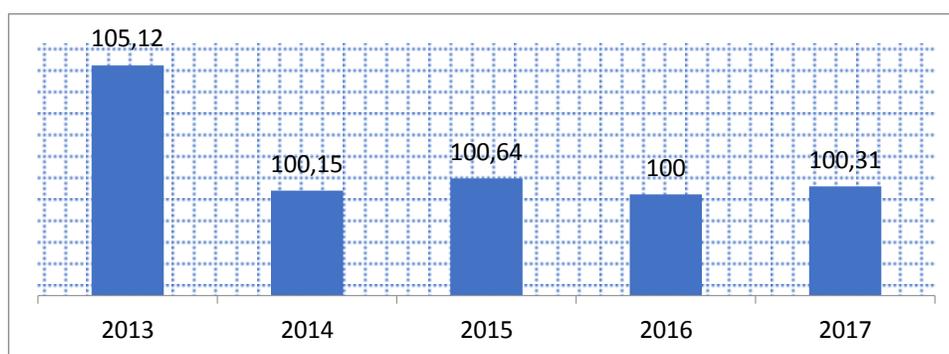
Tabel 2.81
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017

Indikator	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rembang	9.013	9.122	9.453	9.736	10.191

Sumber: BPS 2018

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari tahun 2016, NTP rata-rata sebesar 100 menjadi 101,31 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh naik-turunnya indeks yang diterima petani (indeks harga hasil produksi pertanian) sedangkan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian) juga mengalami hal yang sama. NTP Kabupaten Rembang tahun 2013-2017 secara lengkap dijelaskan pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.21

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

a. Perhubungan

1) Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektar dan terbagi ke dalam 14 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 642,75 km ruas jalan kabupaten dan 238.600 km jalan poros desa. Jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pada tahun 2018 sebanyak 181.371 unit. Perkembangan jumlah kendaraan di kabupaten Rembang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82

Jumlah Kendaraan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mobil Penumpang	5.787	6.703	7.615	8.642	9.819
2	Bus	988	1.139	1.213	1.238	1.387
3	Mobil Barang	2.741	2.988	3.107	3.454	3.592
4	Sepeda Motor	115.472	123.502	148.877	157.145	166.573

Sumber: SIPD, 2018

2) Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tersedia 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Rembang yang melayani transportasi baik dalam kota maupun ke luar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah orang yang dapat diangkut sebanyak 492.267 orang, sedangkan jumlah barang yang terangkut pada tahun 2018 sebanyak 265.864 ton.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinhubkominfo Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Satlantas Polres Rembang secara rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas

yang berkeselamatan kepada pemilik, pengemudi kendaraan angkutan umum barang maupun orang.

b. Penataan Ruang**1) Ketaatan Terhadap RTRW**

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Selanjutnya sebagai persyaratan proses legislasi Revisi RTRW Kabupaten Rembang disusun dokumen naskah akademis dan kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Kabupaten Rembang.

2) Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diwujudkan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW terbagi menjadi tiga yaitu kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar seluas 869 hektar ke depan diarahkan untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana peruntukan kawasan industri besar tersebut terletak di Kecamatan Rembang, Sluke dan Gunem. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terletak di sepanjang koridor pantura yaitu Kaliore, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.

3) Luas Wilayah Kebanjiran

Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliore dan Kecamatan Sumber.

4) Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliore, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.

5) Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan

menyebarkan, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang berdasarkan lampiran permukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 3.214 hektar yang tersebar di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan.

c. Pariwisata

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha yang terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa.

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/ buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumu Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwisata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

1) Jumlah Rumah Makan dan Tenaga Kerja

Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2014 rumah makan di Kabupaten Rembang berjumlah 23 buah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 31 buah tenaga kerja di rumah makan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 230 orang.

2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 21 buah. Terdiri dari 1 hotel bintang dan 20 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

d. Utilitas Publik

Sejalan dengan perwujudan struktur ruang RTRWK maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang seyogyanya terus melanjutkan mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan sungai terpadu, pembangunan embung-embung, serta peningkatan prasarana sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.83
Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No.	Item	2014	2015	2016	2017	2018
1	Air minum %	70	80,34	84,27	84,68	85,66
2	Sanitasi (dasar) %	71,25	77,42	79,98	80,64	100,00*)
3	Persampahan %	20,4	20,7	21,2	21,9	14,75**)

*) Capaian sanitasi dasar berdasarkan cakupan desa ODF versi STBM

**) Capaian sampah di tahun 2018 dihitung dari timbulan sampah seluruh kabupaten baik perdesaan maupun perkotaan. Tahun sebelumnya hanya dihitung dari timbulan sampah perkotaan.

Sumber: DPKP Tahun 2018

e. Fokus Iklim Investasi

1) Angka Kriminalitas

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2018 masih mencatat laporan kasus pidana sejumlah 96 kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal mencapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.84
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal		
		Kasus	Tertangani	Rasio
1	2014	52	32	61,5
2	2015	84	81	96,4
3	2016	21	19	90,4
4	2017	96	87	90,6
5	2018	57	57	100

Sumber: Polres Rembang 2018(data diolah)

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

2) Kemudahan Perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Rembang. Pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rembang meliputi semua ijin berusaha/investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau sesuai yang ada dalam Sistem OSS, serta fasilitasi pelayanan diluar OSS seperti fasilitasi ijin pertambangan, ijin trayek, ijin penyelenggaraan reklame, ijin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini, ijin alih fungsi lahan, dan lain-lain, dengan jumlah total pelayanan sekitar <150 jenis pelayanan perijinan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai dari 5 s.d. 10 hari. Adapun jenis fasilitasi pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang berdasarkan sektor usaha, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.85
Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan Berdasarkan Sektor Usaha
di Kabupaten Rembang

No	Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan
1.	Perijinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Perijinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup
3.	Perijinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum

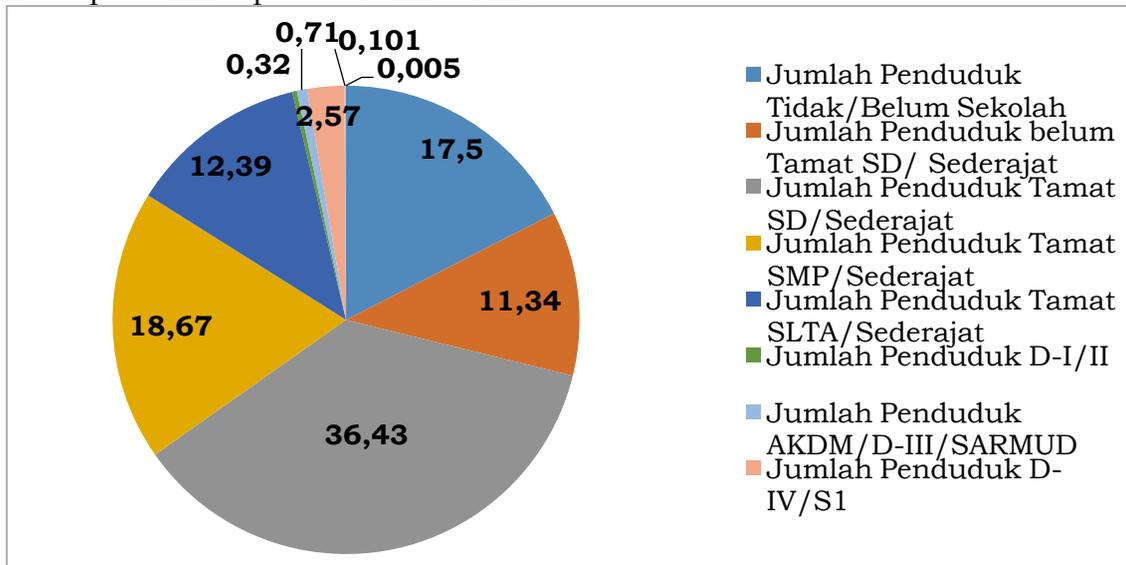
No	Jenis Fasilitas Pelayanan Perijinan
4.	Perijinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
5.	Perijinan Berusaha Sektor Kesehatan
6.	Perijinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan
7.	Perijinan Berusaha Sektor Perindustrian
8.	Perijinan Berusaha Sektor Perdagangan
9.	Perijinan Berusaha Sektor Perhubungan
10.	Perijinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika
11.	Perijinan Berusaha Sektor Keuangan
12.	Perijinan Berusaha Sektor Pariwisata
13.	Perijinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: DPM PTSP NAKER Kabupaten Rembang Tahun 2019

f. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi

Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada Grafik berikut :



Grafik 2.22
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Sumber Dindukcapil Kab.Rembang Tahun 2018

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang berpendidikan tamat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok penduduk tamat SLTA sederajat serta yang terakhir kelompok penduduk taatan Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga starta 3.

2) Rasio ketergantungan

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2017 sebanyak 627.714, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 312.868 jiwa dan perempuan sebanyak 314.846 jiwa . Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 440.331 . sedangkan umur yang tidak produktif yaitu pada usia 0-14 th sebesar 140.302 jiwa dan pada usia 65+ sebesar 47.081 jiwa.

Apabila di dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 42,56 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 4,56 orang usia tidak produktif,

dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali lipat disebut dengan bonus demografi.

2.4.3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Iptek, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDA, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama diantaranya inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Inovasi daerah tersebut meliputi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sistem Inovasi Daerah atau SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sedangkan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut Kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Pengembangan daerah/kabupaten inovatif merupakan suatu model pendekatan yang perlu didorong untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.

2.4.4. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah merumuskan kebijakan inovasi dengan mengacu kepada peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang bertujuan membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan perbaikan kualitas pelayanan kerja aparatur, sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih efisien dan berkualitas.

Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari 32 sistem yang eksisting sampai akhir 2018, yang terdiri dari 15 SIM Tata Kelola Pemerintahan dan 10 SIM Pelayanan Publik.

Tabel 2.86
Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Rembang
Tahun 2018

No.	Inovasi	Instansi
1.	JDIH	Bag. Hukum
2.	Produk Hukum	Bag. Hukum
3.	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah)	Dinarpus
4.	E-Retribusi Pasar	Dinindagkop&UKM
5.	Sistem Penataan naskah dinas & arsip sekretariat DPRD	Setwan
6.	SIP@NDU (Sistem Informasi Perencanaan Terpadu)	Bappeda
7.	E-Budgeting	Bappeda
8.	E-presensi	BKD
9.	SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	BPPKAD
10.	SIMKEUDA	BPPKAD
11.	SIMDABMD	BPPKAD
12.	SIMGAJI	BPPKAD
13.	MAPATDA	BPPKAD
14.	SISMIOP	BPPKAD
15.	MAPINFO	BPPKAD

Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2018

2.4.5. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah wajib menyediakan pelayanan publik yang mumpuni bagi warganya. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efisien. Selain untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik tersebut dimaksudkan mencapai tujuan seperti meningkatkan daya saing dan berorientasi pada kepentingan umum.

Inovasi pelayanan publik juga dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka membantu masyarakat dan pengembangan potensi-potensi khas yang daerah dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki website sendiri, masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan Kabupaten Rembang melalui website Kabupaten Rembang rembangkab.go.id.

Tabel 2.87
Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Inovasi	Instansi/Keterangan
1.	SI LINCAH (Sistem Layanan Informasi Nyaman Cepat Akuntabel dan Hemat)	Dinkominfo, SIM Layanan informasi keterbukaan publik yang lebih cepat.
2.	ARJUNO (Aplikasi Rujukan ke RSUD dr. R. Soetrasno)	RSUD, SIM layanan rujukan pasien dari puskesmas ke RSUD dr. R. Soetrasno.
3.	E-KIR (Elektronik KIR)	Dinhub, SIM layanan KIR kendaraan.
4.	BKO (Bursa Kerja Online) Job Fair	DPMPTSP&Naker, SIM layanan pencari kerja ke perusahaan.
5.	Enjoy Rembang	Dinbudpar, SIM-aplikasi layanan informasi tentang promosi pariwisata Kabupaten Rembang.
6.	Kresno (sistem nomor antrian online)	RSUD, SIM layanan antrian pasien secara online di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
7.	Pulang Gratis	RSUD, pelayanan antar pasien pulang gratis.
8.	rembangkab.go.id	Dinkominfo, SIM-Website Kabupaten Rembang
9.	Website perizinan	DPMPTSPNaker, SIM SIPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) Pelayanan Perizinan Pusat yg terintegrasi dg Daerah, ygdpt dilakukan pendaftarannya scr online terdiri dr 100 jenis perizinan & fasilitas yan lainnya.
10.	KIARA (Klinik Pelayanan Perencanaan)	Bappeda, pelayanan konsultasi perencanaan
11.	SIM Litbang	Bappeda, SIM Kelitbangan yang terintegrasi dengan Kesbangpolinmas dan DPMPTSPNaker
12.	SIM Ketenagakerjaan	DPMPTSPNaker, SIM Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Dindukcapil dan Kecamatan.

No.	Inovasi	Instansi/Keterangan
13.	BAPER (Mobil Ambulan Pencari Riak)	UPT Puskesmas Pamotan, upaya pemberantasan penyakit TBC, dimana salah satu upaya nya adalah dengan memeriksa riak warga yang sakit batuk.
14.	GREMET (Program Gerakan Ngrumat Wong Meteng)	UPT Puskesmas Pancur, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memenuhi hak sehingga ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
15.	KELONI (Cekel Lan Openi)	UPT Puskesmas Gunem, menurunkan angka kematian Ibu dan bayi di wilayah kecamatan Gunem sebagai wujud dari Gerakan Sayang Ibu dan anak.
16.	Ante Natal Care (ANC) Mobile	UPT Puskesmas Kaliori, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standart.

Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2019

2.4.6. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dimiliki Kabupaten Rembang adalah inovasi yang bersifat eksternal. Dalam rangka menampung, mengolah dan mempublikasikan kepada publik sehingga hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Inovasi ini berisikan hasil karya pembangunan Kabupaten Rembang baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun swasta. Berikut kondisi perkembangan Inovasi yang telah dicapai sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Inovasi	Instansi/Keterangan
1.	KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)	Bappeda, diselenggarakan dlm rangka menggali dan melakukan pembinaan terhadap produk krenova yg berbasis ilmu pengetahuan & teknologi masyarakat
2.	BID (Bursa Inovasi Desa)	Dinpermades, diselenggarakan dlm rangka menggali potensi inovasi pd tiap desa di Kabupaten Rembang
3.	Kamalia Merekaah (Koin Amal Lansia Bagi Mereka Menjadi Berkah)	Bappeda, kegiatan pengumpulan koin tuk memberikan santunan pd lansia terlantar, dlm rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan
4.	Istri Mantab (Industri Rumahan Mantab)	Bappeda dan DinsosPPKB, kegiatan untuk menggali dan menumbuhkembangkan industri rumahan rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan
5.	Desa Inovasi	Bappeda & Dinpermades, kegiatan pembinaan & pemberian penghargaan terhadap desa yg telah melakukan inovasi
6.	Klinik TTG (Teknologi Tepat Guna)	Dinpermades dan masyarakat, forum konsultasi dan pembinaan inovasi masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
7.	Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)	Dinpermades dan masyarakat, lembaga masy yg menangani inovasi-inovasi yg ada di masyarakat berbasis TTG.
8.	Microlite (menciptakan insan yang cakap dan ramah mengolah literasi)	Dinarpus, meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan memberikan pelatihan.

Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2019

2.4.7. Daya Dukung Inovasi Daerah

Daya dukung inovasi Kabupaten Rembang tidak hanya berasal dari pemerintahan daerah. Para stakeholder dituntut meningkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satunya adalah adanya perguruan tinggi yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan.

Tabel 2.89
Daya Dukung Inovasi Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Daya Dukung Inovasi - Perguruan Tinggi	Keterangan
1.	STIE YPPI	Menginduk LPPM, KKU (Kuliah Kerja Usaha)
2.	STAI Al ANWAR	Menginduk LPPM
3.	STAI Al Akmal	Menginduk LPPM
4.	AKSI	Akademi Komunitas Semen Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi diploma dua di Kabupaten Rembang yang dimiliki PT. Semen Indonesia Tbk. yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di BUMN
5.	PSDKU UNDIP	Menginduk LPPM
6.	DRD (Dewan Riset Daerah)	Sekretariat di Bappeda Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bappeda bekerja sama dengan Perguruan Tinggi membentuk DRD Kabupaten Rembang yang merupakan Dewan Riset sebagai lembaga non struktural yang beranggotakan para Dosen perguruan Tinggi yang mempunyai tugas memberikan masukan dan arah kebijakan serta mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK)
7.	ARD (Agenda Riset Daerah)	ARD merupakan produk yang dihasilkan DRD Kabupaten Rembang berupa agenda Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan dan disusun dalam dokumen sebagai acuan dan masukan yang dipakai Kepala Daerah dalam arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. ARD disusun berdasarkan masa bakti/periode DRD
8.	Jurnal Litbang Rembang (JLR)	JLR adalah media informasi penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Rembang bersama DRD, sumber JLR dari masyarakat, perguruan tinggi, lembaga serta pemerintah dengan lokus litbang wilayah Kabupaten Rembang. JLR bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemajuan pembangunan berkelanjutan berbagai bidang serta peningkatan daya saing daerah Kabuapten Rembang
9.	BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK	BKK-SMK merupakan salah satu unit yang membantu Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dan menempatkan lulusan SMK yang berprestasi di Perusahaan-perusahaan
10.	RCCN (Rembang Creative Community Network)	Sebuah komunitas untuk mewadai penggiat ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang

Sumber : Kabupaten Rembang diolah, Tahun 2019

2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018

2.5.1. Capaian target Kinerja SPM

Jika dievaluasi dari pencapaian terhadap standar pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten Rembang
Tahun 2018

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
1.	Tersedia satuan pendidikan dlm jarak yg terjangkau dg berjalan kaki yimaksimal 3 km ntk SD/MI & 6 km untSMP/MTsdari klpkpermukimanpermanen di daerah terpencil	SD	374	Permukiman	374	100%
		MI	40	Pemukiman	40	100%
		SMP	54	Permukiman	54	100%
		MTs	41	Pemukiman	41	100%
2.	Jmlpsrtdidik dlmtiaprombel utk SD/MI tdklebih 32 org&unt SMP/ MTstdklebih 36 orgutk tiap klsyg dilengkapi dg meja & kursiyg cukup tukpsrt didik & guru,papan tulis.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
3.	tiap SMP & MTs tersedia ruangan labIPA yglengkapdg meja kursi yg cukup utk 36 siswa & minimal 1 set peralatan praktek IPA utk demonstrasi & eksperimen pst didik	SMP	54	Sekolah	44	81,49%
		MTs	41	Sekolah	23	58,98%
4.	setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia 1 ruang guru, kepala sekolah & staf kependidikan lainnya; & disetiap SMP& MTs tersedia ruang kepala sekolah ygterpisah dari ruang guru.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
5.	setiap SD & MI tersedia 1 orgguru utk setiap 32 psrt didik & 6 org guru utk setiap satuanpendidikan &utk daerah khusus 4oranggurusetiapsatuanpendidikan.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
6.	setiap SMP & MTs tersedia 1orang guru utk setiap mata pelajaran, &utk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	54	Sekolah	53	98,15%
		MTs	41	Sekolah	40	97,56%
7.	setiap SD & MI tersedia 2 orgguru yg memenuhi kualifikasi akademikS1 atau D-IV & 2 (dua) orang guru yangtelah memiliki sertifikat pendidik.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
8.	setiap SMP/MTs tersedia guru dg kualifikasi akademik S-1 atau D-IVsebanyak 70% & separuh diantaranya(35% dari keseluruhan guru) telah memilikisertifikat pendidik,utk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%.	SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
9.	setiap SMP & MTs tersedia gurudg kualifikasi akademik S-1 atau D-IV& telah memiliki sertifikat pendidikmasing-masing 1org untuk matapelajaranMatematika,IPA, bahasa Indonesia & Bahasa Inggris.	SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
10.	setiap kab/Kota semua kepala SD& MI berkualifikasi akademik S-1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
11.	setiapkab/Kotasemua kepalaSMP & MTs berkualifikasi akademik S-1/ D-IV & telah memiliki sertifikatpendidik.	SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
12.	setiap kab/Kota semua pengawas sekolah & madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV & telah memilikisertifikat pendidik.		1	Kab/Kota	1	100%
13.	Pemkab/Kotamemilikirencana & melaksanakan kegiatan untukmembantusatuanpendidikandlmme ngembangkan kurikulum& proses		1	Kab/Kota	1	100%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
	pembelajaran yg efektif.					
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1x/bulan & setiap kunjungan dilakukan slm 3 jam utk melakukan supervisi & pembinaan.	SD	374	Sekolah	369	98,66%
		MI	40	Sekolah	36	90%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	30	73,17%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan dasar pada tingkat kabupaten, secara umum hampir semua indikator standar pelayanan minimal tercapai 100%, hanya pada SMP dan MTs ketersediaan ruangan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 siswadan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik jumlahnya masih perlu ditingkatkan, karena capaiannya masih 58,98%.

Tabel 2.91
Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2018

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
1.	Setiap SD & MI menyediakan buku teks yg sudah ditetapkan kelayakan oleh pemkab mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS & Pkn dg perbandingan 1 (satu) set utk setiap peserta didik.	SD	374	Sekolah	365	97,33%
		MI	40	Sekolah	38	95%
2.	Setiap SMP & MTs menyediakan buku teks yg sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemkab mencakup semua mata plj rndg perbandingan 1 set setiap prt didik.	SMP	54	Sekolah	50	92,59%
		MTs	41	Sekolah	34	87,18%
3.	Setiap SD & MI menyediakan 1 set peraga IPA & bahan yg terdiri dr model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), cth peralatan optik, KIT IPA utk eksperimen dasar & poster/carta IPA	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
4.	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul bukupengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul bukupengayaan dan 20 buku referensi.	SD	374	Sekolah	352	94,12%
		MI	40	Sekolah	29	72,5%
		SMP	54	Sekolah	47	87,04%
		MTs	41	Sekolah	36	87,8%
5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggudi satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing ataumelatih peserta didik dan melaksanakan tugastambahan.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
6.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: Kelas 1- 2: 18 jam per minggu Kelas 3: 24 jam per minggu Kelas 4 - 6: 27 jam per minggu Kelas 7 - 9: 27 jam per minggu	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
7.	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
8.	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yg disusun berdasarkan silabus utk setiap mata pljrnygdiampunya.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
9.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan Program penilaian untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
10.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
11.	Setiap guru menyampaikan laporan hsl evaluasi mata pelajaran serta hsl penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dlmbentuk laporan hsl belajar	SD	374	Sekolah	365	97,33%
		MI	40	Sekolah	34	85%
		SMP	54	Sekolah	51	94,44%
		MTs	41	Sekolah	37	90,24%
12.	Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN)	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
13.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tingkat satuan pendidikan, dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan dasar, secara umum juga mempunyai kecenderungan semua indikator standar pelayanan minimal tercapai 100%. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang masih cukup rendah pencapaiannya yaitu indikator nomor 1, 2, dan 4.

Pencapaian indikator tersebut berkaitan dengan pemenuhan buku baik buku teks pelajaran, buku pengayaan maupun buku referensi. Pencapaian indikator tersebut berkisar antara 72.5% sampai dengan 97.33% (belum memenuhi 100%). Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang belum memenuhi SPM untuk pemenuhan buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku referensi. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pemenuhan buku-buku tersebut dapat dipenuhi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemetaan prioritas penggunaan dana BOS perlu kembali dilakukan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan Dasar.

Pelayanan minimal bidang kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang maka capaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92
Hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Rembang tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Program/kegiatan yang Mendukung	Tahun 2018		Pencapaian	
				Target	Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	7	8	9	10
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	90,69	√	
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	100	√	
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	98	√	
4	pelayanan kesehatan balita	Balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	100	95,08	√	
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100	99,98	√	
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara pada usia 15 s.d 59 tahun	Program pencegahan & penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100	63		√
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara pada usia 60 tahun ke atas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100	100	√	
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	100	37,15		√
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita diabetes melitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	80	31		√
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100	81,83		√
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	29,8		√
12	Yankes orgdg risiko ternfksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh	Orang dengan risiko terindikasi Human Immunodeficie	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	99,2	√	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Program/kegiatan yang Mendukung	Tahun 2018		Pencapaian	
				Targe t	Capaia n	Tercap ai	Tidak Tercap ai
	man (Human Immunodeficiency Virus	ncy Virus					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari semua indikator SPM Bidang Kesehatan sebanyak 12 Indikator, yang telah tercapai 100% sebanyak 2 indikator , yang tercapai 90-99% sebanyak 5 indikator, 60-82% sebanyak 2 indikator dan belum tercapai atau kurang dari 50% ada 3 indikator, yaitu pada payanan hipertensi, diabetes dan TB. Hal ini menunjukkan perlunya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan capaian pelayanan pada indikator tersebut.

Perubahan RPJMD Rembang Tahun 2016 - 2021 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, ($X \leq 50\%$);
- Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$);
- Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$);
- Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$);
- Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$).

Kkk

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2018 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rembang pada tabel 2.93.

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
	Indikator Makro dan Agregat						
	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,64	-		5,90
	2) Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp.Ribu	21.326	22,5	-		24
	3) Laju Inflasi	%	2,66	3,33	2,64	Tinggi	3,23
	4) Indeks Gini	Indeks	0,32	0,29	-		0,26
	5) Persentase Penduduk Miskin	%	18,90	14,97	15,41		11,55
	6) Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	11,86	13,47	-		13,64
	7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	67,4	68,5	69,46		69,8
	8) Indeks Pembangunan Gender	Skor	86,30	86,9	-		87,5
	9) Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	66,43	68	-		69,5
1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan							
a. Terwujudnya <i>Good Governance</i>	9) Nilai PMPRB	Nilai	60	64	-	-	67
	10) Rata-rata Nilai SKP	Skor	84	87	-		90
	11) Tingkat maturitas SPIP	Nilai	1	2	2.736	Sangat Tinggi	4
	12) Tingkat kapabilitas APIP	Level	1	3	3	Sangat Tinggi	4
	13) Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WDP	WTP	WDP	Sedang	WTP
	14) Nilai SAKIP	Nilai	50,59	62	-	-	68
	15) Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	2.43	3.01	22.24	Sangat Tinggi	3,50

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan							
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	16) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	45	60	66	Sangat Tinggi	75
	17) Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	70	85	87.19	Sangat Tinggi	100
c. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	18) Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	70	85	99.47	Sangat Tinggi	100
d. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	19) Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	85	100	100	Sangat Tinggi	100
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif							
e. Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	20) Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor	73,58	77	-	-	80
	21) Persentase PD telah memiliki website aktif	%	86,97	100	100	Sangat Tinggi	100
	22) Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	85	100	100	Sangat Tinggi	100
	23) Ketersediaan Data Pembangunan Daerah	%	60,3	80	95	Sangat Tinggi	100
	24) Persentase Surat/Santel yang dikelola	%	100	100	100	Sangat Tinggi	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
1. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah							
a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian	25) Indeks Produksi Padi	Skor	1,04	1,09	-	-	1,14
	26) NTP	Skor	100,38	100,68	-	-	100,98
	27) Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	1.31	1.45	1.14	Tinggi	1,60
	28) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5	5	-	-	5
b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI	29) Produksi ikan	Ton	4.04	12,120	6,455	Rendah	6,716
	30) Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2.769	2,789	2,770	Sangat Tinggi	2,819
c. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	31) Persentase pertumbuhan ekspor	%/Tahun	3	4	129.46	Sangat Tinggi	4
	32) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	13.87	14.50	13.55	Sangat Tinggi	14,80
	33) Kontribusi sektor industri pengolahan	%	20.9	21.4	21.83	Sangat Tinggi	22
2. Menurunkan angka pengangguran							
d. Menurunnya angka pengangguran	34) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4.10	2.87	Sedang	3,90
3. Menurunkan angka kemiskinan							
e. Menurunnya angka kemiskinan	35) Persentase penduduk miskin	%	18.90	14.97	15.41	Sangat Tinggi	11,55

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup							
f. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	36) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks	63.30	66.5	50	Tinggi	68
1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan							
a. Meningkatnya Nilai Investasi	37) Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rp/tahun	3.478.718	4,521,408	7,173,000	Sangat Tinggi	5.259.020
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif							
a. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	38) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%	6.35	8.25	6.28	Tinggi	10
	39) Presentase koperasi aktif	%	79	86	90.40	Sangat Tinggi	100
	40) Persentase KSP/USP dan koperasi sehat	%	35	39	69.59	Sangat Tinggi	53,00
b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	41) Persentase Pertumbuhan Pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	%/th	5	5	178.29	Sangat Tinggi	5
	42) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1.97	2.2	2.12	Sangat Tinggi	2,5
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.							

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.	43) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	48,98	66.01	67.91	Sangat Tinggi	85,00
	44) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	73,02	82.54	89.68	Sangat Tinggi	92,06
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	45) Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	77,88	86.34	87	Sangat Tinggi	98,12
c. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	46) persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	5,87	8,49	7,74	Sedang	11,07
d. Berkurangnya luas kawasan kumuh	47) Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	7,8	2,80	2,12	Sedang	0
e. Meningkatnya cakupan akses air minum	48) Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	80,34	95,00	85,66	Sedang	100,00
f. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	49) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	77,42	83,50	100	Sangat Tinggi	100,00
g. Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	50) Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	11,74	16,34	3,68	rendah	20
h. Meningkatnya ketersediaan air baku	51) Persentase cakupan Air baku	%	64	76	75	Sangat Tinggi	88
2. Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai							
i. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	52) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	Kawasan	0	3	3	Sangat Tinggi	6
	53) Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	85,00	90	92	Sangat Tinggi	90,00
	54) Persentase ketersediaan angkutan pedesaan	%	56,50	70	72	Sangat Tinggi	85,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat							
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	55) AKI (Angka Kematian Ibu)	Kasus	8	7	9	Sangat Tinggi	5
	56) AKB (Angka Kematian Bayi)	Kasus	134	120	149	Sangat Tinggi	105
	57) Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	164	135	170	Sangat Tinggi	105
	58) Prevalensi Gizi Buruk	%	0.21	0.16	0.11	Sedang	0,10
2. Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan.							
b. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	59) Rata-rata lama sekolah	Tahun	6.9	7.5	6.94	Sangat Tinggi	7,8
	60) Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.46	12	12.04	Sangat Tinggi	12,6
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif	61) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 7 – 12 tahun	%	99.69	99.78	95.38	Sangat Tinggi	99,87

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
	62) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 tahun	%	100	100	91.38	Sangat Tinggi	100
	63) APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	72.36	84	87.76	Sangat Tinggi	96
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	64) Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik	%	26.12	61.87	100	Sangat Tinggi	90
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga							
e. Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	65) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	Jumlah	18	35	46	Sangat Tinggi	50
	66) Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	100	100	19	Sangat Tinggi	100
1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat							
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	67) Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	97.34	97.93	89	Sangat Tinggi	98.10
	68) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi	100
b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	69) Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu Pilpres dan Pileg Pilgub	%	73,67	75	65.2	Tinggi	85,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat							
a. Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	70) Persentase PMKS yang ditangani	%	40,20	55	58.67	Sangat Tinggi	70
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak							
a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	71) Rasio KDRT	Ratio	14/178.53	8/178.53	0.002	Rendah	6/178.53
	72) Cakupan desa ramah anak	%	35,00	65	65	Sangat Tinggi	95,00
	73) Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	45,00	60	70	Sangat Tinggi	75,00
	74) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	%	27.97	31	27.68	Tinggi	34,00
	75) Posyandu aktif	Jumlah	1.225	1.225	1.228	Sangat Tinggi	1.225
	76) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0.3	1.1	1.3	Sangat Tinggi	1,6
	77) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa	%	40	70	80	Sangat Tinggi	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
4. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu							
a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	78) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	6,3	14	17	Sangat Tinggi	20
5. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan							
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	79) Cakupan peserta KB aktif	%	100	100	123.04	Sangat Tinggi	100
	80) Persentase pertumbuhan penduduk	%	0.86	0.71	0.69	Sangat Tinggi	0,53
	81) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6,93	6.67	9.81	Sangat Tinggi	6,5
	82) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49	%	83,57	83.64	80.02	Sangat Tinggi	83,70
	83) Persentase Droup Out (DO) Keluarga Berencana	%	13,62	11.31	7.27	Rendah	9,00
	84) Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	92,12	92.9	100	Sangat Tinggi	93,72
	85) Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	org	10	10	-	-	10
b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	86) Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	%	87,52	100	100	Sangat Tinggi	100
	87) Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	96,45	100	100	Sangat Tinggi	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
1. Mewujudkan kedaulatan pangan							
a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	88) Skor PPH	Skor	86.8	87.7	86.8	Sangat Tinggi	88,3
	89) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	k/kal/ka pita	5.28	6.71	5.044	Tinggi	7.33
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan							
a. Meningkatnya daya beli masyarakat	90) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. (000)	9.013	10	893,475	Sangat Tinggi	10.75
b. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	91) Indeks Produksi pertanian	(kw/ha)	6,1	6,4	-		6,7
	92) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/th	2	2	1.4	Sedang	2%